

KEARIFAN TRADISIONAL MASYARAKAT NTB
KAITANNYA DENGAN

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Cokorda Istri Suryawati
I Made Sumerta
Yufiza

Direktorat
Kebudayaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BALI
TAHUN 2014

**KEARIFAN TRADISIONAL MASYARAKAT NTB
KAITANNYA DENGAN
PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**KEARIFAN TRADISIONAL MASYARAKAT NTB
KAITANNYA DENGAN
PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI**

Cokorda Istri Suryawati
I Made Sumerta
Yufiza

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BALI
TAHUN 2014**

**KEARIFAN TRADISIONAL MASYARAKAT NTB
KAITANNYA DENGAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**
Copyright©Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, 2014

Diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali

Bekerja sama dengan

Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2014

Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292

Tlp. (0274) 7019945; Fax. (0274) 620606

e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id

facebook: Penerbit Ombak Dua

website: www.penerbitombak.com

PO.551.11.'14

Penulis: Cokorda Istri Suryawati, dkk.

Penyunting: Yudistira

Tata letak & sampul: Dian Qamajaya

Sumber foto:

Semua foto pada lampiran merupakan dokumentasi Tim Penulis

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**KEARIFAN TRADISIONAL MASYARAKAT NTB
KAITANNYA DENGAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014

xi + 146 hlm.; 14.5 x 21 cm

ISBN: 978-602-258-242-7

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ~ v

DAFTAR TABEL ~ vii

KATA PENGANTAR ~ viii

PENGANTAR PENULIS ~ x

BAB I PENDAHULUAN ~ 1

A. Latar Belakang ~ 1

B. Tujuan, Teori, Konsep, dan Metode ~ 11

BAB II GAMBARAN UMUM SUKU SASAK LOMBOK ~ 20

A. Sejarah Suku Sasak Lombok ~ 20

B. Letak dan Keadaan Geografis ~ 22

C. Penduduk dan Mata Pencaharian ~ 24

D. Pendidikan dan Sarana Prasarana ~ 27

E. Latar Belakang Sosial dan Budaya ~ 30

BAB III KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SUKU SASAK DI LOMBOK ~ 45

A. Ragam Kearifan Lokal Suku Sasak Di Lombok ~ 45

B. Bentuk Kearifan Lokal Terkait dengan Pendidikan Anti Korupsi ~ 62

BAB IV NILAI KEARIFAN LOKAL TERKAIT PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SUKU SASAK DI LOMBOK ~ 81

- A. Nilai-Nilai Yang Terkandung dalam Kearifan Lokal Yang Terkait dengan Pendidikan Anti Korupsi ~ 81
- B. Praktik Nilai Pendidikan Anti Korupsi Pada Suku Sasak Di Lombok ~ 117

BAB V PENUTUP ~ 127

DAFTAR PUSTAKA ~ 132

DAFTAR INFORMAN ~ 136

LAMPIRAN-LAMPIRAN ~ 138

Foto ~ 138

Peta Pulau Lombok ~ 142

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Lingsar ~ 25
- Tabel 2. Penduduk Menurut Mata Pencaharian ~ 26
- Tabel 3. Penduduk Menurut Pendidikan di Desa Lingsar ~ 28
- Tabel 4. Penduduk Menurut Agama di Desa Lingsar ~ 32
- Tabel 5. Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/
Kota ~ 35
- Tabel 6. Istilah-Istilah Kekerabatan Masyarakat Suku Sasak ~ 88
- Tabel 7. Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota
dan Lapangan Usaha di Lombok Nusa Tenggara Barat ~ 92
- Tabel 8. Persentase Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut
Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha di Lombok Nusa
Tenggara Barat ~ 94
- Tabel 9. Banyak Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat
Pendidikan ~ 96
- Tabel 10. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas Menurut
Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tinggi ~ 98
- Tabel 11. Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/
Kota ~ 103

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat-Nya kegiatan kajian pelestarian nilai budaya dan inventarisasi perlindungan karya budaya Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, NTB, NTT tahun anggaran 2014 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Saya menyambut dengan senang hati dengan diterbitkannya buku hasil kajian dan inventarisasi para peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, NTB, NTT dengan judul *Kearifan Tradisional Masyarakat NTB Kaitannya Dengan Pendidikan Anti Korupsi*.

Oleh karena itu, dengan diterbitkannya buku hasil penelitian tersebut di atas diharapkan juga dari daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Walaupun usaha ini masih awal memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun paling tidak hasil terbitan ini dapat dipakai sebagai bahan referensi maupun kajian lebih lanjut, guna menyelamatkan karya budaya yang hampir punah dan mengisi materi muatan lokal di daerah dimana karya budaya ini hidup dan berkembang.

Saya mengharapkan dengan diterbitkannya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari tujuh ratus lebih suku bangsa dapat saling memahami kebudayaan yang hidup dan berkembang di tiap-tiap daerah maupun suku bangsa. Sehingga akan dapat

memperluas cakrawala budaya bangsa untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan APBN tahun 2014 mulai dari kajian dan inventarisasi perlindungan karya budaya sampai buku penerbitan buku ini.

Badung, 2014

KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BALI, NTB, NTT



Drs. I Made Purna, M.Si

PENGANTAR PENULIS

Puja dan puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga buku yang berjudul Kearifan Lokal kaitannya dengan pendidikan anti korupsi pada masyarakat suku Sasak di Lombok dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan hasil penelitian sebagai kegiatan rutin Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali tahun 2014.

Kearifan lokal dalam bentuk yang umum mempunyai pengertian adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Sedangkan dari versi masyarakat Lombok itu sendiri, bahwa kearifan lokal mempunyai pengertian perilaku positif manusia berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya dapat bersumber dari nilai, agama, adat-sitiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dan beradaptasi dengan lingkungan. Disamping itu kearifan lokal suku sasak terfokus dengan adanya kebenaran yang mentradisi dan ajeg dalam suatu daerah, atau perpaduan firman Tuhan dengan nilai-nilai yang ada.

Tujuan dilaksanakannya penelitian tentang kearifan lokal kaitannya dengan pendidikan anti korupsi pada masyarakat suku Sasak di Lombok adalah untuk memahami dan mendeskripsikan

nilai-nilai pendiudikan anti korupsi serta bentuk kearifan lokal pada suku Sasak di Lombok. Adapun manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, penelitian dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sasak untuk melindungi budaya bangsa Indonesia dari gencarnya pengkaiaman budaya oleh bangsa luar.

Penelitian ini juga di harapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyrakat dalam memahami jati diri bangsanya, sehingga masyarakat memiliki pemahaman serta pandangan maju kedepan untuk dapat mejaga kesatuan dan meliduyngi budaya bangsa yang diwariskan oleh nenek moyang. Akhirnya terima kasih kami sampaikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Kepala Dinas serta seluruh staf kebudayaanya, terima kasih kepada Bapak Haji Jalal Arzaki yang banyak membantu dan memandu kami selama di lapangan juga kepada Bapak Gusia, Bapak Dr. I wayan Wirata yang telah banyak memberikan informasi dan amsukan-masukan yang bermanfaat selama dilapangan, dan kepada semua temen-temen peneliti di BPNB, dan juga kepada penerbit ombak di Jogyakarta yang telah mengupayakan penerbitan buku ini, serta semua pihak yang telah membantu terselesainya penerbitan ini.

Penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan buku ini.

Badung, Oktober 2014

Tim Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lombok terletak antara $8^{\circ}12'$ – $9^{\circ}1'$ Lintang Selatan, dan antara $115^{\circ}44'$ sampai $116^{\circ}40'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah 47.000 km yang mencakup pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pulau Lombok merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat selain Pulau Sumbawa. Kata Lombok tertuang dalam kitab *Negara Kertagama* karya *Empu Prapanca*, seorang pujangga besar pada abad 14, tepatnya sekitar tahun 1365 M. Dalam pupuh XIV bait 3 dan 4 kitab tersebut dinyatakan bahwa Lombok Barat disebut Lombok Mirah, sedangkan wilayah Lombok Timur disebut Sasak. Di sisi lain dalam babad Lombok disebutkan pula bahwa pada zaman dahulu pernah ada seorang raja bernama Lombok yang memerintah di Pulau Lombok (Abdul, 2006: 13).

Pendapat lain menyatakan bahwa kata "Lombok" diambil dari kata *loubouk* dari bahasa Sasak, yang dalam bahasa Indonesia berarti lurus. Berdasarkan arti tersebut, kebanyakan masyarakat menganggap orang-orang yang tinggal di Pulau Lombok berhati lurus atau *loubouk*, jujur, memiliki etika, sopan santun, dan berbudi pekerti luhur.

Pulau Lombok merupakan pulau kecil yang terletak di antara Pulau Bali dan Sumbawa. Penduduk aslinya terkenal dengan

sebutan orang Sasak atau suku Sasak. Hubungan suku Sasak dengan suku bangsa lain menyebabkan pencampuran budaya yang memunculkan keunikan tersendiri. Contoh hubungan antarbudaya yang tampak pada suku Sasak adalah hubungan mereka dengan suku Bali. Beberapa pengaruh dari budaya Bali mewarnai setiap perilaku suku Sasak dalam kehidupan sehari-hari.

Sebelum kedatangan agama Islam di Pulau Lombok, orang-orang Sasak telah memiliki kepercayaan supernatural terhadap roh (animisme) dan kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap gaib (dinamisme). Meskipun pengaruh agama Islam sangat kuat di Lombok, namun masih banyak orang Sasak yang menganut kepercayaan-kepercayaan supernatural tersebut.

Menurut R. Goris kata "Sasak" berasal dari bahasa Sansekerta *Sahsaka*. *Sah* berarti pergi, sementara *Saka* berarti asal atau tempat tinggal. Jadi, *Sahsaka* berarti pergi meninggalkan tanah asal, dan berkumpul di suatu tempat, yaitu di Lombok. Hal ini didasari kebanyakan nenek moyang orang Sasak yang berasal dari tanah Jawa, sebagian dari Bali, Arab, dan Cina yang pindah dari daerahnya untuk tinggal dan menetap di Lombok. Dengan demikian orang Sasak merupakan suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dengan kesatuan sosial lainnya karena memiliki perbedaan kebudayaan dengan suku-suku lainnya di Indonesia.

Suku Sasak adalah suku dari penduduk asli dan kelompok etnik mayoritas yang berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kelompok-kelompok etnik lain yang menetap sampai sekarang di Pulau Lombok antara lain etnik Bali, Sumbawa, Jawa, Arab, dan Cina yang merupakan penduduk pendatang (Budiwanti, 2000:6).

Selain terbagi dalam etnik-etnik, Pulau Lombok juga terbagi dalam bahasa, kebudayaan, dan keagamaan. Masing-masing kelompok etnik berbicara dengan bahasa mereka sendiri. Orang

Sasak mayoritas beragama Islam, orang Bali beragama Hindu, dan orang Cina pada umumnya beragama Kristen.

Suku Sasak mayoritas beragama Islam, namun dalam kesehariannya melaksanakan adat *Wetu Telu*, seperti melakukan pemujaan roh leluhur, berbagai dewa roh, dan lain-lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka cenderung mengabaikan praktik Islam yang rutin dianggap wajib oleh kalangan umat Islam murni (*Waktu Lima*). Pada masyarakat Sasak, adat sangat berperan penting. Akan tetapi, beberapa hal lain terkait dengan praktik keagamaan selalu bertentangan dengan konsep Islam murni. Mereka menyadari aturan-aturan adat tertentu, seperti memberi penghormatan kepada leluhur di kuburan dan memuja roh yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Masyarakat Sasak memeliharanya sebagai bagian dari tradisi keagamaan. Masyarakat Sasak tidak menggariskan suatu batas yang jelas antara adat dan agama karena adat selalu menyatu dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Berdasarkan tradisi keagamaan, suku Sasak di Lombok dibagi menjadi *Waktu Lima* dan *Wetu Telu*. Dengan demikian, *Waktu Lima* suku Sasak ditandai oleh ketaatan yang tinggi terhadap ajaran-ajaran Islam. Komitmen mereka terhadap *syari'ah* bahkan Al-quran dan Hadist lebih besar dibandingkan *Wetu Telu* suku Sasak. Kegiatan ibadah mereka sehari-hari terwujud dalam ketaatan terhadap lima rukun Islam, yaitu salat lima waktu, puasa Ramadhan, membayar zakat, dan berhaji ke tanah suci Mekkah jika mampu (Budiwanti, 2000:8).

Uraian tentang kearifan lokal masyarakat Sasak didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismail, dkk (2009). Hasil penelitian ini telah mampu mengungkapkan dengan cukup jelas dan memberi gambaran yang cukup lengkap tentang kearifan lokal masyarakat Sasak. Dari hasil penelitian tersebut terungkap

beberapa hal terkait kearifan lokal suku Sasak. Sejak masa lampau etnik Sasak telah mengenal suatu wadah yang menjadi induk dalam kehidupan bermasyarakat mereka yang mengatur pedoman hidup masyarakat serta tempat mencari rujukan untuk menetapkan sanksi atas terjadinya pelanggaran dalam tata pergaulan komunitasnya. Wadah itu dikenal dengan istilah *krama*. Konsepsi ini teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sasak sejak masa lampau.

Nilai-nilai kearifan lokal sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Sasak. Nilai-nilai tersebut sangat cocok diterapkan dalam kehidupan saat ini dan masa depan. Salah satu wujudnya adalah peribahasa dan pepatah sebagai perekat pergaulan masyarakat Sasak. Dalam masyarakat Sasak, peribahasa dan pepatah ini dikenal dengan istilah *sesenggak*. Terkait dengan hal tersebut, berikut disajikan intisarnya dari hasil penelitian Ismail, dkk (2009).

Sesenggak adalah ungkapan bahasa (tradisional) yang berbentuk peribahasa dan pepatah sebagai perekat pergaulan masyarakat Sasak. Dalam ajaran *sesenggak* banyak terkandung ajaran-ajaran dan nilai-nilai tradisional/kearifan tradisional, seperti ajaran tentang ke-Tuhanan, pendidikan, moral, hukum, dan sebagainya. Beberapa contohnya antara lain:

1. *Adeqta/adeqte tao jauq aiq*, supaya kita dapat membawa air, (maknanya bahwa dalam suatu perselisihan atau pertengkaran yang sedang terjadi dan memanas, kita harus mampu menjadi pendingin).
2. *Besual/besiaq cara anak kemidi*, bertengkar cara anak sandiwara atau bertengkar seperti cara pemain sandiwara (maknanya boleh saja kita berselisih pendapat, tetapi tidak boleh menyimpan dendam).

3. *Aiq meneng, tunjung tilah, empaq bau*, air tenang, ikan pun didapat/tertangkap (mengandung makna bahwa dalam mengatasi dan menyelesaikan suatu perselisihan, diupayakan agar suasana tetap tenang, masyarakat tidak panik, lingkungan masyarakat tidak terganggu, masalah atau perselisihan terselesaikan dengan damai).

Berdasarkan uraian di atas, dari masalah *krama* sampai dengan *sesenggak*, Ismail, dkk (2009), menyimpulkan bahwa, “terdapat 10 (sepuluh) unsur atau komponen nilai demokrasi yang tercermin dalam kearifan lokal masyarakat Sasak, yaitu demokrasi ber-Ketuhanan; toleransi; kerja sama dengan orang lain; menghargai pendapat orang lain; memahami dan menerima kultur dalam masyarakat; berpikir kritis dan sistematis; penyelesaian konflik tanpa kekerasan; kemauan mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif; sensitif terhadap kesulitan orang lain; dan kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan sosial”.

Berdasarkan hal itu, kearifan lokal etnik Sasak sejak masa lampau mengandung nilai-nilai yang sangat luhur dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang memiliki relevansi dan makna untuk dijadikan sebagai roh dan nilai-nilai baru di era kekinian. Akan tetapi, dewasa ini nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur orang Sasak itu telah mengalami pergeseran, mengalami kelunturan, dan seakan-akan kehilangan makna sesungguhnya.

Mengingat kearifan lokal/kearifan tradisional suku Sasak sarat dengan nilai-nilai pendidikan yang dapat menjauhkan masyarakatnya dari keinginan curang ataupun korupsi saat mendedikasikan pengabdian diri pribadi untuk kemuliaan orang banyak, penting dipelajari. Penelitian dengan topik kearifan lokal/kearifan tradisional suku Sasak di Lombok dalam kaitannya dengan pendidikan antikorupsi, peneliti pahami sebagai nilai kearifan

bangsa yang patut dikenal dan diapresiasi. Terlebih saat bangsa Indonesia sedang menghadapi teror korupsi yang dilakukan oleh anak bangsanya sendiri.

Berbicara masalah kearifan lokal suku Sasak di Lombok tentunya perlu dipahami bagaimana kearifan lokal menurut suku Sasak itu sendiri. Kearifan lokal adalah perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh suatu komunitas yang berasal dari generasi sebelumnya maupun dari pengalamannya, berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lain untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau kesulitan yang dihadapi. Kearifan lokal suku Sasak tercermin dalam beberapa aspek kehidupan masyarakatnya, seperti kearifan lokal kaitannya dengan sistem kekerabatan, kearifan lokal kaitannya dengan sistem pemerintahan, kearifan lokal kaitannya dengan sistem mata pencaharian, kearifan lokal kaitannya dengan sistem pengetahuan, kearifan lokal kaitannya dengan sistem kesenian, serta kearifan lokal kaitannya dengan sistem religi. Namun demikian, yang menjadi pokok pembahasan peneliti dalam buku ini adalah kearifan lokal terkait dengan pendidikan antikorupsi pada suku Sasak di Lombok.

Korupsi menjadi sebetulnya hegemoni, yakni kekuasaan yang menindas, namun dilihat sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, justru wajar dan bernilai baik. Orang menyuap karena tidak ada jalan lain untuk melakukan pekerjaan selain menyuap. Orang mencuri karena tidak ada jalan lain untuk hidup selain mencuri. Sementara tidak menyuap dan tidak mencuri justru mengembangkan kultur korupsi yang tidak ada sebelumnya. Inilah lingkaran setan korupsi. Pola semacam inilah yang harus kita perangi bersama (Reza A.A. Wattimena, 2012:208).

Tindak pidana korupsi sudah merupakan dan dimasukkan sebagai tindak pidana luar biasa dan secara internasional telah

diakui sebagai salah satu jenis *trans-national organized crime*. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), korbannya adalah masyarakat, bangsa, dan negara (Baharuddin Lopa, 1997: 58). Korupsi tidak lagi sebagai *lokal matter* tetapi sudah menjadi fenomena internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama internasional untuk mencegah secara komprehensif dan multidisipliner. Pencegahan dan pemberantasannya pun harus menggunakan cara yang bersifat luar biasa. Menurut Yudi Kristiana, penyelenggaraan pemerintahan yang korup dapat merusak negara. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperbarui dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, membawa suatu perubahan yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam memberantas korupsi (Romli Atmasasmita, 2004:25).

Pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, namun dunia pendidikan diharapkan dapat berperan dalam pencegahan korupsi sejak dini. Dengan pendidikan antikorupsi, generasi penerus bangsa akan lebih awal memahami masalah korupsi dan tidak melakukan kejahatan ini seperti yang pernah dilakukan generasi sebelumnya. Pendidikan antikorupsi tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga merubah pola pikir. Paradigma serta tingkah laku siswa untuk menerapkan prinsip hidup yang baik. Pendidikan sebagai wadah untuk membentuk generasi penerus bangsa menjadi wadah yang efektif dalam rangka pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum dan memberikan ceramah atau seminar antikorupsi. Agar korupsi di Indonesia tidak terjadi turun-temurun, perlu dicegah mulai dari akar permasalahannya. Membekali siswa dengan pendidikan antikorupsi yang cukup akan

memberikan perlindungan bagi generasi penerus bangsa dari budaya korupsi.

“Korupsi atau *corruptela* (bahasa Yunani), berarti mencuri atau mengambil milik orang lain tanpa izin pemiliknya. “*Corruption*” dalam bahasa Latin berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balikkan, menyogok”. Di ranah pelayanan publik (tata pemerintahan modern), korupsi berarti tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan padanya (Reza A.A. Wattimena, 2012:4). Lebih daripada itu, korupsi sebenarnya menjamah tatanan filsafat, teologi, dan moralitas yang berhubungan dengan “inpuritas moral atau deviasi ideal”, artinya tindakan korupsi menghasilkan setitik noda yang menggores kemurnian jiwa yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam diri manusia. Lalu, bagaimanakah masyarakat memandang korupsi? Penyebab noda hitam moral itu dikenal dengan *panca ‘ma’* yakni *madat* (narkoba), *mamunyah* (mabuk-mabukan), *madon* (*mamitra*: berzinah), *mamotah* (berjudi), *memaling* (mencuri), yang harus dihindari. *Memaling* sebagai “*corruptela*” pada dasarnya berarti mencuri adalah dosa yang harus dihindari.

Sejarah korupsi menunjukkan bahwa sanksi keras bagi koruptor sudah diberlakukan sejak Ratu Shima memerintah Kerajaan Kalingga (pra Majapahit) di Jawa Tengah, 632 Masehi. Seorang Cina bernama I-Tsing mewartakan dalam berita Cina bahwa di Jawa Tengah terdapat kerajaan Holing yang diperintah oleh seorang ratu bernama Shima yang mendidik rakyatnya agar selalu jujur dan menindak keras kejahatan pencurian. Hukuman potong tangan bagi siapa saja yang mencuri. Suatu saat, seorang raja dari seberang mengujinya dengan meletakkan sekantong uang emas di persimpangan jalan dekat pasar. Tak seorangpun rakyat Kalingga berani menyentuh apalagi

mengambil kantong itu. Namun, tiga tahun berselang, kantong itu disentuh oleh putra mahkota Kalingga dengan kakinya. Apa yang terjadi? Demi hukum, Ratu Shima menjatuhkan hukuman mati pada putranya. Akan tetapi, Dewan Menteri memohon agar Ratu Shima mengampuni kesalahan putranya tersebut dengan memotong kaki sang pangeran.

Di Bali, budaya antikorupsi sudah dibangun sejak dahulu. Misalnya di Batur, ada upacara *Matiti Suara* yang merefleksikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kontrol terhadap aturan pelaksanaan sistem upacara. Istilah seperti *maling metimpuh* (pencurinya duduk bersimpuh), sebagai sebutan bagi aparat yang mencuri uang negara dengan cara sangat mudah atau ada juga pantun lokal Bali “*pajeng tetaring, ane ngijeng ane memaling*”. Hal ini mengandaikan betapa mudahnya aparat yang seharusnya menjaga aset negara atau kekayaan masyarakat, justru melakukan pencurian (korupsi). Dengan demikian, kearifan budaya Bali telah mengidentifikasi betapa mudahnya aparat negara melakukan tindakan korupsi.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi sosial masyarakat. Hal ini berarti tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) karena praktik korupsi jelas sangat merugikan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat (Budi Utama, ttt:4). Dalam situasi seperti sekarang ini, masih sangat sulit untuk mengharap para penegak hukum mampu memberantas korupsi karena hukum dikalahkan oleh kekuasaan. Korupsi berkaitan dengan kekuasaan. Penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Benarlah bahwa postulat dalam sosiologi hukum yang menyatakan bahwa di negara berkembang dalam perbenturan antara kekuasaan dan hukum, maka kekuasaanlah yang cenderung menang (Satjipto Rahardjo, 2003:58).

Menurut Prof. Dr. Romli Atmasasmita, memberantas korupsi bukanlah pekerjaan semudah membatat rumput. Memberantas korupsi adalah layaknya mencegah dan menumpas virus suatu penyakit, yaitu penyakit masyarakat. Dalam hal ini diperlukan diagnosis yang tepat agar penyakit tersebut bukan hanya dapat dicegah, namun di kemudian hari tidak akan terjadi lagi (Romli Atmasasmita, 2004:22, dalam Budi Utama (ed) *Pendidikan Antikorupsi Perspektif Agama-Agama*, ttt:4).

Tradisi korupsi tentu tidak diharapkan muncul dalam sebuah bangsa yang mencita-citakan kesejahteraan (*welfare state*). Kesulitan setiap bangsa dalam memberantas korupsi menandakan bahwa tradisi ini bermuara pada mentalitas sebagai struktur psikis budaya (Koentjaraningrat, 2002; Sutrisno, 2008). Korupsi menjadi persoalan mentalitas ketika berbagai produk hukum yang diciptakan tidak mampu mengurangi intensitasnya di suatu negara. Mentalitas ini bermula dari perilaku keseharian, bahkan seringkali telah tertanam dalam keluarga. Perilaku korupsi dapat dimulai dari keluarga, misalnya kebiasaan anak-anak menaikkan (*mark up*) harga barang yang dibeli kepada orang tuanya. Hal sederhana juga sering dilakukan orang tua dalam menanamkan tindakan korupsi, misalnya dengan menyuap anak-anaknya dengan permen agar mereka tidak menangis. Artinya, kejujuran dan karakter antikorupsi sesungguhnya dapat dibangun dari nilai-nilai keseharian yang berkembang dalam keluarga dan masyarakat.

Uraian tersebut menegaskan pentingnya moralitas untuk membangun mentalitas dan karakter bangsa yang antikorupsi. Bangsa Indonesia yang dikenal religius sudah sepatutnya menjadikan pembangunan moralitas dalam skema besar (*grand design*) pemberantasan korupsi. Masalah korupsi yang sedang menyandera bangsa ini harus dicarikan jalan keluar, sesulit apapun

medannya harus ditempuh dan selalu diusahakan. Artinya, kita harus cepat dan cerdas memotong mata rantainya. Jalan yang paling baik adalah kembali ke citra tradisi luhur bangsa. Nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang tumbuh dan lama melekat pada tradisi suku bangsa ini harus diangkat untuk dipelajari dan diapresiasi sebagai warisan luhur bangsa. Oleh karena maksud dan tujuan itulah, penelitian ini mengangkat kearifan lokal masyarakat suku Sasak di Lombok sebagai objek penelitian. Itulah alasan-alasan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga sebagai upaya pelestarian terhadap nilai-nilai luhur kearifan lokal suku Sasak agar terhindar dari kepunahan.

B. Tujuan, Teori, Konsep, dan Metode

1. Tujuan

Tiga hal yang difokuskan dalam penelitian ini antara lain (1) Bagaimana wujud kearifan lokal/kearifan tradisional suku Sasak di Lombok pada masa lalu sampai saat ini? (2) Bentuk kearifan lokal apa saja yang terkait dengan pendidikan antikorupsi pada suku Sasak? (3) Nilai-nilai apa saja yang tercermin dalam kearifan lokal suku Sasak yang dapat dijadikan panutan untuk membenahi tata kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik?

Buku ini semata-mata tidak dibuat hanya sebagai bahan bacaan saja, namun ada tujuan yang ingin dicapai peneliti, antara lain: mendeskripsikan wujud bentuk kearifan lokal masyarakat suku Sasak kaitannya dengan pendidikan antikorupsi; memahami pendidikan antikorupsi kaitannya dengan kearifan lokal suku Sasak; mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi kaitannya dengan kearifan lokal suku Sasak.

Manfaat penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal atau kearifan tradisional suku Sasak. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud melindungi budaya bangsa Indonesia dari gencarnya pengklaiman budaya oleh bangsa luar. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dalam memahami jati diri bangsanya, sehingga masyarakat memiliki pemahaman serta pandangan ke depan untuk menjaga kesatuan dan melindungi budaya bangsa yang diwariskan oleh nenek moyang.

2. Teori

Dalam rangka merancang nilai pendidikan antikorupsi kaitannya dengan kearifan lokal suku Sasak di Lombok, penulis dibantu dengan teori fungsional-struktur dan teori simbol. Teori-teori yang disebutkan ini tidak diterapkan dalam satu kesatuan tetapi digunakan secara eklektik, yaitu teori tertentu mengacu dan mengkaji objek tertentu sesuai dengan kondisi data.

Bronislow Malinowski penganut teori fungsional dalam operasionalitas kerjanya berusaha mencari fungsi atau kegunaan dari setiap unsur dalam kebudayaan suatu masyarakat. Teori fungsionalitas Malinowski menyatakan bahwa tidak ada unsur kebudayaan yang tidak memiliki kegunaan yang cocok dalam rangka kebudayaan secara menyeluruh. Manakala ada unsur kebudayaan yang kehilangan kegunaannya, maka unsur kebudayaan itu akan hilang dengan sendirinya. Pada aspek lain dari kebudayaan dimaksud, akan berkembang terus secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Realitas kebudayaan adalah bersifat universal. Akan tetapi, manifestasinya secara lokal atau regional bersifat khas dan unik.

Pendekatan simbol dari data kearifan lokal suku Sasak di Lombok menggunakan teori simbol. Simbol adalah suatu hal atau keadaan yang mengantar pemahaman terhadap objek (Triguna, 2000:7). Simbol berfungsi untuk membantu pemahaman subjek kepada objek. Dalam makna tertentu, simbol sering memiliki makna sebelumnya, yaitu suatu konsep yang paling bernilai dalam kehidupan suatu masyarakat. Hal itu berarti bahwa simbol memiliki peran ganda, seperti yang dikemukakan oleh Berger Lukman. Untuk menggambarkan suatu fenomena dengan lebih realitas diperlukan pemahaman yang mempertimbangkan kenyataan dari subjektif karena kedua kenyataan itulah yang akan menentukan wujud sebuah realitas. Blumer dalam tesisnya menyatakan bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka (Paloma, 1992:261). Sedangkan Berger menyatakan tentang makna tanpa memperhatikan apa maknanya bagi anggota masyarakat yang bersangkutan.

3. Konsep

Konsep adalah suatu istilah khas yang mengacu pada fenomena tertentu yang bisa bersifat individual dan dapat juga mengacu pada kompleks fenomena (Robert Sibarani, 2012:109). Dari pakar yang lain menyebutkan bahwa konsep adalah penyederhanaan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian. Konsep juga diartikan sebagai hasil abstraksi dan sintesis teori yang dikaitkan dengan masalah penelitian yang dihadapi, di samping untuk menjawab dan memecahkan masalah penelitian. Menurut Ahimsa Putra sebuah teori yang kokoh hanya dapat dibangun jika ilmuwan telah memahami dengan baik konsep-konsep analitis serta mengetahui cara menerapkannya dalam penelitian.

Konsep dalam penelitian ini adalah pengertian dasar secara langsung dengan topik penelitian. Selanjutnya, yang dimaksud dengan konsep dasar dalam penelitian ini adalah sebagai batasan tentang masalah-masalah yang disajikan. Dalam penelitian ini dikemukakan beberapa konsep yang berpedoman pada judul penelitian, yaitu *Kearifan Lokal Kaitannya dengan Pendidikan Antikorupsi pada Suku Sasak di Lombok*.

- **Kearifan Lokal**

Kearifan lokal adalah perilaku positif manusia berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya, dapat bersumber dari nilai agama, adat-istiadat, petuah nenek moyang/budaya setempat yang terbangun secara alamiah dan beradaptasi dengan lingkungan. Menurut Quaritch Wales, kearifan lokal adalah keunggulan kebudayaan lokal maupun kondisi geografis. Ada juga yang menyebutkan bahwa kearifan lokal adalah kebenaran yang mentradisi dan *ajeg* dalam suatu daerah. Merupakan perpaduan firman Tuhan dan nilai-nilai yang ada (Hasil wawancara dengan Dr. I Wayan Wirata sebagai narasumber pada 7 Juli 2014). Menurut Caroline Nyamai-Kisia, kearifan lokal adalah sumber pengetahuan yang diselenggarakan secara dinamis, berkembang, dan diteruskan oleh populasi tertentu yang terintegrasi dengan pemahaman mereka terhadap alam dan budaya sekitarnya. Sedangkan menurut masyarakat Sasak sendiri kearifan lokal suku Sasak tercakup di dalam kearifan lokal dalam bidang seni, mata pencaharian, kepercayaan, pemerintahan, kekerabatan/kebersamaan/persatuan, pengetahuan dan religi. (Hasil wawancara dengan Dr. I Wayan Wirata sebagai narasumber pada 7 Juli 2014).

Foto 1 Wawancara dengan Dr. I Wayan Wirata



(Sumber: Dokumen pribadi)

- **Korupsi**

Korupsi adalah tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri demi keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan wewenang/kesempatan/sarana terhadap kedudukan/jabatan sehingga merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.

- **Pendidikan Antikorupsi**

Pendidikan antikorupsi adalah suatu pembentukan ahklak (kecerdasan/karakter) mausia untuk tidak menyalahgunakan wewenang/kesempatan/sarana demi kepentingan bersama (kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin).

4. Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif yang lebih menekankan pada penggalian, penjelasan, dan pendeskripsian realitas sosial secara mendalam serta interpretatif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian

yang dipakai adalah metode kualitatif dengan beberapa indikator. Penelitian ini juga lebih menekankan pada analisis emik, yaitu yang berorientasi pada pelaku (masyarakat pendukungnya) serta merupakan penerapan teori untuk melihat dari analisis emik.

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, jenis data yang dikumpulkan untuk kepentingan penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data berupa kata-kata, tindakan, kalimat, dan ungkapan. Sebagai pelengkap juga dikumpulkan data kuantitatif berupa angka-angka yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data pada penelitian ini dibedakan atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah jenis data yang digali dari informan melalui wawancara mendalam dan juga melalui proses observasi di lokasi penelitian. Data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen terkait yang telah tersedia untuk kepentingan lain, namun bermanfaat untuk kepentingan penelitian ini. Sumber data sekunder tersebut antara lain dari monografi kabupaten atau desa, profil kabupaten atau desa, Badan Pusat Statistik (BPS) dan dokumen lainnya.

Dalam metode kualitatif informan memegang peranan kunci karena mereka inilah yang menjadi sumber informasi dalam menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, memilih informan yang tepat menjadi hal yang sangat penting. Informan kunci dalam penelitian ini adalah para pemuka masyarakat seperti camat, kepala desa, pimpinan adat, dan masyarakat umum. Mereka dipilih atas pertimbangan bahwa mereka mengetahui informasi secara mendalam tentang pendidikan antikorupsi kaitannya dengan kearifan lokal suku Sasak. Pemilihan informan dilakukan secara purposif, yaitu memilih dengan sengaja orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai terkait dengan permasalahan penelitian.

Dalam penitlian ini, peneliti menggunakan alat (instrumen) berupa pedoman wawancara untuk pengumpulan data. Seperti dikemukakan Nawawi (1992:69) dalam pengumpulan data diperlukan alat (instrumen) yang tepat agar data yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian dapat dikumpulkan secara lengkap.

Menurut Nawawi (1992:74) dalam melakukan observasi munculnya gejala-gejala dalam variabel penelitian harus segera dicatat meskipun dengan cara paling sederhana. Catatan yang paling sederhana adalah berbentuk lembaran-lembaran kertas putih atau sebuah buku catatan. Kemudian, Nawawi (1992:98) mengemukakan pedoman wawancara adalah alat yang dipergunakan dalam komunikasi yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan, yang diajukan oleh pengumpul data sebagai pencari informasi yang dijawab secara lisan pula oleh responden. Lebih lanjut, Nawawi (1992:171) menyebutkan bahwa kartu ikhtisar merupakan instrumen pengumpul data dari bahan dokumentasi. Cara memasukkan dalam laporan penelitian sesuai dengan tata tulis ilmiah, dapat diperlakukan sebagai kutipan tidak langsung.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Penelitian yang bersifat kualitatif artinya menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang secara metodologi lebih banyak melakukan deskripsi analisis. Agar pengumpulan data di lapangan dapat berjalan efektif dan efisien, peneliti juga menggunakan instrumen pelengkap observasi seperti alat pencatat dan alat perekam gambar. Instrumen lain yang sangat penting adalah pedoman wawancara untuk membantu dalam mengarahkan jalannya wawancara.

Adapun metode dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut.

a. **Observasi**

Penelitian ini menggunakan observasi partisipan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung di tempat penelitian. Dengan melakukan perencanaan waktu yang telah ditentukan dalam penelitian merupakan hal yang penting untuk mendapatkan data yang lebih mendalam. Observasi partisipasi akan memungkinkan para peneliti untuk mengamati dan mencatat keadaan atau fenomena sosial, yakni berbagai aktivitas masyarakat dan kejadian sehari-hari atau gejala lainnya yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan serangkaian kegiatan dengan cara berkeliling mengamati setiap fakta yang terdapat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Melalui pengamatan, peneliti dapat mengamati dan mencatat berbagai aktivitas masyarakat dan kejadian sehari-hari, seperti aktivitas mata pencaharian maupun kegiatan yang terkait dengan ritual-ritual adat suku Sasak.

b. **Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan informan sesuai dengan tema dan materi yang relevan. Maksud dilakukan wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi (data) tentang objek penelitian yang memadai secara langsung dari kata-kata, sikap perilaku, dan tindakan informan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam, agar wawancara lebih terarah, disusun pedoman wawancara (*interview guide*) dalam bentuk pertanyaan terbuka.

c. **Perpustakaan**

Selain pengamatan langsung dan wawancara dengan para informan, penelitian ini juga menggunakan dokumentasi, yakni pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis, peraturan-peraturan, surat keputusan, arsip-arsip, serta kepustakaan lainnya. Cara ini dilaksanakan dengan mencari, memahami, kemudian mencatat data yang relevan. Menurut Nawawi, studi dokumen adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah, dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik observasi atau pengamatan, teknik wawancara untuk menggali data primer yang terkait dengan masalah penelitian dan studi dokumen untuk memperoleh data sekunder. Selanjutnya data yang sudah terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Mengikuti pendapat Moleong, pada penelitian kualitatif analisis data dilakukan selama penelitian berlangsung secara deskriptif kualitatif dan interpretatif. Analisis data kualitatif seperti diungkapkan Miles dan Haberman (1992:19) dilakukan melewati tiga langkah sistematis sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data yaitu, (a) reduksi data; (b) penyajian data; (c) penarikan simpulan. Selanjutnya hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan penelitian dan dicetak dalam buku.

BAB II

GAMBARAN UMUM SUKU SASAK LOMBOK

A. Sejarah Suku Sasak Lombok

Dalam sejarah nasional Indonesia, Pulau Lombok memperoleh kedaulatan penuh dari Pemerintah Hindia Belanda tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949. Pada tanggal 14 Agustus 1958, Provinsi Sunda Kecil dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pulau Lombok merupakan pulau kecil yang terletak di antara Pulau Bali dan Sumbawa. Penduduk aslinya terkenal dengan sebutan orang Sasak atau suku Sasak. Hubungan suku Sasak dengan suku bangsa lain menyebabkan pencampuran budaya yang memunculkan keunikan tersendiri. Contoh hubungan antarbudaya yang tampak pada suku Sasak adalah hubungan mereka dengan suku Bali. Beberapa pengaruh dari budaya Bali mewarnai setiap perilaku suku Sasak dalam kehidupan sehari-hari.

Sebelum kedatangan agama Islam di Pulau Lombok, orang-orang Sasak telah memiliki kepercayaan supernatural terhadap roh (animisme) dan kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap gaib (dinamisme). Meskipun pengaruh agama Islam sangat kuat di Lombok, namun masih banyak orang Sasak yang menganut kepercayaan-kepercayaan supernatural tersebut.

Menurut R. Goris kata “Sasak” berasal dari bahasa Sansekerta *Sahsaka*. *Sah* berarti pergi, sementara *Saka* berarti asal atau tempat tinggal. Jadi, *Sahsaka* berarti pergi meninggalkan tanah asal, dan berkumpul di suatu tempat, yaitu di Lombok. Hal ini didasari kebanyakan nenek moyang orang Sasak yang berasal dari tanah Jawa, sebagian dari Bali, Arab, dan Cina yang pindah dari daerahnya untuk tinggal dan menetap di Lombok. Dengan demikian orang Sasak merupakan suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dengan kesatuan sosial lainnya karena memiliki perbedaan kebudayaan dengan suku-suku lainnya di Indonesia.

Suku Sasak adalah suku dari penduduk asli dan kelompok etnik mayoritas yang berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kelompok-kelompok etnik lain yang menetap sampai sekarang di Pulau Lombok antara lain etnik Bali, Sumbawa, Jawa, Arab, dan Cina yang merupakan penduduk pendatang (Budiwanti, 2000: 6).

Selain terbagi dalam etnik-etnik, Pulau Lombok juga terbagi dalam bahasa, kebudayaan, dan keagamaan. Masing-masing kelompok etnik berbicara dengan bahasa mereka sendiri. Orang Sasak mayoritas beragama Islam, orang Bali beragama Hindu, dan orang Cina pada umumnya beragama Kristen.

Suku Sasak mayoritas beragama Islam, namun dalam kesehariannya melaksanakan adat *Wetu Telu*, seperti melakukan pemujaan roh leluhur, berbagai dewa roh, dan lain-lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka cenderung mengabaikan praktik Islam yang rutin dianggap wajib oleh kalangan umat Islam murni (*Waktu Lima*). Pada masyarakat Sasak, adat sangat berperan penting. Akan tetapi, beberapa hal lain terkait dengan praktik keagamaan selalu bertentangan dengan konsep Islam murni. Mereka menyadari aturan-aturan adat tertentu, seperti memberi penghormatan kepada leluhur di kuburan dan memuja

roh yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Masyarakat Sasak memeliharanya sebagai bagian dari tradisi keagamaan. Masyarakat Sasak tidak menggariskan suatu batas yang jelas antara adat dan agama karena adat selalu menyatu dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Berdasarkan tradisi keagamaan, suku Sasak di Lombok dibagi menjadi *Waktu Lima* dan *Wetu Telu*. Dengan demikian, *Waktu Lima* suku Sasak ditandai oleh ketaatan yang tinggi terhadap ajaran-ajaran Islam. Komitmen mereka terhadap *syari'ah* bahkan Al-quran dan Hadist lebih besar dibandingkan *Wetu Telu* suku Sasak. Kegiatan ibadah mereka sehari-hari terwujud dalam ketaatan terhadap lima rukun Islam, yaitu salat lima waktu, puasa Ramadhan, membayar zakat, dan berhaji ke tanah suci Mekkah jika mampu (Budiwanti, 2000:8).

B. Letak dan Keadaan Geografis

Desa Lingsar adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jarak Desa Lingsar dari ibukota kabupaten ± 25 km dan jarak dari ibukota provinsi ± 7 km. Secara administratif batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut.

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Saribaye
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gegalang
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bali Kumbang
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gontoran dan Desa Peteluan Indah

Untuk memperlancar dan mempercepat jalannya roda pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat, pada 2011 atas persetujuan Badan Perwakilan Daerah (BPD) dilakukan pemekaran dusun di wilayah Desa Lingsar. Saat ini desa tersebut terdiri atas 8 dusun definitif, yaitu: Dusun

Lingsar Timur, Dusun Persiapan Taman Lingsar, Dusun Lingsar Barat, Dusun Persiapan Lingsar Tengah, Dusun Lingsar Keling, Dusun Keling, Dusun Persiapan Bebal dan Dusun Oncor.

Luas wilayah Desa Lingsar 335 ha terdiri atas: sawah 138 ha, kebun 24,6 ha, kolam 10,5 ha, pekarangan/permukiman 74,5 ha, tanah pekuburan 2,20 ha, bangunan perkantoran 40 ha, bangunan sekolah 4,30 ha, lapangan sepak bola 1,25 ha, pertokoan/perdagangan 0,30 ha, tempat rekreasi 4 ha, jalan 18 ha dan lain-lain 50 ha. Ditinjau dari letak geografis, Desa Lingsar terdiri dari tanah dataran rendah di kaki Gunung Rinjani dengan ketinggian rata-rata 116 meter dari permukaan laut. Keadaan tanahnya cukup subur sehingga sangat cocok untuk lahan pertanian. Selain tanah yang subur, Desa Lingsar letaknya dekat dengan pusat pemerintahan ibukota provinsi di Mataram dan pusat perdagangan. Desa Lingsar merupakan salah satu desa supplier bahan makanan yang utama bagi dua kota besar di Lombok, yaitu Mataram dan Cakranegara.

Sebagaimana halnya dengan daerah yang berada di dekat kaki gunung, Desa Lingsar merupakan daerah yang udaranya sejuk, curah hujan sangat tinggi sebanyak 134 mm/tahun. Dalam setahun terjadi hujan rata-rata 170 hari. Kondisi alam yang demikian menjadikan Desa Lingsar dikenal dengan hasil buah-buahan yang khas seperti: manggis, rambutan, mangga manis, mangga amblem (asam) khusus sebagai bahan rujak dan dimanfaatkan sebagai bibit induk okulasi/tempelan. Buah-buahan tersebut merupakan kekayaan flora yang berasal dari perkebunan.

Kekayaan hewani di Desa Lingsar terdiri atas binatang-binatang ternak seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, itik dan lain-lain. Semua binatang tersebut hidup sebagai hewan peliharaan yang vital, baik untuk konsumsi maupun dimanfaatkan tenaganya dalam produksi pertanian seperti membajak.

C. Penduduk dan Mata Pencarian

a. Penduduk

Suku Sasak adalah penduduk mayoritas di Desa Lingsar dan merupakan penduduk asli. Sedangkan penduduk pendatang terbanyak adalah suku Bali. Pada umumnya penduduk asli menerima dengan baik penduduk pendatang, baik dari suku bangsa lain ataupun pendatang dari suku bangsa sendiri yang berasal dari desa lain. Penghormatan pada penduduk pendatang lebih baik dibandingkan dengan penduduk asli sendiri sekalipun perbedaan agama yang dianut oleh pendatang menentukan luas tidaknya hubungan di antara mereka.

Penduduk pendatang yang tinggal di Desa Lingsar pada umumnya selalu menunjukkan sikap positif. Pendatang ikut ambil bagian dalam kegiatan sosial, gotong-royong, tolong-menolong dan tidak menunjukkan sikap menghina atau menentang adat-istiadat yang ada. Para pendatang lebih banyak berpartisipasi baik secara kebendaan atau materiil dalam setiap aktivitas di kampung. Hal ini disebabkan jumlah mereka lebih kecil daripada penduduk asli sehingga mereka menyesuaikan diri dengan adat istiadat yang berlaku.

Penduduk Desa Lingsar berdasarkan data profil desa tahun 2013 berjumlah 4.335 jiwa, terdiri dari 2.153 jiwa laki-laki dan 2.182 jiwa perempuan dengan jumlah KK 1.431. Jumlah laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Keadaan penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Lingsar

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	2.153	49,7%
2.	Perempuan	2.182	50,3%
Jumlah		4.335	100%

Sumber: Data Profil Desa Lingsar tahun 2013.

b. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk merupakan suatu aktivitas manusia untuk mempertahankan hidupnya dan bertujuan untuk memperoleh taraf hidup yang layak, di mana corak dan macam kegiatan tersebut tidak sama sesuai dengan kemampuan penduduk serta keadaan daerahnya (Bintarto 1997:127). Komposisi penduduk menurut mata pencaharian sangat berguna untuk memberikan gambaran tentang jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya dari berbagai macam pekerjaan. Mata pencaharian merupakan salah satu faktor yang selalu ada dalam kehidupan manusia sebagai makhluk hidup dan tidak bisa dilepaskan dari penduduk itu sendiri. Di samping itu, secara umum komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat mencerminkan keadaan perekonomian suatu wilayah.

Tingkat kemakmuran warga Desa Lingsar ditinjau dari kondisi rumah sudah cukup baik karena lingkungan permukiman terlihat bersih dan rapi. Hal ini dilihat dari masing-masing rumah tempat tinggal penduduk yang sudah permanen. Bentuk rumah dari arsitektur tradisional berangsur-angsur berubah ke bentuk bahan rumah yang tahan api dan memenuhi syarat kesehatan. Keadaan kesehatan dan kesejahteraan mereka semakin meningkat sehingga memungkinkan warga Desa Lingsar membangun dirinya secara fisik dan spiritual. Demikian juga dari segi sandang dan

pangan. Hal ini dikarenakan warga Desa Lingsar memiliki mata pencaharian yang memadai dan dapat menopang kehidupannya. Dari mata pencaharian hidup tersebut memungkinkan mereka untuk menyediakan berbagai keperluan, baik sandang, papan, maupun perumahan. Keadaan penduduk Desa Lingsar menurut mata pencaharian akan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

NO	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Petani pemilik tanah	92	2,12%
2.	Petani penggarap	120	2,77%
3.	Buruh tani	1.001	23,09%
4.	Peternak	395	9,12%
5.	Pedagang	435	10,05%
6.	Kerajinan tangan	2	0,05%
7.	Pegawai negeri	128	2,95%
8.	Karyawan swasta	646	14,9%
9.	TNI	8	0,18%
10.	Polri	7	0,16%
11.	Dokter	1	0,02%
12.	Perawat/bidan	8	0,18%
13.	Pensiunan	20	0,46%
14.	Wiraswasta	435	10,03%
15.	Buruh serabut/dan lain-lain	1.037	23,92%
Jumlah		4.335	100%

Sumber: Dikutip dan diolah dari data Profil Desa, Desa Lingsar 2013.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Lingsar mempunyai mata pencaharian sebagai petani, baik sebagai pemilik tanah, penggarap, maupun buruh tani. Hal ini

membuktikan bahwa selain desa tersebut merupakan daerah agraris, pertanian memegang peran penting sebagai mata pencaharian utama penduduknya. Desa ini merupakan wilayah persawahan dengan pengairan teknis yang sempurna. Para petani menanam padi dua kali dalam setahun dan satu kali menanam palawija. Ada tiga kategori sebagai petani penggarap, yaitu:

1. *Penyakap*, adalah orang-orang yang turut serta ambil bagian dalam usaha pertanian.
2. *Penggarap*, adalah orang-orang yang ikut bekerja di sawah dengan jalan menyewa atau gadai.
3. *Pengganggu*, adalah buruh musiman yang membantu pada masa menanam, menyang atau musim panen, di mana mereka mendapat bagian upah berupa uang atau hasil panen. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1980/1981).

Selain mata pencaharian di bidang pertanian, mereka meningkatkan usaha penghasilan ekonomi dengan memelihara hewan ternak seperti kerbau, sapi, kambing, dan babi sebagai usaha sampingan.

D. Pendidikan dan Sarana Prasarana

a. Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor sosial yang dapat mempengaruhi tingkat perkembangan suatu masyarakat dalam suatu wilayah. Melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal seseorang akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, seseorang akan memiliki potensi akan kemampuan yang diharapkan dapat

mengembangkan segala sumber daya yang tersedia di dalam desa untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk. Disamping itu, kompetisi menurut pendidikan dapat digunakan sebagai petunjuk yang mencerminkan status sosial dan alternatif pemilihan lapangan kerja, khususnya jenis pekerjaan yang sangat memerlukan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Tingkat pendidikan seseorang dapat dipakai sebagai salah satu tolok ukur kualitas tenaga kerja walaupun harus diakui itu bukan satu-satunya. Keadaan penduduk Desa Lingsar menurut jenjang pendidikan akan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Penduduk Menurut Pendidikan di Desa Lingsar

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak pernah sekolah	359	8,28%
2	Belum sekolah	558	12,87%
3	Tidak tamat SD	596	13,75%
4	SD/Sederajat	449	10,36%
5	Tamat SD/Sederajat	810	18,69%
6	SMP/Sederajat	158	3,64%
7	Tamat SMP/Sederajat	486	11,21%
8	SMA/Sederajat	139	3,21%
9	Tamat SMA/Sederajat	527	12,16%
10	Akademi/PT	106	2,45%
11	Tamat Akademi	147	3,39%
Jumlah		4.335	100%

Sumber: Data Profil Desa Lingsar 2013.

Tingkat pendidikan seseorang dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan rendah mencakup tingkat sekolah dasar dan pendidikan tinggi setingkat lulusan SMA ke atas.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lingsar di bidang pendidikan sudah mulai tumbuh dengan adanya kesadaran mengenai arti dan peranan pendidikan di tengah-tengah kehidupan. Hal ini dibuktikan sudah banyak masyarakat yang menamatkan pendidikan mulai tingkat SD 18,69%; SMP 11,21%; SMA 12,16% dan Perguruan Tinggi 3,39%. Fasilitas pendidikan yang terdapat di Desa Lingsar adalah Pendidikan Usia Dini (Paud) 1 buah, Sekolah Taman Kanak-kanak (STK) 1 buah, Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) 3 buah, Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) 2 buah dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 buah. Bagi masyarakat yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi terdapat di Kota Mataram. Apabila dilihat dari tersedianya sarana pendidikan yang terdapat di desa tersebut, masyarakat Desa Lingsar sangat mengerti akan tujuan pendidikan sehingga dapat dianggap sebagai masyarakat yang keberadaannya sudah maju yang mengenal perkembangan dan pentingnya pendidikan dalam hidup bermasyarakat.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana transportasi di suatu daerah berperan sangat penting dalam menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkaitan dengan pendistribusian barang-barang produksi baik dari produsen ke konsumen maupun dari desa ke kota. Transportasi menentukan perkembangan suatu wilayah atau daerah tertentu.

Sarana dan prasarana transportasi di Desa Lingsar tergolong baik. Para pedagang yang melaksanakan aktivitasnya di pasar dengan berjualan hasil produksi pangan dan buah-buahan pada umumnya menggunakan mobil tambang, pick up, truk dan ada

juga yang menggunakan sepeda motor. Tempat penjualan hasil bumi, peternakan, perikanan, dan pemasaran hasil buah-buahan tumpah ke pasar terdekat seperti Pasar Sweta, Pasar Sindu, Pasar Cakranegara dan Pasar Narmada karena Desa Lingsar belum mempunyai pasar desa dan pasar kecamatan. Jenis prasarana pemasaran di Desa Lingsar terdapat toko 9 buah, kios 150 buah, dan warung 125 buah.

Jenis sarana transportasi di Desa Lingsar antara lain sepeda motor 565 buah, mobil pribadi 30 buah, mobil tambang 5 buah, dan mobil truk/pick up 8 buah. Prasarana perhubungan seperti jalan beberapa di antaranya telah ditingkatkan. Peningkatan jalan diperlukan terutama untuk memperlebar ruas jalan yang ada sehingga lebih memperlancar arus barang dan jasa dari luar desa. Di seluruh desa terdapat jalan beraspal 8 km, jalan diperkeras dengan batu-batu 2,5 km, jalan tanah 13,5 km, jembatan besi 1 buah, jembatan beton 18 buah, dan jembatan deliker 50 buah.

Fasilitas kesehatan yang ada di Desa Lingsar yaitu Pusat Kesehatan Pembantu (Pustu) 1 buah, Poliklinik Desa (Polindes) 7 buah, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 8 buah dan Tempat Praktik Dokter 2 buah. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata diseluruh Desa Lingsar.

E. Latar Belakang Sosial Budaya

a. Sistem Kekerabatan

Suku Sasak pada umumnya yang mendiami Pulau Lombok dan khususnya di Desa Lingsar berpendapat bahwa sebuah keluarga akan terbentuk apabila terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Keluarga yang baru terbentuk

segera akan menempati kediaman baru di rumah suami. Akan tetapi, tempat tinggal bagi keduanya dapat berubah sesuai dengan keadaan dan persetujuan kedua belah pihak. Suami bisa tinggal di rumah pihak keluarga perempuan karena sesuatu hal, seperti anak tunggal, permintaan orang tua, dan sebagainya. Suku Sasak menganut sistem bilateral. Jika ia mempunyai anak dalam perkawinan, anak-anak tersebut adalah anak-anak dari ayah dan ibu dan anaknya mempunyai hubungan kekeluargaan baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Sebuah keluarga kecil atau *batik* dalam bahasa Sasak disebut “Sekuren” dan anggotanya terdiri dari: ayah (*amaq*), ibu (*inaq*) dan anak-anak (*anaq*). Namun, bisa saja terjadi *sekuren* tidak terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tetapi beberapa orang ipar, paman, dan nenek dari salah satu pihak ikut dalam keluarga kecil. Arti kata *sekuren* dalam satu keluarga berarti tanggungan ekonomi. Peran terpenting terletak pada pundak ayah. Ayah bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bertanggung jawab terhadap kesehatan anak-anaknya. Ibu berhak atas pengaturan rumah tangga, berkewajiban melayani suami dan anak-anaknya dalam kebutuhan memasak.

Anak laki-laki yang berkeluarga berkewajiban membantu ayah di sawah seperti menanam padi, mencangkul, menggembalakan ternak atau mencabut rumput. Anak laki-laki yang sudah berkeluarga diberikan tanah garapan oleh orang tuanya yang sebagian hasilnya diserahkan kepada orang tua. Namun, ada juga dinikmati bersama-sama orang tua dan saudara-saudaranya karena bekerja sama dalam aktivitas produksi. Bagian tanah pertanian yang digarap oleh anak laki-laki yang berkeluarga bukan merupakan hak waris tetapi bersifat sementara. Setelah orang tua meninggal dunia, anak laki-laki tersebut berhak atas warisan

orang tuanya dan hidup sebagai keluarga dengan tanggung jawab penuh pada diri sendiri atas ekonomi serta kegiatan sosial lainnya.

b. Sistem Religi

Suku Sasak yang mendiami Desa Lingsar menganut agama Islam. Dalam menjalankan ritual agama Islam dipimpin oleh perangkat agama yang disebut *Pengulu dan Kiai*. Para penganut Islam yang kuat dan taat dalam menjalankan ajaran agamanya tetap melaksanakan salat dan berpuasa pada bulan Ramadhan. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih memegang adat dan menghargai tradisi nenek moyang mereka dengan tetap melengkapi upacara keagamaan dengan kepercayaan sebelumnya. Kegiatan upacara adat (seremonial) tetap dilaksanakan di lingkungan masyarakat seperti upacara *Puja Wali* dan *Perang Tipat*. Acara *Perang Tipat* dilaksanakan setiap tahun di Desa Lingsar. Acara ini dipelopori oleh umat Hindu untuk menghormati hari raya umat Islam. Hal ini menunjukkan salah satu bukti nyata kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Lombok Barat. Upacara tersebut adalah pemberian sesajen serta permohonan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara tradisional. Keadaan penduduk Desa Lingsar menurut agama dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Penduduk Menurut Agama di Desa Lingsar

No.	Agama	Jumlah	Presentase (%)
1.	Islam	4.227	97,51%
2.	Hindu	106	2,45%
3.	Kristen	-	-
4.	Buddha	2	0,04%
	Jumlah	4.335	100 %

Sumber: Profil Desa Lingsar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat, NTB Tahun 2013.

Perbedaan tidaklah menjadi penghalang dalam kehidupan sosial masyarakat termasuk perbedaan agama. Di Desa Lingsar pemeluk agama Islam menjadi mayoritas, namun hal tersebut tidak menimbulkan adanya suatu perbedaan dengan pemeluk agama lain. Keanekaragaman agama yang ada justru memperlerat rasa kebersamaan dan toleransi yang tinggi antarumat beragama. Tabel di atas menunjukkan pemeluk agama Islam merupakan yang terbanyak, yaitu 4.155 orang, agama Hindu 106 orang yang merupakan suku Bali, dan agama Buddha 2 orang.

Fasilitas ibadah di Desa Lingsar antara lain: masjid 8 buah, musholla 24 buah, dan pura 5 buah. Pura-pura tersebut merupakan pura desa yang dibangun sekitar abad ke-18 dan ke-19. Pada masa itu Desa Lingsar masih dalam kekuasaan Kerajaan Mataram Hindu, sehingga tanah-tanahnya dikuasai oleh umat Hindu. Di sana mereka membangun tempat pemujaan (ibadah) di dekat mata air. Dua di antara lima pura tersebut adalah pura Lingsar 1 dan pura Lingsar. Pembangunan pura ini dipelopori oleh Raja Mataram dan Ratu Karang Bayan seorang tuan tanah pada masa itu.

Di Desa Lingsar adanya lima buah pura dan satu buah *kemaliq* banyak menarik pengunjung, baik wisatawan mancanegara maupun domestik, terutama pada saat upacara *Puja Wali* dan *Perang Tipat*. Kehadiran pura di wilayah yang penduduknya mayoritas Islam telah mengajarkan kepada masyarakat toleransi terhadap pemeluk agama lain. Antargolongan agama yang berbeda terdapat kerukunan dan saling menghargai dan menghormati.

Pada zaman primitif kepercayaan terhadap adanya roh halus masih tetap diyakini oleh masyarakat suku Sasak. Kata *animisme* berasal dari kata *anima*, *animae*, dari bahasa Latin. Dalam konsep psikologi dan biologi, kata *animisme* adalah suatu pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa pikiran atau jiwa merupakan

suatu elemen immaterial yang dapat bekerja sama dalam suatu tubuh melalui otak dan sistem syaraf. Sementara itu, dalam filsafat, *animisme* merupakan suatu teori yang dapat menjelaskan bahwa segala objek alam yang bernyawa atau berjiwa serta memiliki spirit dan kehidupan mental serta fisik bersumber dari nyawa, jiwa atau spirit. Selanjutnya *animisme* dalam istilah antropologi adalah kepercayaan bahwa semua benda alam di dunia itu berjiwa (memiliki roh), sehingga akan memiliki kesadaran dan kepribadian. Roh-roh tersebut harus dapat dijaga dan tidak boleh dipermainkan (Abdul, 2006:23).

Manusia yang lahir berasal dari roh yang telah meninggal dunia. Kepercayaan *animisme* ini berkembang di kalangan suku Sasak primitif di Pulau Lombok. Pemujaan terhadap roh nenek moyang berdasarkan atas keyakinan mereka karena dianggap dapat memberikan inspirasi serta motivasi hidup serta memberikan kesejahteraan bagi semua manusia yang hidup di dunia. Mereka memuja roh sebagai sesuatu yang perlu dipuja dan dianggap selalu berhubungan dengan roh-roh nenek moyang yang dipuja seumur hidup. Dengan dasar itulah maka jenazah para leluhur yang telah meninggal dunia pada umumnya dimakamkan tidak jauh dari tempat tinggal mereka atau di kampungnya sendiri dengan maksud agar roh nenek moyang selalu dekat dengan kehidupan mereka.

Roh-roh yang berkeliaran di alam meskipun telah berpisah dengan jasad pemiliknya akan dipanggil dan diharapkan dapat menolong dari musibah atau bencana yang melanda masyarakat. Roh-roh tersebut dapat membantu keluar dari marabahaya yang menimpa keluarga serta dapat memberikan anugerah pada kerabat serta keluarga agar kehidupan mereka sejahtera, aman, tenteram, dan damai. Pada umumnya roh-roh bersemayam di

gunung, perbukitan, mandir, kuil, candi, termasuk pada tubuh manusia yang masih hidup.

Pada dasarnya suku Sasak primitif masih menganggap bahwa di sekeliling tempat hidupnya atau di alam semesta masih tetap ada roh orang yang telah meninggal dunia. Dengan demikian kepercayaan-kepercayaan tersebut selalu tetap menyatu pada kegiatan-kegiatan upacara atau adat istiadat yang berlangsung ketika menghadapi upacara kematian.

Dengan beragamanya agama yang mewarnai masyarakat Lombok, maka diperlukan suatu tempat ibadah dalam rangka memberikan kesempatan untuk menghubungkan umatnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tempat-tempat ibadah tersebut meliputi: masjid, gereja, pura, dan wihara. Adapun banyaknya tempat peribadatan yang ada di Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/ Kota	Masjid	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Wihara	Pura
1.	Lombok Barat	1.458	0	0	32	200
2.	Lombok Tengah	1.149	1	0	0	14
3.	Lombok Timur	1.111	2	1	0	4
4.	Kota Mataram	212	9	2	10	131
	T o t a l	3.930	12	3	42	349

Sumber: Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel di atas menunjukkan bahwa kehidupan beragama di Pulau Lombok memberikan corak serta warna tersendiri pada masyarakatnya. Hal ini ditunjukkan dalam tabel di atas bahwa penganut umat Islam di Pulau Lombok terbanyak yang ditunjukkan

dengan jumlah masjid sebanyak 3.930 buah yang tersebar di kabupaten dan kota. Sebaran terbanyak di Kabupaten Lombok Barat berjumlah 1.458 buah, diikuti Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 1.149 buah, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1.111 buah, dan terendah di Kota Mataram sebanyak 212 buah.

Jumlah total pura sebagai tempat ibadah masyarakat Hindu di Pulau Lombok adalah 349 buah. Sebaran tempat ibadah umat Hindu terbanyak di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 200 buah, kemudian diikuti Kota Mataram sebanyak 131 buah, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 14 buah, dan terendah di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 4 buah.

Untuk wihara sebagai tempat ibadah umat Buddha yang ada di wilayah Pulau Lombok total berjumlah 42 buah. Jumlah terbanyak terdapat di wilayah Kabupaten Lombok Barat sebanyak 32 buah dan 10 buah di Kota Mataram. Sedangkan di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur tidak terdapat wihara.

Total Gereja Protestan di Pulau Lombok berjumlah 12 buah. Jumlah terbanyak terdapat di wilayah Kota Mataram sebanyak 9 buah, diikuti Kabupaten Lombok Timur sebanyak 2 buah, dan Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 1 buah. Sedangkan total untuk Gereja Katolik berjumlah 3 buah yang terdapat di Kota Mataram sebanyak 2 buah dan Kabupaten Lombok Timur 1 buah.

Dengan adanya tempat ibadah yang ada akan berkorelasi dengan jumlah umat beragama yang berdomisili di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tempat ibadah merupakan suatu tempat yang sangat penting untuk keperluan masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama dalam melaksanakan ibadah sebagai rasa bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengetahui jumlah tempat ibadah akan diketahui

sebaran umat yang melaksanakan kewajiban ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Pura Lingsar dan *Kemaliq* merupakan salah satu tempat suci yang berfungsi sebagai wahana umat Hindu dan Islam (*Wetu Telu* Suku Sasak) secara vertikal berhubungan dengan Sang Pencipta. Dalam kenyataannya, Pura Lingsar dan *Kemaliq* digunakan sebagai tempat pemujaan para dewata (Tuhan Yang Maha Esa) yang ada di Lombok yang memberikan anugerah keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan kepada umatnya. Mengingat Pura Lingsar tersebut merupakan salah satu Pura Khayangan dan *Kemaliq* sebagai tempat pemujaan *Wetu Telu* suku Sasak yang ada di Lombok, maka Pura Lingsar dan *Kemaliq* merupakan bagian peninggalan sejarah nenek moyang yang perlu dipelihara serta dilestarikan keberadaannya.

Menurut catatan sejarah kata *Lingsar* berasal dari kata *ling* berarti sabda dan *sar* berarti sah, sehingga *Lingsar* berarti suatu sabda yang sah (jelas). Pura Lingsar merupakan suatu tempat persembahyangan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan negara atas kesungguhan dan kemantapan hati dalam melakukan pemujaan. Persembahyangan yang dilakukan tidak lain bertujuan untuk melakukan suatu permohonan keselamatan serta restu kepada Yang Maha Kuasa, baik secara lahiriah maupun batiniah.

Pada bagian lain di Pura Lingsar terdapat Pura *Kemaliq*. *Kemaliq* berasal dari kata *kamaduk* dalam bahasa Sansekerta yang artinya air kehidupan, sedangkan *maliq* dalam bahasa Sasak berarti keramat atau suci. Dalam keseharian Pura Lingsar tidak hanya dikunjungi oleh Umat Hindu dalam melakukan persembahyangan, tetapi juga umat lain seperti Islam (*Wetu Telu* Suku Sasak), sehingga tempat suci ini merupakan suatu tempat

bagi umat Hindu dan Umat Islam (*Wetu Telu Suku Sasak*) secara bersama-sama melakukan kegiatan ritual.

Dalam memberikan makna kepada benda-benda yang merupakan kegiatan yang secara kolektif dilakukan individu secara bersama-sama dalam berbagai kelompok yang terlibat dalam kegiatan akan memberikan makna realitas. Hal tersebut senada dengan pernyataan Bagus (1996:50) yang menyatakan bahwa makna akan terkait dengan kebudayaan. Kebudayaan hanya menjadi suatu pembeda dan pewujud dari suatu kehidupan manusia. Kebudayaan harus memiliki makna yang lebih dalam kehidupan manusia.

Dalam menghubungkan manusia dengan yang gaib dan keramat salah satunya melalui upacara religi atau ritual. Menurut Van Gennep (dalam Koentjaraningrat, 1987: 74) menyatakan bahwa ritus dan upacara religi secara universal pada dasarnya berfungsi sebagai ritus untuk menimbulkan kembali semangat hidup.

Menurut Kleden bahwa seni ritual akan memiliki makna dan selalu berkaitan dengan kebudayaan. Mengingat seni ritual yang dipersembahkan di Pura Lingsar oleh sebagian anggota suku Sasak memiliki makna-makna dan tujuan tertentu. Untuk memberikan nilai atas kebudayaan tersebut, maka seni perlu diekspresikan melalui dunia simbolik. Pada dasarnya simbol-simbol dapat diproduksi, direproduksi, dan disimpan karena hal tersebut memiliki muatan mental dan kognitif dari suatu kebudayaan baik berupa pengetahuan, kepercayaan, makna dan simbol serta nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat suku Sasak di Kabupaten Lombok Barat.

Dalam seni ritual yang terkait dengan nilai kehidupan pokok suku Sasak di Kabupaten Lombok Barat salah satunya adalah memiliki nilai religius. Nilai-nilai tersebut diungkapkan melalui seni

ritual yang dipersembahkan bersamaan dengan upacara *odalan* di Pura Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Seni ini merupakan suatu cerminan identitas budaya suku Sasak yang sekaligus terkait dengan kegiatan upacara *odalan* di Pura Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Identitas ini akan dipahami sebagai himpunan dari ciri-ciri yang dapat menandai suatu himpunan manusia atau kelompok suku bangsa. Adapun dimensi dari kelompok suku bangsa dapat dibedakan dengan kelompok suku bangsa lain karena budayanya.

Dengan demikian diperlukan suatu dialog antara para tokoh agama untuk meredam konflik antara masyarakat yang menganut keyakinan yang berbeda. Dialog antartokoh agama, tokoh masyarakat diperlukan dalam rangka menetralisasi penafsiran-penafsiran konvensional atas agama maupun nilai-nilai moral. Dalam konteks agama tertuang penyebaran ajaran-ajaran perdamaian, kasih sayang, dan kesejahteraan.

Johanes Volket yang memadukan dua teori bentuk estetis yang objektif dan isi pengalaman yang subjektif dengan mengemukakan ada empat ukuran yang menjadi tanda pengenal dari karya seni yang dianggap memuaskan secara estetis meliputi: a) sebuah karya seni dapat memuaskan bila dapat mengungkapkan keselarasan antara bentuk dengan isi serta sangat menarik menurut perasaan; perenungan kita terhadapnya yang diliputi dengan rasa puas; b) karya seni menunjukkan kekaryaan akan hal-hal yang penting yang menyangkut manusia dan dapat memperbesar kehidupan perasaan kita; c) karya seni membawa manusia masuk ke dunia khayal yang dicita-citakan dan akan dapat membebaskan kita dari ketegangan atau suasana realitas sehari-hari; dan d) karya seni menyajikan suatu kebulatan yang utuh dan mendorong pikiran pada perpaduan mental.

c. Organisasi Pemerintahan Desa

Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan Desa Lingsar disebut Kepala Desa (Pemusungan). Kepala desa adalah pemimpin tertinggi di dalam wilayah desa. Sebagai alat pemerintah pusat atau pemersatu, kepala desa adalah penerus dari kepentingan pemerintah yang lebih tinggi tetapi juga penerus dari kepentingan masyarakat. Kepala desa tetap menghormati aturan-aturan adat yang berlaku dalam setiap desa.

Di Desa Lingsar terjadi beberapa kali pergantian kepala desa. Menurut beberapa orang tokoh tertua di Desa Lingsar pertama kali menjadi pemusungan (kepala desa) bernama *Amaq Sinar*. Adapun nama-nama kepala desa yang pernah menjabat sebagai kepala desa Lingsar adalah sebagai berikut.

1. *Amaq Sinar* berasal dari Lingsar Timur.
2. *Amaq Putra* yang berasal dari Lingsar Timur merupakan keturunan/anak dari *Amaq Sinar*.
3. *Amaq Sapiah* berasal dari Lingsar Timur merupakan saudara misan dari *Amaq Sapiah*.
4. *Datu Mayun* berasal dari Lingsar Barat merupakan mantu daripada *Amaq Sapiah*.
5. *Lalu Rasad* berasal dari Lingsar Barat merupakan keluarga dekat dari *Datu Mayun*.
6. *Mansutha* berasal dari Lingsar Barat merupakan Kepala Desa Lingsar yang keenam (mulai dengan nama Kepala Desa).
7. *Matnur* merupakan Kepala Desa yang ketujuh berasal dari Lingsar Timur merupakan saudara misan dari *Mansutha*.
8. *Mansutha* menjabat sebagai Kepala Desa yang kedelapan.

9. Lalu Arifin yang berasal dari Lingsar Barat terpilih melalui pemilihan. Menjabat sejak 1968 sampai dengan 1971. Oleh karena sesuatu hal Lalu Arifin berhenti dari jabatannya. Kemudian selama $\pm$ selama 1 tahun dijabat oleh Bapak I Made Batu (Camat Narmada) pada waktu itu.
10. I Made Batu.
11. H. L. M. Zaenuddin berasal dari Lingsar Barat yaitu saudara dari L. Arifin. Beliau menjabat selama $\pm$ 17 tahun sejak tahun 1972 sampai dengan 1989.
12. H. L. Achyar Haramain berasal dari Dusun Lingsar Barat merupakan keponakan dari H. L. M. Zaenuddin melalui pemilihan terpilih dengan masa jabatan 8 tahun, yaitu sejak 1989 sampai dengan 1998.
13. Muhamad Amin berasal dari Dusun Lingsar Timur merupakan seorang keturunan dari: Amaq Sinar, Amaq Putra, Amaq Sapih melalui pemilihan pada 21 Oktober 1998 terpilih dalam jabatan Kepala Desa Lingsar yang ke tiga belas dengan masa jabatan 8 tahun sesuai UU. Nomor 5 tahun 1979 dan dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat A/n Gubernur Kepala daerah tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor. 2759 Tahun 1998 tanggal 16 Desember 1998 dan terhitung sejak pelantikan tanggal 17 Desember 1998 (sampai dengan 17 Desember 2006).
14. M. Sawab, Kepala Desa Lingsar saat ini yang mulai menjabat sebagai Kepala Desa yang ke empat belas, sesuai dengan keputusan Bupati dan dilantik pada 13 Maret 2006 dengan proses pemilihan, yang berasal dari Dusun Keroya Desa Lingsar.

Sejak pertama sampai saat ini Desa Lingsar telah dipimpin oleh 14 orang Kepala Desa atau Pemusungan. Dari Amaq Sinar sampai Datu Mayun masih disebut Pemusungan, namun sejak Mansutha menggantikan Datu Mayun sebutan Pemusungan diganti dengan Kepala Desa.

Berdasarkan hitungan lama dari masing-masing Pemusungan/ Kepala Desa memegang jabatan, diperkirakan Desa Lingsar telah terbentuk sekitar tahun 1828 atau lebih kurang 184 tahun yang lalu.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa Lingsar dibantu oleh para perangkat Desa antara lain sebagai berikut.

1. Maelani : Sekretaris Desa
2. Nasrudin : Kaur Pemerintahan
3. Sibawae : Kaur Pembangunan
4. Tirtawati : Kaur Umum
5. RR. Supartini : Kaur Kemasyarakatan
6. Erma Yuningsih : Kaur Keuangan
7. Samsudin : Kaur Trantib

Dalam bidang keagamaan Kepala Desa Lingsar dibantu oleh beberapa Pemimpin Agama di masing-masing dusun di wilayah Desa Lingsar, yaitu penghulu dan kiai antara lain:

1. H. L. M. Achyar : Penghulu Desa Lingsar
2. H. M. Adnan : Kiai Dusun Lingsar Timur
3. Zaenal Abidin : Kiai Dusun Keling
4. Ust. L. Mustajab : Kiai Dusun Lingsar Barat
5. H. Nasarudin : Kiai Dusun Lingsar Tengah
6. Sofyan Abadi : Kiai Dusun Onor
7. Nassrun : Kiai Dusun Lingsar Keling

Demikian juga untuk menertibkan pengaturan air pertanian, Kepala Desa Lingsar dibantu oleh beberapa orang Pekasih Subak disesuaikan dengan jumlah subak yang ada di Desa Lingsar. Mereka yang mengatur pengairan petani dan juga difungsikan oleh pemerintah atasan untuk membantu dalam penarikan/penagihan PBB pada petani yang ada di wilayah subaknya. Dan para Pekasih ini merupakan Tenaga Teknis pada lembaga P3A Daerah Irigasi Nyurbaye. Pekasih daerah ini dijabat oleh Bapak Suhaili (Pekasih Subak Nyurbaye II).

Dalam hal perencanaan pembangunan di Desa Lingsar telah terbentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang beranggotakan 35 orang yang membawahi beberapa Lembaga yang ada di Desa seperti:

1. Lembaga adat yaitu Gerasak Lingsar
2. Kelompok Kesenian antara lain:
 - a. Batek Baris Lingsar
 - b. Gendang Beleq Lingsar
 - c. Qasidah Lingsar Timur
 - d. Qasidah Lingsar Barat
 - e. Cilokak Lingsar Keling
 - f. Qasidah Lingsar Keling
 - g. Cilokak Dusun Onor
 - h. Kecimol Dusun Onor
3. Kelompok Olahraga
4. Kelompok Kematian
5. Kelompok Zikir Zaman
6. Majelis Ta'lim
7. Sapa'ah
8. Kelompok Merarik

9. Kelompok Hiziban
10. Kelompok Sadar Wisata
11. Kelompok-kelompok Usaha

Dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga dan pembinaan anak remaja telah terbentuk TP-Penggerak PKK Desa yang beranggotakan 35 orang dan di tiap dusun dibentuk kelompok-kelompok PKK. Di dusun sedang diadakan pembinaan kader, yaitu Kader Posyandu sebanyak 40 orang dengan masing-masing dusun 5 orang dan Kader Dasa Wisma sebanyak 149 orang.

Dalam hal Keamanan dan Ketertiban masyarakat, telah ada di Desa Lingsar beberapa Kelompok Pamswakarsa, antara lain:

1. Pamswakarsa Amphibi
2. Pamswakarsa Hizbullah
3. Pamswakarsa Hamzanwadi
4. Pamswakarsa Beriuk Maju
5. Pamswakarsa Lintas Batas

BAB III

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SUKU SASAK DI LOMBOK

A. Ragam Kearifan Lokal Suku Sasak di Lombok

Membahas tentang kearifan lokal tidak bisa lepas dari pemaparan kebudayaan. Oleh karena kearifan lokal sendiri merupakan salah satu unsur dari budaya. Supaya mendapat pengertian yang lebih dalam, perlu adanya pendefinisian kebudayaan. Clifford Geertz menyatakan bahwa kebudayaan itu merupakan pola dari pengertian-pengertian atau makna-makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol dan ditransmisikan secara historis (Geertz, 1993). Lebih lanjut Geertz juga mengatakan kebudayaan itu merupakan sistem mengenai konsepsi-konsepsi yang diwariskan dalam bentuk simbol yang dengan cara ini manusia dapat berkomunikasi, melestarikan, dan mengembangkan pengetahuan dan sikap terhadap kehidupan. Kearifan lokal (*lokal wisdom*) merupakan bagian dari inti budaya. Kearifan lokal berada dan hidup di tengah-tengah aktivitas masyarakat. Setiap masyarakat atau komunitas budaya memiliki kearifan-kearifan yang terkadang tersembunyi di balik mitos-mitos dan legenda ataupun dongeng (cerita rakyat). Tidak hanya itu bisa

saja terdapat dalam ilmu pengetahuan tradisional yang dituturkan secara lisan dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Di samping itu, kearifan lokal juga sering diungkapkan lewat sastra-sastra yang terkandung dalam karya yang dibuat oleh para tetua dahulu untuk tujuan agar para pembacanya dapat menghayati budaya luhur yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Peran budaya dalam hal ini adalah memberikan suatu dasar melalui nilai-nilai budaya sebagai pedoman dalam berperilaku di tengah pergaulan masyarakat. Secara praktis, kearifan lokal dapat diterjemahkan sebagai pola yang dapat digunakan untuk menjaga kaidah-kaidah yang berlaku di dalam pendukung kebudayaan itu, dalam konteks ini adalah kebudayaan suku Sasak.

Menurut Sutan Takdir Alisjahbana (1985), mengatakan bahwa kebudayaan adalah penjelmaan budi manusia, lebih spesifik lagi kebudayaan adalah penjelmaan nilai-nilai. Dengan bercermin dari definisi tersebut maka kearifan lokal merupakan salah satu bentuk nilai yang tercermin dalam sebuah kebudayaan. Untuk lebih memberi pengertian tentang nilai ada baiknya juga melakukan semacam klasifikasi terhadap nilai-nilai. Edward Spranger dalam Alisjahbana (1985) menyebutkan ada enam nilai, yaitu: nilai teori yang menentukan identitas sesuatu, nilai ekonomi yang berupa utilitas atau kegunaan, nilai agama yang berbentuk *das Heilige* atau kekudusan, nilai seni yang menjelmakan *expressiveness* atau keekspresian, nilai kuasa atau politik dan nilai solidaritas yang menjelma dalam cinta, persahabatan, gotong-royong, dan lain-lain.

Dengan mengacu pada nilai apa yang terklasifikasi di atas, maka kearifan lokal dapat dipandang sebagai suatu nilai yang dapat saja berfungsi sebagian atau keseluruhan nilai yang disebutkan di atas. Nilai yang tertanam dalam kearifan lokal

sangat bergantung dari upaya pendukung kebudayaan tersebut mengoperasionalkan nilai-nilai yang dapat digunakan. Dengan mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dapat menjadi suatu pedoman untuk dapat memberikan penguatan identitas seperti yang dikatakan sebagai teori nilai.

Setiap komunitas budaya memiliki suatu pola tersendiri dalam menjaga eksistensi budayanya. Begitu juga pada masyarakat Sasak yang memiliki suatu pola dan cara tersendiri dalam menjaga eksistensi budaya Sasak. Budaya dalam hal ini cakupannya sangatlah luas seperti apa yang dikatakan oleh ahli-ahli budaya, yakni Tylor dalam Alfian (1985:154), mengemukakan bahwa kebudayaan adalah suatu pengertian yang menyeluruh dan kompleks yang tercakup dalam pengetahuan (*knowledge*), kepercayaan, seni, hukum, moral, adat/tradisi, kapabilitas, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang dimiliki seseorang sebagai anggota suatu masyarakat. Dengan pengertian yang amat luas tersebut dapat dijadikan gambaran bahwa keseluruhan dari pengetahuan dan karya manusia menjadi suatu budaya. Namun, untuk mendapatkan kerangka yang lebih khusus, Prof. Dr. Koentjaraningrat mengklasifikasi budaya menjadi tiga wujud yakni: 1) wujud budaya dalam bentuk ide, nilai-nilai, gagasan; 2) sistem sosial atau juga sering disebut *social system*, mengenai tindakan berpola dari manusia itu sendiri; 3) wujud kebudayaan yang berupa fisik (artefak). Wujud ini merupakan yang paling konkrit (Koentjaraningrat, 1900:186).

Dengan mengacu pada tiga wujud kebudayaan itu, kearifan lokal berada pada sistem nilai karena berada pada pengetahuan ide atau gagasan yang diejawantahkan dalam praktik-praktik kemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Alisjahbana dan Koentjaraningrat, bahwa pengetahuan yang

berupa gagasan seperti kearifan lokal merupakan sistem yang berada pada inti budaya itu sendiri.

Sebagai suatu konsep yang operasional diperlukan untuk melihat secara lebih konkrit mengenai kearifan lokal tersebut. Dapat dikatakan bahwa kearifan lokal dilihat dalam fungsinya jelas kearifan lokal itu tampak berada pada sesuatu yang bersifat laten dan bersifat manifes. Dalam konsep yang laten kearifan lokal cenderung berada pada tataran yang sangat abstrak dan perlu diterjemahkan ke dalam interpretasi yang perlu penjabaran dan penjelasan mengenai sistem nilai yang berada di dalam kearifan lokal itu. Sedangkan dalam sifatnya yang manifes tentu kearifan lokal itu sudah dinyatakan secara terbuka dan mudah untuk dimengerti oleh siapa saja dan penjelasan mengenai sistem nilai yang dibuat telah diketahui secara nyata.

Kearifan lokal yang bersifat laten inilah yang banyak dan perlu adanya penerjemahan secara objektif dan perlu penggalian informasi mengenai sistem nilai yang tersembunyi di balik wacana kearifan lokal tersebut. Lombok dalam hal ini suku Sasak banyak sekali menyimpan kearifan-kearifan lokal yang perlu digali dan setidaknya dapat menjadi cara untuk memfilter keadaan global yang tidak sesuai dengan keberadaan budaya Sasak yang adiluhung. Kearifan lokal ini penting digunakan untuk dijadikan identitas budaya sehingga secara tidak langsung juga menjaga dan melestarikannya, tidak hanya budaya tetapi lebih dari itu juga lingkungan dan yang lainnya.

Dalam mempelajari kearifan lokal diperlukan pemahaman secara holistik dan integratif tentang budaya. Secara umum budaya diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia yang dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakatnya. Jadi, budaya lokal adalah suatu sistem atau

cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh masyarakat (daerah) dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya lokal ini terbentuk dari berbagai unsur, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Hal tersebut akan menjadi suatu keunggulan komparatif yang digunakan masyarakat sebagai modal sosial dan identitas untuk mengetahui jati diri kelokalan yang sering disebut dengan istilah kearifan lokal.

Kearifan lokal merupakan seperangkat ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (lokal) yang disepakati secara bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam secara turun-menurun dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1) mampu bertahan terhadap budaya luar; 2) memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar; 3) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli; 4) mempunyai kemampuan mengendalikan; 5) mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Pulau Lombok sebagai salah satu wilayah memiliki tradisi budaya yang banyak memiliki adat istiadat dan kebiasaan dari warisan leluhur. Adat istiadat yang telah disepakati merupakan peninggalan sejarah leluhur yang patut dilestarikan kepada generasi berikutnya untuk tetap dipertahankan dan dilestarikan. Dengan kearifan lokal adalah hal yang saling berkaitan satu sama lain saling terintegrasi sebagai jalan untuk penerus eksistensi budaya daerah dan kecintaan.

Generasi penerus diharapkan dapat melestarikan budaya daerah yang ada dan menumbuhkan kecintaan serta kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya daerahnya. Tradisi dan khasanah budaya daerah akan tetap ada dan kejayaan di masa lalu

menjadi sejarah tersendiri yang bisa dibanggakan oleh generasi berikutnya.

Kearifan lokal masyarakat suku Sasak dari dulu sampai sekarang ditinjau dari tradisi adat istiadatnya adalah sebagai berikut.

1. Adat *Urip* (Adat Hidup)

Dalam proses kehidupan, manusia selalu mengalami suatu siklus dari kelahiran sampai dengan kematian. Dari sejak lahir selalu dilakukan upacara syukuran atau selamatannya agar memperoleh suatu kekuatan jasmani maupun rohani. Kekuatan-kekuatan yang diberikan tidak terlepas dari suatu keyakinan serta kepercayaan yang dilatarbelakangi oleh adat istiadat masyarakat melalui konsensus bersama. Bentuk dan jenis upacara yang dilaksanakan bergantung pada kepercayaan dan keyakinan masyarakat untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan serta tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur. Pada masyarakat suku Sasak, umumnya melakukan upacara adat yang berkaitan dengan hidup adalah: a) Upacara *Buang Awu* (*memedak*); b) Upacara *Mekombong*; c) Upacara *Ngursiang*; d) Upacara *Nyutanang* (khitanan); dan d) Upacara Perkawinan.

2. Adat *Gama*

a. Upacara Perang Topat

Upacara perang topat dilakukan terkait dengan kegiatan upacara Pujawali di Pura Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini sebagai indikasi bahwa adanya suatu fenomena unik yang perlu dan menarik untuk dikaji serta dianalisis. Dalam waktu yang bersamaan dua suku bangsa yang berbeda kepercayaan dan agama melakukan seni ritual dengan berbalas-

balasan melempar ketupat. Upacara tersebut dilaksanakan terkait dengan kegiatan upacara Pujawali Pura Lingsar di Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan pada *Purnamaning Sasih Keenam* (saat bulan penuh) menurut penanggalan Bali.

Bersamaan dengan kegiatan seni ritual perang *topat*, bahwa perang yang dilakukan dengan saling melempar *topat*/ketupat, merebut, kemudian diambil oleh kedua belah pihak hingga selanjutnya dapat ditebarkan ke sawah, kebun, atau tempat berjualan. Hal ini dilakukan karena mereka memiliki keyakinan bahwa *topat* yang dipungut atau diterima pada akhirnya membawa berkah keuntungan atau kemakmuran baginya.

Perang *Topat* sebagai suatu yang memiliki makna simbolis dalam rangka membawa masyarakat suku Sasak dan Hindu keluar dari krisis, baik kaitannya dengan ketidakberdayaan dalam menghadapi kondisi alam, seperti kemarau panjang, hujan yang berlebihan, maupun krisis lainnya, sehingga kegiatan ritual yang dilakukan sebagai wujud kepercayaan yang mendalam kepada Allah (Tuhan Yang Maha Esa) tetap dipertahankan keberadaannya sampai sekarang.

Fungsi Perang *Topat* terkait dengan kegiatan ritual di Pura Lingsar adalah sebagai suatu permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tanaman yang mereka budidayakan dapat tumbuh subur serta terhindar dari berbagai mala petaka seperti wabah penyakit serta tanaman yang dikelola dapat berproduksi melimpah.

Selain Perang *Topat* memiliki fungsi, bahwa dengan seni ritual tersebut memiliki makna antara lain: 1) sebagai wahana dalam meningkatkan solidaritas komunal; 2) wahana meningkatkan toleransi kerjasama antarumat beragama; dan 3)

wahana meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan kepariwisataan.

b. Upacara Adat *Gama*

Upacara Adat *Gama* pada dasarnya dilaksanakan di tempat ibadah, yaitu masjid maupun makam. Upacara ini bertujuan untuk menyeimbangkan atau melestarikan kehidupan manusia menuju kesejahteraan lahir batin. Upacara Adat *Gama* pada umumnya meliputi upacara kegiatan berikut. 1) Upacara Tahun Alif; 2) Upacara Tilawat; 3) Upacara Lohor Jumat; 4) Upacara Mauludan; dan 5). Upacara Lebaran

c. Adat *Lwir Gama*

Disadari atau tidak, diterima atau dibantah, bagi masyarakat suku Sasak suatu fakta yang tidak mungkin dipungkiri adalah telah banyak di kalangan masyarakat yang kurang memahami bahkan tidak mengerti hukum adatnya secara substansial, tetapi suatu fakta yang tidak dapat dibantah pula bahwa tidak ada satupun di antara mereka yang tidak marah apabila dikatakan “tidak tahu adat”. Menurut hemat saya, kenyataan ini dapat dijadikan sebagai alasan bahwa bagi masyarakat suku Sasak pemahaman mereka tentang “adat” adalah bagian yang integral dari pemahaman mereka tentang kewajiban “berakhlak mulia” (*ahlaqul karimah*) sesuai ajaran agama yang dianutnya. Pada zaman dahulu dan di kalangan tertentu pada masa sekarang ini, mereka yang telah dewasa umumnya mengetahui nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang berupa norma-norma hukum adat yang berlaku. Pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai tersebut diajarkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hal ini merupakan suatu bagian pokok dari proses sosialisasi yang kemudian melembaga dan membudaya dalam kehidupan

masyarakat Sasak. Tradisi baik yang pada masa sekarang hampir dilupakan adalah adanya suatu proses pembelajaran tentang hukum adat yang terjadi sejak kecil. Misalnya, pada masa bayi dan kanak-kanak ketika dininabobokan dengan lagu-lagu (berisi bait-bait pantun yang disebut “lelakak”) yang didalamnya “penuh dengan nilai-nilai kearifan”. Contoh lain, di waktu-waktu senggang, para orang tua tidak segan menghibur anak-anaknya dengan cerita-cerita rakyat yang dalam bahasa Sasak disebut “waran” atau “tuaran” yang biasanya berisi keteladanan orang-orang terdahulu (bisa individu di antara para leluhur). Metode pembelajaran seperti ini memiliki keunggulan, yaitu dapat menciptakan perilaku yang terpola sebagai ekspresi dari penjiwaan nilai-nilai kearifan. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Moh. Koesnoe yang mengatakan bahwa “.... yang ingin dicapai setiap orang menurut filsafat adat ialah tercapainya derajat dan martabat keluhuran sebagai manusia. Dari itu menurut filsafat hidup adat, seorang manusia dalam hidupnya harus mengusahakan dirinya menjadi seorang yang berbudi luhur dengan tahu malu yang tinggi”. Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa pengamalan nilai-nilai kearifan yang terkandung dalam adat pada hakikatnya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang mengatakan *al-ma’ruf urfan ka al-masyrut syartan* (yang baik itu menjadi kebiasaan, sama halnya dengan yang disyaratkan itu menjadi syarat) dan di dalam kitab *al-qawa’id al-fiqhiyyah* didapati beberapa kaidah yang berkaitan dengan masalah adat atau urf ini. Salah satu kaidah itu adalah *la yunkar tagayyur al-hukm bi tagayyur al-amkan wa al-azman* (tidak diingkari perbedaan hukum disebabkan perbedaan tempat dan masa)”. Ketentuan dalam kaidah fiqih ini sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Indonesia (termasuk adat Sasak) sebagai

salah satu sistem hukum positif yang berciri dinamis, plastis, konkrit, dan lokal (Iman Sudiyat, 1981).

- **Prinsip-Prinsip Pengamalan Adat Sasak**

Suku Sasak di Lombok mengenal satuan komunitas dari tingkat yang terkecil yang disebut “kuren” (Jawa: batih), di sinilah proses pembelajaran dan pewarisan tata nilai kearifan mulai berlangsung. Selanjutnya pengamalan tata nilai itu terus berlaku dan bahkan mewujudkan ciri khas sebagai karakter sebuah komunitas yang lebih besar yang di kalangan masyarakat Sasak dikenal dengan istilah “kadang” (kerabat). Selanjutnya dalam lingkup yang terluas dari satuan masyarakat yang terluas yaitu suku bangsa, dapat ditaati sebagai hukum yang hidup dalam perilaku berinteraksi.

Untuk dapat memahami hukum adat secara lebih mendalam (dalam hal ini adat Sasak), maka haruslah diketahui dan dimengerti makna dari setiap perangkat simbolnya. Perangkat simbol yang bermakna ini dapat ditemui dalam berbagai sumber, seperti ungkapan dalam komunikasi sehari-hari, interaksi dan transaksi-transaksi adat, bait-bait pantun yang disebut “lélakaq” atau “lawas”, petuah para orang tua (Sasak: pengelingsir) yang disebut “perteke”, dongeng-dongeng tradisional yang disebut “waran” atau “tuaran”, perumpamaan-perumpamaan yang disebut “sesenggak”. Selain itu ada juga sumber-sumber tertulis seperti naskah-naskah kuno (lontar, babad) dll. Salah satu naskah (sumber tertulis) yang sangat perlu diketahui dan dibaca adalah “Naskah Lontar Kotaragama” yang berisi nilai-nilai luhur dan ajaran-ajaran tentang jati diri. Kotaragama terdiri dari dua kata yaitu kotara dan gama. Kotara berarti wilayah dan gama berarti aturan atau hukum. Jadi, Kotaragama berarti aturan atau hukum yang berlaku di suatu wilayah.

Satu kutipan penting yang menunjukkan bagaimana teguhnya Raja Selaparang yang berkuasa saat (sekitar awal 1600 M) terhadap ajaran agama, adalah:

Puniki mawasta Kotaragama, dana puniki caritanira sang prabu hing Surya Alam, maramaning cinarita, dening sinungan kagungan dening Allah, pan tannana sasamaning ratu, dening hakeh hadilira hing bala, tannana kibirira hing Allah, nitya saha nora kena sariranira, yen rerenan nitya saha tilawatil Qur'an (Kitab ini bernama Kotaragama, dan inilah cerita sang raja Surya Alam. Raja yang adil dan bijaksana, tidak sombong dan takabbur kepada Allah, dan senantiasa berdoa semoga dirinya tidak terkena aib dan apabila istirahat sang raja selalu membaca Al-Qur'an) (Fauzan, 2011).

Dari kutipan di atas tidak mengherankan kemudian timbul istilah yang mengatakan adat luwir gama, adat yang bersendikan agama. Selanjutnya melalui sumber-sumber tersebut dapat dikemukakan beberapa prinsip dalam pengamalan hukum adat Sasak yang terkandung dalam beberapa ungkapan simbolik yang kaya nilai-nilai agama dan nilai-nilai kearifan.

- **Prinsip Kejujuran Dan Kesetiaan Memegang Janji**

Ada suatu ungkapan yang sangat sering kita dengar sederhana tetapi syarat makna yakni *alwa'du dayinun*. Beberapa hadist Rasul juga mengingatkan kita untuk tidak melakukan kebohongan karena dengan membuat satu kebohongan maka kita harus melakukan kebohongan baru untuk menutupinya. Sifat tersebut di dalam Kotaragama disimbolkan dengan kata "*danta*" (gading gajah), "*danti*" (ludah), "*kusuma*" (bunga), "*warsa*" (hujan), artinya: setiap kata-kata yang diucapkan atau janji-janji yang diikrarkan wajib dipegang dan dipertahankan dengan kukuh bagaikan

gading gajah yang apabila telah keluar tidak akan masuk lagi, jika berludah tidak akan dijilat kembali, bagaikan bunga yang tidak akan mekar dua kali dan hujan jika telah turun tidak akan kembali naik. Sehubungan dengan ungkapan tersebut, sebuah *sesenggak* dalam bahasa Sasak mengatakan: *sampi betali isiq pepit, manuse betali isik raos*, artinya sapi diikat dengan seutas tali, sedangkan manusia diikat dengan kata-katanya.

• Prinsip-Prinsip Dalam Kepemimpinan

Kotaragama mengatur bermacam-macam sifat terpuji, antara lain rakyat tidak boleh "*nganut*" (sekehendak hati), "*sadu*" (mengambil hak orang lain), "*tahu*" (bersifat mendua), "*kawanten*" (menyebarkan aib pimpinan), "*jahil*" (memfitnah pemimpin). Sedangkan setiap pemimpin terhadap rakyat haruslah bersifat seperti: "*giri suci*" (bagaikan sebuah gunung yang suci dan anggun), "*surya*" (matahari yang menerangi orang sebumi), "*sasangka*" (bulan yang bersinar lembut dan tidak dinyalakan), "*jaladri*" (bagaikan laut, menampung segala aspirasi), "*bahni pawaka*" (bagaikan api, tidak gentar menghadapi kezaliman), "*nilatadu*" (bagaikan langit, tetap pada keagungan). Ungkapan simbolik dalam *sesenggak* Sasak mengatakan *embe aning jarum, ito aning benang atau embe lain jait ito lain benang* = ke mana arah jarum ke situ arah benang (rakyat taat kepada pemimpin yang adil), *pancing udang lain dait pancing tune atau mancing ikan lain dit mancing tuna* = pancing udang, berbeda dengan pancing ikan tuna (pendekatan terhadap orang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan watak dan keadaannya), *tumpu mandi isiq penyadu* = obat mujarab adalah kepercayaan (pemimpin harus mendapat kepercayaan dari rakyatnya).

Dalam hal ini tergambar jelas dalam konsep kepemimpinan yang diterapkan melalui salat berjamaah. Ketika imam melakukan

gerakan salat maka makmum terus mengikutinya, jika imam salah makmum punya cara untuk menegurnya dan jika imam batal makmum punya cara untuk menggantikannya.

- **Prinsip-Prinsip Dalam Menegakkan Ajaran Agama**

Pengamalan hukum adat Sasak pada hakikatnya menghendaki setiap orang untuk selalu menjaga hubungan yang harmonis baik antas sesama, hubungan dengan alam sekitar, semuanya harus dijalani dengan mengharapkan ridho dari Allah Swt., Tuhan semesta alam. Hal ini tercermin dalam ungkapan-ungkapan antara lain: *Adat luwir gama* = adat bergantung kepada agama, *Agama beteken lan betakaq adat* = agama bertiang dan berwadah adat (adat istiadat yang berlaku harus berfungsi menegakkan dan mensucikan agama), *nendek ita ngan barak api* = jangan kita makan bara api (larangan untuk memakan riba), *pacu-pacutan munik akherat* = rajin-rajin mencetak akhirat (bersungguh-sungguh berbuat kebajikan) dan lain-lain, *turne gantar* = jalan lurus lagi pula lebar (kesejahteraan dan ketenteraman hidup karena menuruti ajaran agama).

- **Prinsip-Prinsip Kebersamaan dan Gotong Royong**

Adat Sasak sangat menjunjung tinggi kebersamaan dalam menjalani kehidupannya, baik di lingkungan keluarga, kerabat, dan di lingkungan yang lebih luas. Rasa kebersamaan diharapkan selalu menjiwai setiap individu dalam menjalani kehidupan bersama yang dalam aplikasinya antara lain tercermin dalam wujud kerja sama tanpa pamrih yang disebut gotong royong. Nilai kebersamaan dan gotong royong ini tercermin dalam berbagai ungkapan yang mengandung kearifan antara lain: *Sorong jukung leq segara, bareng onyak bareng lenge* = dorong perahu di laut, bersama-sama baik bersama-sama buruk (jalankan hidup

senasib dan sepenanggungan), sifat anak ikan, bisa menyatukan diri (perselisihan dan perbantahan harus dihindari), ungkapan-ungkapan yang mengandung nilai kearifan dalam *lelakaq* Sasak seperti “*beriuk*”, *beriuk tinjal* = serempak/selangkah/seayun dalam bekerja, *reme* = solidaritas dalam bekerja sama, *siru* = saling berbalas dengan kebaikan *ta’aawanu ‘alalbirri wattaqwa wala ta’aawanu ‘alal ismi wal ‘udwan*.

● **Prinsip Persamaan dan Kebersamaan Hak**

Persamaan hak mengandung arti harkat kemanusiaan setiap orang harus dihargai dalam wujud mengakui, menghormati, dan menjalankan hak-hak yang dimilikinya. Hak-hak yang dimiliki, pada hakikatnya adalah titipan dari Sang Maha Pencipta (Allah Swt.). Oleh karena itu, setiap orang berupaya agar hak yang dimilikinya (terutama hak kebendaan) harus dapat dinikmati orang lain. Prinsip ini terlihat pada berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini penulis memberikan contoh dalam pengamalan Hukum Adat Waris yang dikenal memiliki nilai-nilai kearifan antara lain: harta warisan yang disebut “pusaka” disimbolkan sebagai *balung igan bapug baloq* = tulang rusuk nenek moyang (harta warisan itu meskipun “terbagi”, pada hakikatnya tetap dianggap “tidak terpisah”, dalam arti tetap dipandang sebagai “alat pemersatu” di kalangan para ahli waris). Harta warisan yang belum dibagi disebut *dowe tengaq* = harta tengah (mengandung arti “hak dan kewajiban para ahli waris terhadap harta warisan adalah seimbang” artinya nilai warisan yang diterima ahli waris sebanding dengan tanggung jawab/kewajiban yang melekat padanya. Harta warisan (pusaka) yang sudah terbagi tetap dipandang tidak terpisah, tercermin dalam ungkapan/istilah *dowe sopoq* = harta yang satu (prinsipnya tetap saling terbuka untuk dinikmati bersama, dan setiap ahli waris tidak

bebas untuk memeralihkannya kepada orang di luar ahli waris). Jual beli dalam lingkungan keluarga dan kerabat tidak dilarang, tetapi fungsi harta warisan yang menjadi objek transaksi tetap sebagai media pemersatu, tidak boleh diabaikan. Hal ini tercermin dalam ungkapan *nemu syarat kepeng* = menerima warisan dengan syarat uang (dalam hal ini tidak dipergunakan istilah beli. Hal ini mengandung makna untuk tidak menghilangkan mata rantai pewarisannya). Dalam memiliki harta benda tidak boleh riak dan sombong karena harta yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah (*dowen Neneq*). Dalam pergaulan kemasyarakatan, orang Sasak tidak boleh menunjukkan keakuannya atas harta bendanya. Hal ini tercermin dalam ungkapan *dowen pelungguh saq leq tiang, bijan epe/bije plungguh* (padahal yang dimaksud adalah anaknya sendiri, *ipar epe* (istri)).

- **Prinsip-Prinsip Kemanusiaan**

Martabat setiap orang harus dihargai (dijunjung tinggi) dalam arti setiap orang dijamin haknya untuk berkompetisi demi meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaannya. Hal ini tercermin dalam ungkapan *lelakaq Sasak kaoq mondong jagung, sai tao jari agung* = kerbau memikul jagung, siapa bisa jadi terhormat (tanpa melihat asal usul dan simbol-simbol martabat individual, setiap orang boleh/punya hak yang sama untuk meraih sukses). *Ulah mandi isiq bisana* = ular bertuah oleh/karena bisanya/racunnya (seseorang itu berharga atau berguna karena ilmunya).

- **Prinsip-Prinsip dalam Pemeliharaan Lingkungan**

Dalam pemeliharaan lingkungan, baik bersifat fisik maupun nonfisik, hukum adat Sasak memberikan tuntunan yang sangat arif dan dilandasi keharusan bagi setiap orang untuk memiliki kesadaran yang tinggi. Pelaksanaan kewajiban tidak dikarenakan

rasa takut terhadap penguasa, atau pemilik saja, tetapi lebih dilandasi atas rasa takut terhadap komunitas dan di atas segalanya adalah takut kepada Tuhan YME (Allah Swt.). Dalam hal ini penulis kemukakan sebagai contoh saja, misalnya dalam pemeliharaan lahan dan tanaman serta lingkungan pekarangan dan permukiman. Hal ini tercermin dalam pengamalan nilai-nilai kearifan seperti: lingkungan pekarangan dan permukiman yang dihuni oleh sekelompok orang yang terdiri dari beberapa keluarga (*kuren*) yang disebut *gubuq*, harus dipelihara secara bersama-sama (kebersihannya, keamanannya, kenyamanannya). Segala upaya untuk pelestarian *gubuq* dilakukan secara gotong royong misalnya melakukan *pemagaran* (biasanya pagar hidup) yang disebut *lambah*, menentukan batas yang jelas yang disebut "*penyenger*". Orang tidak boleh masuk sembarangan ke dalam *gubuq* (semuanya menggunakan tata aturan). Jika ada yang melanggar, misalnya loncat pagar dinyatakan melanggar adat yang disebut *nambarayang*, pelanggaran seperti ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik tetapi juga menimbulkan dampak religius yang disebut *cero* (kehilangan nilai magis). Dalam pemeliharaan sawah dan kebun (tanaman-tanaman), setiap orang harus bekerja dan merawat dengan penuh tanggung jawab. Upaya pemeliharannya harus mencapai tingkat kesempurnaan yang diharapkan yang disebut *kuninga*. Orang lain tidak akan berani mengganggu tanaman walaupun memotong sehelai rumput apabila melihat tanda larangan yang disebut *penyaweq*. Setiap orang tidak boleh sembarangan menebang pohon karena harus dilakukan pada hari-hari tertentu sesuai dengan jenis pohon yang ditebang. Menebang pohon tertentu misalnya pohon besar, terkadang memerlukan petunjuk orang tertentu karena bisa jadi di pohon itu dihuni oleh makhluk gaib, penentuan waktu dan

cara penebangan menggunakan pedoman yang disebut *uriga*. Semua ketentuan tersebut harus ditaati sebab apabila dilanggar bisa menimbulkan instabilitas dalam hubungan mikro dan makro kosmos, larangan ini dikenal dengan istilah *maliq*.

d. Adat *Pati*

Dengan adanya upacara kematian, dalam masyarakat suku Sasak dilaksanakan kegiatan upacara dari sebelum pemakaman sampai dengan pascapenguburan jenazah, yaitu 1) upacara sebelum pemakaman; 2) upacara pemakaman; dan 3) upacara setelah pemakaman. Upacara prapemakaman meliputi memandikan jenazah, mengafani, menyolatkan, serta penggalian makam atau kuburan. Upacara pemakaman jenazah meliputi pemberangkatan jenazah ke makam, menguburkan jenazah ke liang lahad, dan pembacaan doa. Sedangkan pascapemakaman jenazah yaitu pembacaan doa-doa pada hari-hari tertentu sesuai perkembangan masyarakat.

Setelah selesai pemakaman jenazah yang disertai dengan pembacaan doa dan mantera, maka pada hari kedua pada umumnya jarang dilakukan. Upacara selanjutnya dilakukan pada hari ketiga sampai hari ke seribu. Tahapan upacaranya sebagai berikut.

1. *Nelung*
2. *Mituk*
3. *Nyanga (siwak jelo)*
4. *Pelayaran*
5. *Matang Puluh*
6. *Nyatus Nyiu.*

3. Kesenian

Kesenian merupakan salah satu kearifan lokal yang sampai sekarang masih bertahan dan dilestarikan oleh suku Sasak antara lain: 1) Gendang beleq; 2) Gandrung; 3) Rudat; 4) Suling Dewa; dan 5) Rebana.

Selain adat istiadat yang merupakan bagian kearifan lokal suku Sasak yang masih bertahan, petuah-petuah atau ungkapan yang memberikan nilai luhur kepada masyarakatnya adalah pendidikan antikorupsi yang akan dijelaskan pada Bab IV secara eklektik dan integratif.

B. Bentuk kearifan Lokal Dikaitkan dengan Pendidikan Antikorupsi

Istilah "korupsi" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *corrupt* dalam bahasa Inggris yang berarti buruk, jahat, rusak. Kata turunan atau jadian dari kata *corrupt* adalah *corruption* yang berarti kecurangan, perubahan, dan korupsi. Pelaku korupsi disebut dengan koruptor atau orang yang melakukan korupsi. Sedangkan dalam kearifan lokal (budaya) Sasak sebagai sebuah *local knowledge* atau *local genius*, yang dalam terminologi masyarakat biasanya disebut pengadeq-adeq tan lokaq (warisan para leluhur) sebagai sebuah kearifan lokal (*local wisdom*). Dalam bahasa Sasak kata korupsi disebut *ngelingkungan* atau ada juga yang menyebut *nyembih*.

Berdasar kajian kearifan lokal suku Sasak di atas, pendidikan antikorupsi (anti *ngelingkungan/nyembih*, *ngeleat*, *ngerurut*, *ngelamit* dalam pendidikan informal khususnya di keluarga sudah mulai sejak dini. Pendidikan ini ditanamkan melalui cerita rakyat yang diyakini kebenarannya seperti melalui legenda

Cupak Grantang, dongeng atau cerita fabel/cerita dengan pelaku binatang *tetuntel-tuntel* dan *tegodek-godek* (kodok dan kera). Selain melalui ungkapan *sesenggak* (peribahasa/pepatah); *akal songkok* (akal kecapil bambu) dan melalui *lelakaq* (pantun/syair/gurindam), *inget-inget* juga melalui ungkapan motto hidup seperti *maliq*, *tindih*, *lomboq lempeng*, *patut patu pacu*, *tuhu genem*, dan sebagainya.

Dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 menjelaskan tentang pidana korupsi, yang menjelaskan bahwa setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain disebut korupsi. Dengan kata lain, korupsi dapat merugikan uang negara atau perekonomian negara. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan pula tentang pengertian korporasi, merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan organisasi, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang. Adanya kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Sesungguhnya konsep nilai yang terkandung dalam korupsi merupakan suatu nilai yang berharga dan berguna bagi manusia. Nilai bersifat abstrak, seperti sebuah ide, dalam arti tidak dapat ditangkap melalui indra. Nilai juga mengandung suatu harapan terhadap segala sesuatu yang diinginkan, misalnya nilai keadilan, kesederhanaan, dan lain-lain. Dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 (tiga) tingkatan nilai, yaitu:

1. Nilai dasar (asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak)

2. Nilai instrumen (nilai sebagai pelaksanaan nilai dasar, diwujudkan dalam bentuk norma)
3. Nilai praktis (nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari)

Dalam teori nilai menjelaskan bahwa nilai merupakan gabungan dari berbagai bidang keilmuan seperti filsafat, etika, dan manajemen. Nilai dapat didefinisikan sebagai alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, dan sesuai dengan yang diinginkan. Nilai memiliki sifat isi dan intensitas. Sifat isi menyampaikan bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir dari kehidupan adalah penting. Sifat intensitas tersebut dapat menjelaskan betapa pentingnya hal tersebut.

Nilai menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan tertentu lebih dikuasai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal benar, baik, dan diinginkan. Para peneliti bidang perilaku organisasi telah lama memasukkan konsep nilai sebagai dasar pemahaman sikap dan motivasi individu. Individu yang memasuki suatu organisasi dengan pendapat yang telah terbentuk sebelumnya tentang apa yang “seharusnya” dan apa yang “tidak seharusnya” terjadi. Hal ini selanjutnya menimbulkan implikasi pada perilaku atau hasil-hasil tertentu yang lebih disukai orang lain. Dengan kata lain, nilai menutupi objektivitas dan rasionalitas (Robbins, 2007:148).

Ketentuan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam pertumbuhan pembangunan nasional pada berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dalam berbagai bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang dapat berdampak pada krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efektif.

Kepentingan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan ataupun tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan kekayaan negara atau perusahaan serta pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara, tindak pidana diatur dalam

undang-undang. Undang-undang ini merumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan yang dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat melawan hukum dalam pengertian formal dan material. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Berdasarkan rumusan secara formal yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi dapat dikembalikan kepada negara, pelaku pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini telah memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menemukan ancaman pidana minimum khusus pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberantasan pidana. Selain itu, undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa penggantian uang kerugian negara.

Berbicara masalah kearifan lokal suku Sasak di Lombok tentunya perlu pemahaman apa itu kearifan lokal menurut masyarakat Sasak. Berdasarkan hasil wawancara di Lombok Barat, kearifan lokal merupakan perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh suatu komunitas yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya maupun dari pengalamannya berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya, untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau kesulitan yang dihadapi. Kearifan lokal suku Sasak tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti keraifan lokal kaitannya dengan sistem kekerabatan, kearifan lokal

kaitannya dengan pemerintahan, kearifan lokal kaitannya dengan sistem mata pencaharian penduduk, kearifan lokal kaitannya dengan sistem pengetahuan, kearifan lokal kaitannya dengan sistem kesenian, dan kearifan lokal kaitannya dengan sistem religi. Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok pembahasan adalah kearifan lokal terkait dengan pendidikan antikorupsi pada masyarakat Sasak di Lombok.

Dengan pendidikan antikorupsi, generasi penerus bangsa akan lebih awal memahami masalah korupsi dan tidak melakukan kejahatan tersebut. Pendidikan antikorupsi tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga menentukan pola pikir, serta tingkah laku masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip hidup yang baik.

Masalah pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum saja. Dunia pendidikan diharapkan dapat berperan dalam pencegahan korupsi sejak dini. Pendidikan sebagai wadah untuk membentuk generasi penerus bangsa menjadi wadah yang efektif dalam rangka pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum dan memberikan ceramah atau seminar antikorupsi. Bekal pendidikan antikorupsi yang cukup akan memberikan perlindungan kepada para calon generasi penerus bangsa dari maraknya tindak korupsi.

Praktik korupsi maupun upaya penanggulangannya dalam bentuk memberi pemahaman melalui pendidikan antikorupsi tergambar dengan jelas dalam beberapa ungkapan-ungkapan tradisi lokal suku Sasak itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan beberapa ungkapan tradisional suku Sasak yang mengandung makna kearifan lokal kaitannya dengan pendidikan antikorupsi, seperti: 1) *Patut Patuh Pacu*; 2) *Aiq*

Meneng, Tunjung Tilah, empak Bau; 3). Tindih Maliq Merang; 4) Nenggale lek Bongkor Batur; 5) Dendeqte Ngelet/Ngelamit Batur; 6) Maraq Begang leq Lumbung; 7) Maraq Meong Ambuk Pindang; 8) Denteqte Gawek Maraq Cupak Gerantang; 9) Bagus te Gawek Bagus te Dait, Lenge te Gawek Lenge te Dait ; 10) Bedait Kanca Pada Bedeng Gigi; 11) Maraq Penyu Beteloq leq Darat, Meta Kakenan leq Tengaq Segara; 12) Maraq Sifat Bebalog, Ndeqna Bau Caplak Siq Todokna, Pemecut Elongna Remuk Tolang Daengta.

Arti dari masing-masing ungkapan tersebut akan dijabarkan secara ringkas di bawah ini.

1. *Patut Patuh Pacu*

Sesuai wawancara dengan Bapak H. Jalaludin Arzaki (tanggal 1 Agustus 2014) bahwa kata *patut* berarti benar, *patuh* artinya turut atau sesuai dengan aturan, dan *pacu* berarti sungguh-sungguh. Jadi, ungkapan *patut patut pacu* mengandung pengertian bahwa segala sesuatu sikap, perbuatan atau perilaku yang dilakukan selalu berdasarkan aturan yang berlaku di masyarakat. Adanya etika sopan santun yang dilandasi tata susila yang tinggi yang berorientasi pada kebenaran dengan mengedepankan rasa seperjuangan serta rasa kebersamaan akan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan rasa kebersamaan dan persaudaraan yang tinggi yang dilandasi dengan norma-norma kebenaran akan tercipta suatu kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat menuju kesejahteraan lahir dan batin.

2. *Aiq Meneng Tujung Tilah Empaq Bau*

Aiq berarti air, *meneng* berarti jernih, *tunjung* berarti teratai, *tilah* berarti utuh, *empaq* berarti ikan, dan *bau* berarti tertangkap. Jadi secara keseluruhan ungkapan tersebut berarti air tetap jernih, bunga teratai tetap utuh, ikan

tertangkap. Ungkapan mengumpamakan bagai mengambil ikan di dalam air yang di atasnya terdapat bunga teratai. Jika cara mengambilnya tidak hati-hati dan tidak dengan perhitungan, tentu bunga teratai akan rusak, air akan menjadi keruh, dan kemungkinan juga tidak mendapat ikan. Ungkapan ini mengandung ajaran agar jika kita dihadapkan oleh suatu masalah, apabila cukup pelik, harus hati-hati dan penuh perhitungan. Sehingga dapat dicapai pemecahan/penyelesaian yang saling menguntungkan. Kalau itu menyangkut beberapa orang, harus diusahakan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Soerjono Soekamto yang menjelaskan bahwa inti dari nilai dari penegakan hukum adalah dapat mengejawantahkan suatu sikap terhadap tindak yang patuh terhadap perilaku sikap untuk mempertahankan serta menciptakan, dan memelihara kedamaian dalam masyarakat sehingga semua dapat berjalan baik, lancar, dan sukses.

3. *Tindih Maliq Merang*

Sesuai dengan (wawancara Bapak Supardi 4 Agustus 2014) menjelaskan kata *tindih* berarti taat/patut, *maliq* berarti pantangan/sangsi dan *merang* berarti garang. Dengan demikian, makna dari *tindih maliq merang* adalah suatu perbuatan selektif yang berlandaskan etika moral dalam berbicara, berperilaku, dan berpikir sesuai dengan tata krama kemanusiaan sehingga tidak menjadi manusia yang *tulah manuh* terhadap ajaran leluhur. Hal tersebut akan berdampak pada karma bagi orang yang melakukan. Hal yang diungkapkan informan bahwa *tindih maliq merang*, merupakan suatu ajaran leluhur yang memiliki hakikat yang tinggi terhadap keberadaan manusia di muka bumi. Dengan

berpedoman pada ajaran leluhur di samping penerapan ajaran agama akan memberikan semangat fibrasi yang kuat terhadap keberadaan jiwa sehingga prinsip tersebut tetap dipegang dalam menjalankan ajaran leluhur dan agama untuk menjadi manusia yang utuh, berbudi pekerti luhur, dan bijaksana.

4. *Nenggale lek Bongkor Batur*

Sesuai dengan penjelasan Mamik Jagat (wawancara 4 Agustus 2014) menjelaskan bahwa *nenggala* artinya bajak, *bongkor pundak* atau tenaga, sedangkan *batur* artinya teman. Dengan demikian *nenggale lek bongkor batur* artinya suka memanfaatkan jerih payah/tenaga orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi diri sendiri. Penjelasan informan mengindikasikan bahwa sesungguhnya perilaku tersebut telah merugikan orang lain dan bertentangan dengan hak dan kewajiban manusia. Dalam melaksanakan kewajiban setiap manusia sepatutnya berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap jerih payah orang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerasan terhadap pengorbanan orang lain akan berimplikasi terhadap penderitaan dan kesengsaraan terhadap umat manusia.

5. *Dendeqte Ngelelet/Ngelamit Batur*

Penjelasan di atas disampaikan Mamik Jagat (wawancara 4 Agustus 2014) menjelaskan kata *dendeqte* artinya jangan, *Ngelelet/Ngelamit* artinya perlakuan curang (mengurangi secara diam-diam dari standar ukuran yang telah ditentukan) dan *batur* artinya teman (orang lain). Ini merupakan karakter individu yang memiliki sifat *loba* atau serakah yang menyebabkan perasaan orang lain tersakiti. *Ngelamit*

adalah suatu cara seseorang melakukan kecurangan dengan memberdayakan lawan bisnisnya atau orang lain dalam hal ekonomi bisnis baik kontan maupun menimbun laba. Sedangkan *ngelet* biasanya dilakukan pada ukuran volume timbangan yang ditakar tidak sesuai dengan volume berat sebenarnya. Hal ini membuktikan adanya suatu perilaku korupsi secara tersembunyi menggunakan teknik kecurangan pada skala timbangan yang digunakan yang sudah tentu dapat merugikan orang lain secara ekonomi.

6. *Maraq Begang leq Lumbung*

Mamik Yulendra (wawancara 11 Agustus 2014) menjelaskan bahwa kata *maraq* artinya seperti, *begang* artinya tikus, dan *leq lumbung* artinya di lumbung. Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya kecurangan atau pemerasan yang dilakukan seseorang/penguasa terhadap orang lain atau masyarakat dalam suatu kelompok organisasi atau kelompok masyarakat. Adanya kesalahan dalam menggunakan kekuasaan dan tanggungjawab akan memberikan dampak terhadap keutuhan organisasi dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, kata *maraq begang lek lumbung* tersebut menyiratkan bahwa adanya tikus (binatang pengerat) yang selalu memeras perekonomian masyarakat di dalam suatu organisasi atau kelompok yang dalam waktu lama menyebabkan perusahaan bangkrut atau rugi bahkan akan gulung tikar. Dalam konteks korupsi, hal ini membuktikan adanya korupsi terselubung yang dapat merugikan organisasi, perusahaan, bahkan negara.

7. *Maraq Meong Ambuk Pindang*

Bapak Sahnun (wawancara, 8 Agustus 2014) menjelaskan kata *maraq* yang artinya seperti, *meong* artinya kucing, dan *pindang* artinya ikan. Ungkapan ini menjelaskan bahwa

seseorang yang memiliki kekuasaan sering memberdayakan seperangkat usaha atau struktur serta bawahannya untuk mengais atau memeras baik itu dalam pekerjaan maupun dalam hal keuangan. Mencium atau mengetahui kondisi keuangan cepat merangsang untuk merancang strategi bahkan memanfaatkan kesempatan melalui teman dan struktur untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari hasil pekerjaan bawahan atau strukturnya.

8. *Denteqte Gawek Maraq Cupak Gerantang*

Denteqte artinya jangan, *gawek* berarti perbuatan, *maraq* artinya seperti, *cupak* yang dianggap manusia loba, rakus, pembual, dan *gerantang* adalah orang yang kalem, jujur dan tekun. Dalam adegan cerita Cupak Gerantang bahwa si Cupak selalu ingin menguasai, bahkan congkak terhadap Gerantang. Sifat rakus serta loba yang ditunjukkan oleh Cupak terhadap Gerantang menyebabkan Cupak selalu merasa tidak puas dan ingin menguasai Gerantang. Dengan sifat *loba* dan karakter pembohong menyebabkan Gerantang merasa tersiksa dan menderita. Dengan cerita tersebut diharapkan manusia tidak memiliki sifat-sifat seperti Cupak yaitu rakus, pembual, dan pembohong.

9. *Bagus te Gawek Bagus te Dait, Lenge te Gawek Lenge te Dait*
 Sahnun (wawancara Sahnun, 8 Agustus 2014) menjelaskan bahwa bagus artinya baik, *te gawek* artinya pekerjaan, bagus *te dait* artinya baik hasilnya, sedangkan *lenge* artinya jelek, dan *te gawek lenge te dait* artinya jelek yang dikerjakan maka jelek hasilnya. Hal ini menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan memberikan dampak pada hasil pekerjaan tersebut. Misalnya jika kita melakukan pekerjaan yang baik dan positif, maka akan memberikan rasa aman, nyaman,

dan tenteram pada diri kita sendiri. Sebaliknya bila kita melakukan perbuatan yang buruk maupun jahat maka hasilnya akan menyengsarakan atau menderitakan orang lain bahkan menyusahkan diri kita sendiri. Untuk itu, janganlah kita melakukan perbuatan yang dapat menyusahkan bahkan merugikan orang lain karena akan berdampak kepada diri kita sendiri. Dengan demikian sepatutnya kita sebagai umat manusia melakukan suatu perbuatan dilandasi atas rasa kemanusiaan yang tinggi dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan moral sehingga dapat memperkuat jati diri sebagai umat manusia yang memiliki kepribadian dan rasa perikemanusiaan.

10. *Bedait Kanca Pada Bedeng Gigi*

Bedait berarti berjumpa, *kanca* berarti dengan, *pada* berarti sama, *bedeng* berarti hitam, dan *gigi* berarti gigi. Jadi secara keseluruhan ungkapan tersebut berarti berjumpa dengan sama-sama hitam gigi. Ungkapan ini dikatakan orang pandai/jagoan yang berjumpa dengan sesama orang pandai/jagoan. Jagoan di sini bisa dalam ilmu, bisa dalam kekuatan jahat (ilmu hitam). Seseorang menjadi terkenal karena kemampuannya, baik positif maupun negatif. Ajaran yang terkandung dalam ungkapan ini adalah agar orang jangan bersifat sombong karena kelebihan yang dimiliki. Bagaimanapun tinggi ilmu seseorang atau jagoannya pasti ada yang menyamai atau bahkan melebihi.

11. *Maraq Penyu, Beteloq Leq Darat, Meta Kakenan Leq Tenggara Segara*

Maraq berarti seperti, *penyu* berarti kura-kura, *beteloq* berarti bertelur, *leq darat* berarti di darat, *meta* berarti mencari, *kakenan* berarti makanan, *leq tenggaq* berarti di

tengah, dan *segara* berarti laut. Secara keseluruhan ungkapan ini berarti seperti kura-kura bertelur di darat, mencari makan di laut. Ungkapan ini lahir pada zaman penjajahan. Rakyat sudah bisa merasakan bahwa penjajah hanya bertujuan untuk memperkaya diri. Kekayaan itu tidak disimpan di tempat mereka memperolehnya, tetapi dikirim ke tempat asalnya, untuk kepentingan keluarganya. Adanya ungkapan ini dimaksudkan untuk mengingatkan agar kita selalu berhati-hati dan waspada, jangan sampai terjebak oleh keinginan mengumpulkan keuntungan pribadi dari jabatan yang kita pegang.

12. *Maraq Sifat Bebalog Ndeqna Bau Ceplak Siq Todokna Pemecut Elongna Repoq Tolang Daengta*

Maraq berarti seperti, *sifat* berarti sifat, *bebalog* berarti buaya, *ndeqna bau* berarti tidak bisa, *ceplak* berarti terkam, *siq todokna* berarti dengan mulutnya, pemecut berarti cambukan, *elongna* berarti ekornya, *repoq* berarti remuk, *tolang daengta* berarti tulang rusuk kita. Seperti sifat buaya, tidak dapat menerkam dengan mulutnya, cambukkan ekornya meremukkan tulang rusuk kita. Ungkapan ini biasanya dikenakan kepada para pemimpin yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya. Seorang pemimpin adalah orang yang memiliki wewenang. Dalam ungkapan ini digunakan buaya sebagai perumpamaan karena buaya memang sering dijadikan lambang kekuasaan dalam arti yang buruk, yaitu keserakahan. Di sini mulut buaya dimaksudkan sebagai kekuasaan yang dimiliki. Sedangkan ekor buaya diumpamakan sebagai para bawahan yang diperalat. Jadi, buaya digambarkan mempunyai dua senjata untuk membunuh lawan, yaitu mulut dan ekornya. Kalau

tidak bisa dengan mulut ia akan menggunakan ekornya untuk menyerang lawan. Ungkapan ini mengandung ajaran agar jika menjadi pemimpin jangan mempunyai sifat demikian, yaitu menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang demi kepentingan pribadi. Hal tersebut akan menimbulkan antipati dari rakyat yang dipimpin. Timbulnya ungkapan tersebut rupanya disebabkan adanya contoh-contoh perbuatan para pemimpin yang tidak terpuji. Lebih-lebih pada zaman penjajah dahulu. Banyak pemimpin yang ingin cari muka di depan penjajah, sehingga ia rela mengorbankan rakyat/bangsanya sendiri demi kepentingan pribadinya. Namun, sampai sekarangpun ungkapan ini masih bisa ditujukan terhadap pejabat yang berbuat seperti itu.

Ungkapan-ungkapan seperti di atas sangat erat dengan kearifan lokal suatu masyarakat. Kearifan lokal ini merupakan suatu larangan yang mengandung ajaran. Pemimpin tidak boleh mempunyai sifat serakah, yaitu menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang demi kepentingan diri sendiri. Hal tersebut dapat menimbulkan antipati dari rakyat yang dipimpin. Dengan mencermati ungkapan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa perilaku-perilaku tersebut merupakan tindakan korupsi walaupun dilakukan pada zaman dulu.

Dengan tergambarnya ungkapan tradisional tersebut dapat memberi makna bahwa kearifan lokal atau kebudayaan masyarakat Sasak sangat berperan penting untuk menciptakan adanya rasa persatuan, kebersamaan, dan perdamaian. Berdasarkan hasil wawancara di Desa Lingsar, Lombok Barat tentang kearifan lokal terkait dengan pendidikan antikorupsi, adat *Wetu Telu* suku Sasak membuat suatu aturan atau kesepakatan yang harus ditaati

dan diindahkan bersama warganya dengan maksud siapa yang melanggar aturan tersebut harus mendapat ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Bentuk sanksi yang diberlakukan ada empat jenis, yaitu 1) *Ngayah*; 2) *Pelilaaq*; 3) *Peliwah*; 4) *Selong*. Ganjaran ini diberikan tergantung besar kecilnya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Masing-masing sanksi ada ketentuannya: sanksi *ngayah* sifatnya lebih ringan dari tiga sanksi lainnya. *Ngayah* di sini artinya bekerja tanpa upah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya pada saat mengangkut pasir dibawa ke suatu tempat sampai selesai. Sanksi berikutnya, yaitu *pelilaaq*. Sanksi ini lebih memberatkan. Apabila ada seorang warga atau *krama* adat mencuri, maka akan dipermalukan dengan rambut dicukur compang-camping dan diarak keliling desa sambil menyebut “diri saya pencuri, saya pencuri, saya pencuri.” Walaupun saat ini ada pihak berwajib yang menangani, kejahatan yang telah dilakukan secara turun-temurun akan membuat mereka lebih cepat jera karena dipermalukan di depan umum (*dipelilaaq*). Sanksi berikutnya, yaitu “*dipeliwah*”, artinya dikeluarkan dari perkumpulan krama adat. Terakhir adalah sanksi yang terberat, disebut *selong*. Hukum selong masih bertahan sampai sekarang, walaupun hukum selong ini sudah dikenal sejak dahulu, sejak zaman kerajaan. Orang yang *diselong* biasanya orang yang melakukan zinah atau selingkuh yang dianggap membawa aib di masyarakat. Mereka diasingkan/*diselong* dari kampungnya dan tidak diperkenankan untuk kembali. Dengan adanya penjelasan singkat berupa sanksi tersebut dapat dikatakan sudah ada pemahaman pendidikan antikorupsi pada masyarakat suku Sasak di Lombok. Tentunya pendidikan antikorupsi melarang keras terjadinya praktik-praktik korupsi pada masyarakat karena dapat merugikan rakyat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan hasil wawancara di Karang Bayan dan Batu Kumbang, Lombok Barat, pendidikan antikorupsi telah menjadi pemahaman masyarakat Karang Bayan sejak dulu. Misalnya, jika seorang ketua organisasi menggelapkan uang krama adat artinya menggunakan dengan cara tidak benar, maka ia diberhentikan secara tidak hormat sebagai pemimpin dan harus mengganti berapa jumlah uang yang dihabiskan. Orang tersebut selain dipecat juga dikeluarkan dari perkumpulannya.

- Pendidikan Antikorupsi (*ngelingkungan*) pada Masyarakat Sasak

Masyarakat tradisional Sasak teguh kepercayaannya terhadap pengadeq-adeq. Ketika anak sudah bisa berkomunikasi dengan sadar dan sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, orang tua sudah mulai mengenalkan pendidikan antikorupsi melalui pembiasaan untuk berlaku *lomboq* (lurus, jujur), *patuh* (taat ajaran orang tua), *pacu* (rajin dan saleh), *bekti* (bakti, setia), *matiq* (penurut), *maliq* (haram/tabu/takut melanggar ajaran orang tua, guru, aturan/norma/hukum agama, sosial dan *datu dewa* (pemerintah, pengeraksa/pemban adat gama). Sarana yang digunakan untuk mendidik anak sejak dini, yaitu dengan memberikan contoh kepanutan dari *pangeran* (orang tua) selain menggunakan media *folklore* melalui dongeng rakyat, cerita legenda, dan kisah leluhur yang *lomboq wanen* (jujur pemberani). Media lain yang digunakan adalah melalui peribahasa/pepatah daerah yang disebut *sesenggak* atau melalui sastra daerah yang disebut "*lelakaq*" (pantun, syair, gurindam). Sebagai contoh populer *sesenggak* Sasak berbunyi: *endaq berakal maraq cupak* (jangan berakal buruk seperti kelakuan si cupak yang suka *ngelingkungan*) atau *endaq gerang berakal songkoq* (jangan suka berakal seperti songkok petani yang dari bambu), artinya jangan makan sendiri

dan menghabiskan hak orang lain. Dalam bentuk *lelakaq* (pantun gurindam) ajaran antikorupsi diingatkan berbentuk ajaran moral yang berbunyi:

- a. *Anaq jari papoq baloq, inget-inget* (anak-anak, cucu-buyut, ingat-ingat). *Leq dunia pacu ngaji, sanget-sanget* (di dunia belajar ilmu, sungguh-sungguh).
- b. *Ite sine maraq missal belabu jukung* (kita ini semisal sampan yang berlabuh). *Pelih entan tumpah belah bejeringkung* (salah tingkah polah jadi hancur berantakan).
- c. *Ite sine maraq misal leq segare* (kita ini seperti berada di tengah laut). *Pelih entan pirik layar, kesengsara* (salah cara membalik sampan akan jadi sengsara).

Semua baris *lelakaq* di atas bermakna agar hati-hati menjalankan hidup dan kehidupan agar tidak berbuat curang yang sudah tentu akibatnya membuat celaka dan sengsara.

Dalam pendidikan moral di usia dini, anak-anak Sasak diajarkan dan dibiasakan hidup *inih* (hemat) melalui pengajaran moral yang disebut *teguq* (tidak boros), *kikip* (tidak dermawan, berlebihan), *pelit* (tidak suka menggunakan uang seenaknya). Untuk menjalankan pendidikan moral seperti tersebut di atas sejak usia dini anak-anak dibiasakan suka *nyeleng* atau *mecelengan* (menabung) dengan menggunakan tiang bambu yang memanjang pada rusuk serambi rumah atau dapur.

- Hukum Krama Adat Bagi Pelaku Lingkungan (Korupsi)

Masyarakat Sasak mengenal kelembagaan adat yang disebut krama adat (*pekraman*) yang berbentuk *krama banjar*, *krama gubuaq*, dan *krama desa* sebagai kendaraan adat dalam menjalankan *awig-awig* (aturan hukum) adat dan *dedosan adat* (sangsang adat). Dalam masyarakat adat Sasak bagi *pelanggar awiq-*

awiq adat dikenai *dedosan* (sangsi adat) dalam bentuk:

1. *Ukum* (hukum) *ngayah* berwujud bayar denda dan kerja rodi.
2. *Ukum* (hukum) *pelilaq* (permalu)
3. *Ukum* (hukum) *peluah* (pengucilan)
4. *Ukum* (hukum) *selong* (pengasingan)
5. *Ukum* (hukum) *ilen pati atau ukum batu anting* (hukum bunuh)

Pada kenyataan menurut para informan bagi pelanggar hukum adat yang melakukan tindakan *ngelingkungan* (korupsi) yang sudah dijalankan dalam volume yang cukup banyak adalah *ukum pelilaq* (permalu) dan *ukum peluah* (pengucilan) dan juga sering dijalankan *ukum selong* (pengasingan) bagi pelanggar terberat yang melakukan aksi *ngelingkungan* berulang-ulang. Khusus di daerah penelitian di Desa Lingsar dan Desa Batu Kumbung sanksi adat yang paling sering dijalankan adalah *ukum peluah* bagi yang menghabiskan uang masjid, uang pembayaran tanah wakaf, dan sebagainya. Bagi yang kena sanksi adat *selong* pelakunya tidak kembali pulang karena malu.

Dalam penegakan hukum adat/*awig-awig adat* pada tingkat krama banjar dilakukan oleh pengurus di tingkat *krama gubuq* di sebuah kampung, pengadilan adat dilakukan pembantu krama adat, yaitu *keliang adat langlang gubuq kiayi pengulung gubuq para pengelingsir* (tetua *gubuq/kampung*). Sedangkan pengadilan adat tingkat krama desa dilakukan oleh pemusungan atau kepala desa, langlang desa, pengulu desa, jaksa dan para penglingsir desa yang lain. Peradilan pada *krama gubuq* dilaksanakan dengan mengambil tempat di masjid *gubuq*, *rumah kelian adat* (kepala dusun) atau *kemaliq* (tempat yang dianggap tabu/suci di kampung itu). Peradilan adat pada krama desa dapat dilakukan di

kantor desa, di masjid setempat, atau rumah adat/*kemaliq* yang ditabukan di desa tersebut.

Sama halnya seperti peradilan zaman sekarang, pada tingkat *krama gubuq* dan krama desa selalu bersifat umum dan terbuka. Pengalaman menunjukkan bahwa hukuman adat yang dijalankan dalam bentuk hukuman sosial ke masyarakat jauh lebih efektif dalam memberikan efek jera daripada hukuman fisik yang berlaku dalam hukum formal atau hukum positif. Dengan kata lain lebih mendidik dan memanusiaikan manusia jika menghukum dengan hukuman sosial. Menurut hemat penulis semua pemimpin pemerintah harus menjalankan kewajibannya dengan bertindak sebagai orang yang *mawe desa mawe adat*. Dalam kearifan lokal Sasak berarti bahwa setiap pemimpin pemerintahan/masyarakat otomatis sebagai pelaksana adat. Dengan demikian masyarakat akan tetap berada dalam kehidupan yang *papah, reme, regem* (damai, saling menolong, dan saling mengasihi).

Lama tidaknya hukuman bergantung besar kecilnya kesalahan yang dilakukan. Hukum *selong* dapat dijalankan antara dua tahun atau seumur hidup. Dalam kitab hukum adat Sasak yang disebut Kotaragama pelanggar *awig-awig adat* kebanyakan dikenai denda uang. Jika pelaku tidak mau mengakui kesalahan, sementara tidak ditemukan bukti nyata dan tidak ada yang berani menjadi saksi maka hukum yang diberlakukan cukup dengan mengikrarkan sumpah mulai dari bersumpah mendapat bahaya/kecelakaan, sakit, sampai sumpah mati. Dalam tradisi (adat *game luwir game*) masyarakat Sasak mengucapkan sumpah dapat diikuti dengan meminum air suci tertentu. Pengucapan sumpah diikuti pesan-pesan spiritual sampai memakan tanah yang dianggap bertuah seperti tanah kuburan. Sampai sekarang tanah kuburan yang dianggap terkenal adalah tanah kuburan *wali nyatoq* di Desa Rembitan, Lombok Tengah.

BAB IV

NILAI KEARIFAN LOKAL TERKAIT DENGAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SUKU SASAK DI LOMBOK

A. Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Kearifan Lokal yang Terkait Dengan Pendidikan Antikorupsi

Dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 menjelaskan tentang pidana korupsi, yang menjelaskan bahwa setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain disebut korupsi. Dengan kata lain, korupsi dapat merugikan uang negara atau perekonomian negara. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan pula tentang pengertian korporasi, merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan organisasi, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang. Adanya kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Sesungguhnya konsep nilai yang terkandung dalam korupsi merupakan suatu nilai yang berharga dan berguna bagi manusia.

Nilai bersifat abstrak, seperti sebuah ide, dalam arti tidak dapat ditangkap melalui indra. Nilai juga mengandung suatu harapan terhadap segala sesuatu yang diinginkan, misalnya nilai keadilan, kesederhanaan, dan lain-lain. Dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 (tiga) tingkatan nilai, yaitu:

1. Nilai dasar (asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak)
2. Nilai instrumen (nilai sebagai pelaksanaan nilai dasar, diwujudkan dalam bentuk norma)
3. Nilai praktis (nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari)

Dalam teori nilai menjelaskan bahwa nilai merupakan gabungan dari berbagai bidang keilmuan seperti filsafat, etika, dan manajemen. Nilai dapat didefinisikan sebagai alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, dan sesuai dengan yang diinginkan. Nilai memiliki sifat isi dan intensitas. Sifat isi menyampaikan bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir dari kehidupan adalah penting. Sifat intensitas tersebut dapat menjelaskan betapa pentingnya hal tersebut.

Nilai menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan tertentu lebih dikuasai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal benar, baik, dan diinginkan. Para peneliti bidang perilaku organisasi telah

lama memasukkan konsep nilai sebagai dasar pemahaman sikap dan motivasi individu. Individu yang memasuki suatu organisasi dengan pendapat yang telah terbentuk sebelumnya tentang apa yang “seharusnya” dan apa yang “tidak seharusnya” terjadi. Hal ini selanjutnya menimbulkan implikasi pada perilaku atau hasil-hasil tertentu yang lebih disukai orang lain. Dengan kata lain, nilai menutupi objektivitas dan rasionalitas (Robbins, 2007:148).

Ketentuan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam pertumbuhan pembangunan nasional pada berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dalam berbagai bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang dapat berdampak pada krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efektif.

Kuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan ataupun tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha

Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan kekayaan negara atau perusahaan serta pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara, tindak pidana diatur dalam undang-undang. Undang-undang ini merumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan yang dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat melawan hukum dalam pengertian formal dan material. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Berdasarkan rumusan secara formal yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi dapat dikembalikan kepada negara, pelaku pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini telah memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menemukan ancaman pidana minimum khusus pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberantasan pidana. Selain itu, undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa penggantian uang kerugian negara.

Lombok terletak antara 8°12' – 9°1' Lintang Selatan, dan antara 115°44' sampai 116°40' Bujur Timur, dengan luas wilayah 47.000 km yang mencakup pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pulau Lombok merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat selain Pulau Sumbawa. Kata Lombok tertuang dalam kitab *Negara Kertagama* karya *Empu Prapanca*, seorang pujangga besar pada abad ke-14,

tepatnya sekitar tahun 1365 M. Dalam pupuh XIV bait 3 dan 4 kitab tersebut dinyatakan bahwa Lombok Barat disebut Lombok Mirah, sedangkan wilayah Lombok Timur disebut Sasak. Di sisi lain dalam babad Lombok disebutkan pula bahwa pada zaman dahulu pernah ada seorang raja bernama Lombok yang memerintah di Pulau Lombok (Abdul, 2006:13).

Pendapat lain menyatakan bahwa kata "Lombok" diambil dari kata *loubouk* dari bahasa Sasak, yang dalam bahasa Indonesia berarti lurus. Berdasarkan arti tersebut, kebanyakan masyarakat menganggap orang-orang yang tinggal di Pulau Lombok berhati lurus atau *loubouk*, jujur, memiliki etika, sopan santun, dan berbudi pekerti luhur.

Berbicara masalah kearifan lokal suku Sasak di Lombok tentunya perlu pemahaman apa itu kearifan lokal menurut masyarakat Sasak. Berdasarkan hasil wawancara di Lombok Barat, kearifan lokal merupakan perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh suatu komunitas yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya maupun dari pengalamannya berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya, untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau kesulitan yang dihadapi. Kearifan lokal suku Sasak tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kearifan lokal kaitannya dengan sistem kekerabatan, kearifan lokal kaitannya dengan pemerintahan, kearifan lokal kaitannya dengan sistem mata pencaharian penduduk, kearifan lokal kaitannya dengan sistem pengetahuan, kearifan lokal kaitannya dengan sistem kesenian, dan kearifan lokal kaitannya dengan sistem religi. Dalam sistem kekerabatan, terdapat tiga macam sistem yang terkenal yaitu: sistem *matrilineal*, sistem *patrilineal*, dan sistem *parental*. Sistem *matrilineal* ialah sistem kekeluargaan menurut garis keturunan ibu. Sistem *patrilineal* ialah suatu sistem kekeluargaan yang merupakan garis keturunan ayah. Sistem

parental dikenal pula sistem *bilateral*, yaitu sistem kekeluargaan melalui garis keturunan ayah dan ibu. Pada sistem *parental* tidak dikenal adanya *clan* dan *marga* (Ali, 1999:26).

Pada masyarakat Suku Sasak sebuah keluarga terbentuk melalui suatu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Berdasarkan keanggotaan yang ada, keluarga dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu: a) keluarga inti; b) keluarga luas; dan c) keluarga di luar keluarga inti. Keluarga inti disebut juga keluarga *batih* atau *kuren*, yaitu suatu kerabat yang anggotanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya yang belum menikah (Wiastuti, 1992:49).

Keluarga luas adalah keluarga yang para anggotanya terdiri dari suatu keluarga senior ditambah dengan beberapa keluarga junior yang terikat pada satu kesatuan lokasi, ekonomi, dan adat istiadat. Keluarga luas terdiri dari suami, istri, anak-anak, kakak, nenek, dan nenek dari pihak ayah dan ibu, berikut saudara-saudara mereka, saudara dari pihak ibu termasuk anak-anaknya. Adapun yang dimaksud dengan keluarga di luar keluarga inti adalah keluarga yang hubungan kekerabatannya terjadi berdasarkan keturunan dan perkawinan, namun berada di luar keluarga inti dan keluarga luas. Misalnya keluarga besar (kerabat) pihak istri atau keluarga besar (kerabat) pihak suami, termasuk saudara sepupu dan lain sebagainya yang belum termasuk dalam lingkungan kategori pertama dan kedua. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa keluarga di luar keluarga inti adalah kerabat-kerabat yang tidak tertampung pada keluarga inti dan keluarga luas (May, 1989:65—66).

Selain terdapat kategori keluarga inti, terdapat pula keluarga di luar inti yang cakupannya lebih luas lagi lazimnya disebut *sorohan*. Tercakup di dalam istilah *sorohan*, menurut garis ke atas sering disebut dengan istilah sebutan *papug baloq*. *Papug* adalah orang tua dari ayah dan ibu, sedangkan *baloq* adalah kakek atau nenek

Sorohan menurut garis ke samping mencakup sebutan *semeton jari* (saudara-saudara, termasuk di dalamnya sepupu atau misan, baik dari pihak ayah ataupun dari ibu), sedangkan *sorohan* menurut garis ke bawah mencakup di dalamnya sebutan *papuk bai* (*papua* adalah cucu, dan *bai* adalah anak dari cucu (Syakur, 2006:220).

Dalam menjalin suatu perkawinan di mana seorang *teruna* (jejaka) kawin dengan *dedara* (gadis) atau seorang *bebalu* (janda), dalam penerapan sistem *patrilineal* biasanya memiliki tempat tinggal di rumah ayahnya. Jika tidak, baik atas biaya orang tua atau biaya sendiri mereka telah membangun sebuah rumah yang letaknya di dekat rumah orang tua atau ayahnya. Hal ini penting di samping untuk ketenangan keluarga, juga untuk menerapkan adat istiadat nenek moyangnya serta ajaran agama yang menetapkan seorang suami berfungsi sebagai kepala keluarga yang harus bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Dengan mengetahui arti pentingnya rumah di kalangan mereka, sistem pewarisan menurut adat setempat biasanya memberikan tanah dan rumah tempat tinggal hanya kepada anak laki-lakinya, sedangkan pada anak perempuannya biasanya diberikan harta warisan terbatas dalam bentuk perhiasan dan barang-barang rumah tangga (Kappi, 1986:17).

Perkawinan masyarakat Suku Sasak telah tampak bahwa anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan, memiliki hubungan kekeluargaan yang erat dengan pihak ayah dan ibu. Apabila terjadi suatu perceraian antara suami dengan istri, anak-anaknya bebas memilih, pihak mana yang disukai antara ibu atau ayahnya dan sepenuhnya diserahkan kepada anaknya untuk menentukan sendiri (Ali, 1999:26—27).

Sistem pembagian warisan di kalangan masyarakat suku Sasak pada umumnya menggunakan sistem *faraid* yang berlaku dalam agama Islam, yaitu sebagian untuk anak perempuan dan dua bagian

untuk anak laki-laki. Namun demikian, ada pula di kalangan anggota masyarakat suku Sasak tertentu penerimaan warisan seorang anak perempuan lebih besar jumlahnya daripada penerimaan saudaranya yang laki-laki. Hal ini mungkin juga terjadi, manakala adat wasiat yang dilakukan dengan sistem *hibah* sebelum orang tua anak yang bersangkutan meninggal dunia (Syakur, 2006:219).

Dalam masyarakat suku Sasak ada nama-nama sistem kekerabatan yang telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem kekerabatan tersebut mewarnai kehidupan bahkan panggilan terhadap sesama umatnya dalam lingkungan keluarga. Dengan panggilan yang diberikan akan menunjukkan tingkat maupun status masyarakat berada pada posisi yang telah ditentukan. Istilah-istilah dalam sistem kekerabatan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 6. Istilah-Istilah Kekerabatan Masyarakat suku Sasak

No	Ke atas	No.	Ke bawah
1.	<i>Ego</i>	1.	<i>Ego</i>
2.	<i>Amaq/Inaq</i>	2.	Anak
3.	<i>Papuk</i> (kakek)	3.	<i>Papu/Bai</i> (cucu)
4.	<i>Baloq</i> (orang tua <i>Papuk</i>)	4.	<i>Baloq</i> (anak dari <i>Bai</i>)
5.	<i>Tata</i> (orang tua <i>Baloq</i>)	5.	<i>Tata</i> (anak <i>Baloq</i>)
6.	<i>Toker</i> (orang tua <i>Tata</i>)	6.	<i>Toker</i> (anak dari <i>Tata</i>)
7.	<i>Goneng/Gonder</i> (orang tua <i>Toker</i>)	7.	<i>Goneng/Gonder</i> (anak <i>Toker</i>)
8.	<i>Toker</i> (orang tua <i>Tata</i>)	8.	<i>Toker</i> (anak dari <i>Tata</i>)
9.	<i>Kelateq</i> (orang tua <i>Keleteq</i>)	9.	<i>Kelateq</i> (anak <i>Keleteq</i>)
10	<i>Gantung Siwur</i> (orang tua <i>Kelateq</i>)	10.	<i>Gantung</i> (anak <i>Keleteq</i>)
11	<i>Wareng</i> (orang tua <i>Gantung Siwur</i>)	11.	<i>Wareng</i> (anak <i>Gantung Siwur</i>)

Sumber: Syakur, 2006

Istilah kekerabatan mulai dari *ego* ke atas memiliki orang tua yang disebut *amaq* (ayah) dan *inaq* (ibu). Bapak atau ibu yang memiliki orang tua pada golongan *jajar karang* disebut dengan *papug*, sedangkan di kalangan para bangsawan dipergunakan istilah *niniq* untuk yang pria, dan *niniq bini* untuk wanita. Untuk orang tua *papug* disebut dan dipanggil oleh *ego* dengan sebutan atau sapaan *baloq*, baik yang laki-laki maupun perempuan. Istilah-istilah yang sama adalah orang tua *baloq* adalah *tata*; orang tua *tata* adalah *toker*; orang tua *toker* adalah *goneng*; orang tua *goneng* adalah *kelotaq*; orang tua *kelotaq* adalah *kelateq*; orang tua *kelateq* adalah *gantug siwur*; dan terakhir orang tua *gantug siwur* adalah *wareng* (Syakur, 2006:222).

Sebaliknya untuk istilah kekerabatan mulai dari *ego* ke bawah dapat dikemukakan sebagai berikut. Putra bagi *ego*, baik laki-laki maupun perempuan disebut anak dengan sapaan *kanak* bagi yang masih kecil dan *taruna* atau *dedara* bagi yang sudah menginjak dewasa. Putra dari anak *ego* yaitu cucu dari ayah dan ibu si *ego* disebut *bai*, baik yang laki-laki ataupun perempuan pada golongan nonbangsawan. Sedangkan bagi para bangsawan putra dan anak *ego* tersebut disebut *niniq*. Anak dari *bai*, yang laki-laki atau perempuan baik di kalangan golongan bangsawan maupun nonbangsawan disebut *baloq* (Kayun, 1986:33).

Secara horizontal istilah-istilah kekerabatan masyarakat suku Sasak sebagai berikut. Hubungan kekerabatan antara *ego* dengan saudara-saudaranya, baik yang laki-laki maupun perempuan disebut *semeton*. *Semeton* yang lebih kecil (muda) dari *ego* disebut adik dengan sapaan *adik* pula. Sedangkan *semeton* yang lebih besar atau tua dari *ego* disebut kakak dengan sapaan *kakak* pula. Saudara tertua dari saudara laki-laki disebut *tekaka*, sedangkan yang terkecil disebut *teradi*. Dalam kaitannya *ego* putra-putra saudara ayah dan ibu, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan

disebut *pisaq* (misan). *Pisaq* (misan) dari saudara laki-laki ayah dinamakan *pisaq sodet*. Hubungan secara horizontal sejajar dari *ego* berlaku pada masyarakat suku Sasak (Kayun, 1986:34).

Sistem pemerintahan yang dipergunakan pada awalnya cukup rumit untuk diterapkan mengingat sistem yang dipergunakan belum jelas struktur serta fungsinya dalam aktivitas sehari-hari. Untuk mengetahui hal itu diperlukan suatu pendekatan melalui beberapa referensi tentang keberadaan kerajaan yang pernah berkembang di Pulau Lombok. Kerajaan-kerajaan tersebut di antaranya: Kerajaan Pejanggik, Kerajaan Selaparang, Kerajaan Parwa, dan Kerajaan Bayan. Dalam struktur model serta pola pemerintahan kerajaan, kekuasaan tertinggi berada pada raja. Raja dibantu oleh *Patih*, *Mangkubumi*, *Dipati*, *Rangga*, *Kanuruhan*, *Tumenggung*, *Jaka*, dan *Demung* yang masing-masing akan mengurus suatu departemen-departemen tertentu (Syakur, 2006:213).

Seorang *Dipati* dalam bidang pertahanan dan keamanan pada masa itu dibantu oleh seorang yang disebut *Jaka*. Pada bidang perbekalan dan persenjataan dipimpin oleh seorang *Rangga*, sedangkan *Kanuruhan* memimpin masalah terkait dengan bidang keuangan kerajaan dan tenaga kerja. *Tumenggung* memimpin urusan perbaikan dan rehabilitasi gedung-gedung. *Demung* memimpin urusan wilayah kademungan, yaitu wilayah yang merupakan bagian dari kerajaan, sedangkan *Nyaka* (Kepala Desa) bertugas di wilayah Desa (*kenyakaaan*) yang merupakan bagian dari kademungan pada daerah yang dipimpinnya (Waluyo, 1986:20).

Dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan Sasak sekitar abad ke-17 dan sesudah jatuhnya Lombok ke tangan Raja Karangasem, Bali, maka struktur pemerintahan mengalami perubahan termasuk istilah-istilah yang dipergunakan dalam aktivitas sehari-hari. Kedudukan yang tertinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan

adalah raja dibantu *Punggawa* (Menteri). Wilayah kerajaan dibagi dalam beberapa wilayah yang setiap wilayahnya dipimpin oleh seorang *Perkanggo* yang berasal dari suku Sasak. *Perkanggo* dikoordinasi oleh *Pergusti*. *Perkanggo* membawahi *Perbekel* (Kepala Desa). Pada masa pemerintahan Raja Karangasem di Lombok, kondisi pemerintahan tidak stabil, selalu terjadi beberapa pemberontakan-pemberontakan seperti pemberontakan sebagai akibat *congah Praya*, *congah Sakra*, dan lain-lainnya. Pergolakan tersebut diakhiri setelah kedatangan ekspedisi Hindia Belanda pada 1894 yang pada akhirnya berkuasa di Lombok (Waluyo, 1986:21).

Dengan berkuasanya pemerintah Hindia Belanda, pusat pemerintahan Lombok terletak di wilayah Singaraja, Bali. Pada waktu itu Lombok dibagi menjadi tiga *onder afdeeling*, yang terdiri dari wilayah Lombok Barat yang beribukota di Mataram, Lombok Tengah beribukota di Praya, dan Lombok Timur dengan ibukota Selong. Setiap *onder afdeeling* dipimpin oleh seorang *controleur*. Masing-masing *onder afdeeling* terdiri dari beberapa kedistrikan yang dipimpin oleh distrik, dan setiap kedistrikan terdiri dari beberapa desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan desa terdiri dari beberapa dusun atau dasan yang dipimpin oleh seorang *Kelias* (Syakur, 2006:214—215).

Kearifan lokal kaitannya dengan sistem mata pencaharian adalah dalam menggunakan beberapa konsep mata pencaharian terkait dengan ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik adalah *The Labour Force Concept* yang telah ditetapkan oleh *International Labor Organization* (ILO). Dengan demikian konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan. Kelompok tersebut adalah *Angkatan Kerja* dan *Bukan Angkatan Kerja* (Biro Pusat Statistik, 2007:vii—viii).

Angkatan kerja adalah penduduk usia lima belas tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia lima belas tahun ke atas yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan tugas lainnya.

Dengan mencermati pernyataan di atas, maka yang dianggap bekerja adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu.

Jumlah penduduk yang bekerja pada masyarakat di Pulau Lombok pada umumnya ditentukan adanya lapangan kerja yang ada. Dengan melihat lapangan kerja yang meliputi: pertanian, industri, perdagangan, jasa pelayanan, dan yang lainnya akan menentukan terserapnya jumlah tenaga kerja dari suku Sasak Lombok. Untuk mengetahui jumlah penduduk Lombok yang bekerja menurut Kabupaten/Kota dan lapangan usaha di Lombok, Nusa Tenggara Barat dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha di Lombok, Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/ Kota	Pertanian (orang)	Industri (orang)	Perdagangan (orang)	Jasa (orang)	Lainnya (orang)	Jumlah (orang)
Lombok Barat	310.382	119.415	151.260	79.611	143.299	796.107
Lombok Tengah	465.521	99.755	116.380	498.879	94.441	831.286
Lombok Timur	570.408	116.193	179.573	73.941	126.757	1.056.312
Kota Mataram	14.246	24.429	135.334	106.842	74.790	356.141
Total	1.360.557	359.792	582.547	759.273	439.287	3.039.846

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Biro Pusat Statistik, Provinsi NTB.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja di Pulau Lombok adalah pada sektor pertanian (sebagai petani tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan perburuan), industri (sebagai pengrajin, pematung, penjahit), perdagangan (sebagai pedagang), jasa (sebagai pengelola pariwisata, hotel, dan biro perjalanan), dan lainnya (pengangguran, sekolah, dan mengurus rumah tangga) dengan jumlah total seluruhnya berjumlah 3.039.846 orang. Distribusi jumlah penduduk tersebut adalah sebagai berikut. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian di Kabupaten Lombok Barat berjumlah 310.382 orang, Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 465.521 orang, Kabupaten Lombok Timur berjumlah 14.246 orang. Sehingga untuk tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian seluruhnya berjumlah 1.360.557 orang. Pada sektor industri dengan jumlah 359.792 orang terdiri dari Kabupaten Lombok Barat 119.415 orang, Kabupaten Lombok Tengah 99.755 orang, Kabupaten Lombok Timur 116.193 orang, dan Kota Mataram berjumlah 24.429 orang.

Jumlah masyarakat Lombok yang bekerja di bidang perdagangan adalah 582.547 orang, terdiri dari Kabupaten Lombok Barat 151.260 orang, Kabupaten Lombok Tengah 116.380 orang, Kabupaten Lombok Timur 179.573 orang, dan Kota Mataram 135.334 orang. Pada sektor jasa jumlah masyarakat Lombok yang bekerja adalah 759.273 orang. Terdiri dari Kabupaten Lombok Barat 79.611 orang, Kabupaten Lombok Tengah 498.879 orang, Kabupaten Lombok Timur 73.941 orang, dan Kota Mataram 106.842 orang. Untuk yang lainnya diketahui di Kabupaten Lombok Barat 143.299 orang, Kabupaten Lombok Tengah 94.441 orang, Kabupaten Lombok Timur 126.757 orang, dan Kota Mataram 74.790 orang.

Dengan mengetahui jumlah penduduk di atas yang bekerja di masing-masing sektor bila dipersentasekan akan ditunjukkan dalam tabel persentase berikut.

Tabel 8. Persentase Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha di Lombok Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/ Kota	Pertanian (orang)	Industri (orang)	Perdagangan (orang)	Jasa (orang)	Lainnya (orang)	Jumlah (orang)
Lombok Barat	38,6	14,6	19,1	9,9	17,8	100,0
Lombok Tengah	56,5	11,7	14,1	6,4	11,3	100,0
Lombok Timur	53,5	10,5	16,8	7,1	12,1	100,0
Kota Mataram	3,8	7,4	37,7	30,2	21	100,0
Lombok	38,1	11,1	21,8	13,4	15,6	100,0

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Biro Pusat Statistik Provinsi NTB.

Dari persentase di atas menunjukkan bahwa masyarakat Lombok terbanyak adalah di sektor pertanian dengan rata-rata 38,1%. Urutan-urutan tersebut ditunjukkan pada Kabupaten Lombok Tengah sebesar 56,5%, Kabupaten Lombok Timur sebesar 53,5%, Kabupaten Lombok Barat sebesar 38,6% dan Kota Mataram 3,8%. Rata-rata persentase masyarakat Lombok yang bekerja pada sektor industri adalah 11,1% yang meliputi: Kabupaten Lombok Barat sebesar 14,6%, Kabupaten Lombok Tengah sebesar 11,7%, Kabupaten Lombok Timur 10,5%, dan Kota Mataram sebesar 7,4%.

Dalam sektor perdagangan rata-rata penduduk Lombok bekerja pada sektor ini adalah 21,8% yang terdiri dari Kota Mataram sebanyak 37,7%, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 19,1%, Kabupaten Lombok Timur sebesar 16,8%, dan Kabupaten Lombok Tengah sebesar 14,1%. Pada sektor jasa dengan rata-rata 13,4% dengan distribusi sebaran pada Kota Mataram sebesar 30,2%,

Kabupaten Lombok Barat sebesar 9,9%, Kabupaten Lombok Timur sebesar 7,1%, dan Kabupaten Lombok Tengah sebesar 6,4%.

Rata-rata yang lainnya tentang jumlah penduduk pada masyarakat Lombok menurut survei Biro Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi pengangguran, sekolah, dan mengurus rumah tangga dengan rata-rata 15,6% dengan sebaran sebagai berikut. Kota Mataram sebesar 21%, Kabupaten Lombok Barat sebesar 17,8%, Kabupaten Lombok Timur sebesar 12,1% dan Kabupaten Lombok Tengah sebesar 11,3%.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk dapat berinteraksi serta mempertahankan eksistensi serta kesinambungan manusia itu sendiri. Upaya untuk mencerdaskan bangsa melalui suatu pendidikan merupakan bagian integral umat manusia dalam mengisi pembangunan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Pembangunan tidak hanya selalu mengandalkan sumber daya alam. Akan tetapi, dibutuhkan sumber daya manusia yang pada prinsipnya merupakan suatu modal pembangunan menuju masyarakat yang maju, produktif, dan profesional.

Pada zaman dahulu pendidikan di Lombok dilakukan secara turun-temurun dan tradisional. Seorang tokoh agama atau dukun mengajarkan kepada putra putrinya tentang ilmu keagamaan serta ilmu perdukunan, sehingga pada akhirnya putra putri mereka akan mengikuti jejak dan perjalanan orang tuanya dalam memperoleh pengalaman dan pengetahuan. Jadi dalam hal ini terjadi *transformation knowledge method* dengan mempergunakan metode *persuasif edukatif*. Cara ini tidak lama bertahan, ketika ada pengaruh eksternal masuk dalam wilayah ini, metode ini lama-kelamaan pudar sebagai akibat adanya pengaruh luar yang berkolaborasi dengan budaya baru yang membawa perubahan

terhadap perilaku masyarakatnya. Dengan demikian, secara perlahan masyarakat suku Sasak akan merubah sistem, pola, gaya hidup, serta perilaku seiring dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Olahraga dapat diuraikan jumlah sekolah dan tingkat pendidikan di Pulau Lombok. Data tersebut divisualisasikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9. Banyak Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan

No.	Kabupaten/Kota	TK (buah)	SD (buah)	SMP (buah)	SMA/SMK (buah)	PT (buah)
1.	Lombok Barat	85	457	55	41	5
2.	Lombok Tengah	209	570	75	48	4
3.	Lombok Timur	169	657	75	61	6
4.	Kota Mataram	43	79	34	37	8
	T o t a l	506	1763	239	187	23

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB.

Dari sebaran tabel di atas menunjukkan bahwa total Perguruan Tinggi di Pulau Lombok sebanyak 23 buah. Untuk perguruan tinggi terbanyak di Pulau Lombok terdapat di wilayah Kota Mataram yaitu 8 buah. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Lombok Timur sebanyak 6 buah, Lombok Barat 55 buah dan Lombok Tengah sebanyak 4 buah. Total sekolah SMA/SMK di Pulau Lombok sebanyak 187 buah dan jumlah terbanyak SMA/SMK di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 61 buah. Kemudian diikuti Lombok Tengah sebanyak 48 buah, Lombok Barat sebanyak 41 buah dan terendah di Kota Mataram sebanyak 37 buah. Jumlah keseluruhan sekolah SMP di Pulau Lombok sebanyak 239 buah dan sekolah SMP

tertinggi di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah masing-masing sebanyak 75 buah, kemudian diikuti Kabupaten Lombok Barat sebanyak 55 buah dan Kota Mataram sebanyak 34 buah. Jumlah Sekolah Dasar di Pulau Lombok adalah 1.763 buah dengan jumlah tertinggi di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 657 buah, Kabupaten Lombok Tengah 570 buah, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 457, dan terendah di Kota Mataram sebanyak 79 buah. Sedangkan jumlah Taman Kanak-kanak secara keseluruhan di Pulau Lombok berjumlah 506 buah. Dari jumlah tersebut terbanyak berada di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 209 buah, diikuti Kabupaten Lombok Timur sebanyak 169 buah, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 85 buah, dan terendah 43 buah di Kota Mataram.

Pendidikan sangat menentukan tingkat kemajuan serta perkembangan masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dengan memiliki pendidikan diharapkan masyarakatnya semakin cerdas serta memiliki kompetensi dalam menentukan kualifikasi profesionalnya untuk bersaing di dunia kerja. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap masa depan kehidupan keluarga sehingga dapat hidup bertahan menjalani kehidupannya. Pendidikan merupakan salah satu barometer kemajuan masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat dalam ikut ambil bagian dalam pembangunan bangsa. Adapun persentase pendidikan menurut Kabupaten/Kota dapat ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 10. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tinggi

Kabupaten/ Kota	Tidak/ belum pernah sekolah	Tidak/ belum tamat SD	SD	SMP	SMA	Diploma	PT	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Lombok Barat	21,43	22,62	27,37	15,16	10,48	1,41	1,54	100,00
Lombok Tengah	24,02	22,83	25,33	13,92	10,98	1,00	1,91	100,00
Lombok Timur	14,34	24,75	27,17	17,41	13,24	1,16	1,92	100,00
Kota Mataram	9,34	13,95	20,55	15,32	29,53	3,15	8,17	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa masih ada masyarakat suku Sasak yang tidak bersekolah untuk meningkatkan taraf serta kesejahteraan hidupnya. Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam meningkatkan eksistensi manusia dalam ikut memberikan kontribusi terhadap kemajuan serta perkembangan zaman dalam mengisi kemerdekaan. Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa persentase tertinggi masyarakat yang tidak bersekolah di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 24,02%, kemudian diikuti oleh Kabupaten Lombok Barat sebanyak 21,43%, Kabupaten Lombok Timur 14, 34%, dan Kota Mataram sebanyak 9,34%.

Pada masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok masih ada yang tidak menyelesaikan pendidikan sampai pendidikan Sekolah Dasar. Hal ini disebabkan kemampuan serta pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan serta pendidikan masih kurang. Dengan mencermati tabel di atas menunjukkan bahwa persentase jumlah masyarakat suku Sasak yang tidak tamat Sekolah Dasar tertinggi

di Kabupaten Lombok Timur sebesar 24,75%, kemudian diikuti Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 22,83%, Kabupaten Lombok Barat 22,62%, dan terendah Kota Mataram yaitu sebesar 13,95%.

Dengan mencermati sebaran data di atas menunjukkan bahwa persentase pendidikan tinggi yang ditamatkan berada pada posisi teratas adalah di Kota Mataram yaitu untuk Perguruan Tinggi sebesar 8,17%, Diploma sebesar 3,15%, dan SMA sebesar 29,53%. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Lombok Timur untuk Perguruan Tinggi sebanyak 1,92%, Diploma 1,16%, dan SMA sebesar 13,24%. Untuk Kabupaten Lombok Tengah persentase Perguruan Tinggi sebanyak 1,91%, Diploma sebanyak 1,00%, dan SMA sebanyak 10,98%. Kemudian untuk Kabupaten Lombok Barat persentase Perguruan Tinggi 1,54%, Diploma sebanyak 1,41%, dan SMA sebanyak 10,48%.

Kearifan lokal kaitannya dengan sistem kesenian, Koentjaraningrat (2002:114—115) menyatakan bahwa dalam kebudayaan ada upaya-upaya pengembangan aktivitas dan kreativitas masyarakat dalam praktik-praktiknya yang di dalamnya terdapat nilai-nilai seni. Dalam praktik-praktik kebudayaan masyarakat suku Sasak banyak menggunakan kesenian dalam melengkapi aktivitas kehidupannya sehingga memberikan corak serta warna pada setiap kegiatan adat dan keagamaannya. Kesenian dapat ditampilkan pada acara ritual maupun acara adat masyarakat suku Sasak dalam bentuk tarian-tarian yang pada umumnya dipentaskan dalam rangkaian kegiatan keagamaan serta acara selamatannya pada waktu perkawinan dan acara lainnya. Misalnya *Tari Baris Beteq*, *Tari Gendang Beleq*, *Tari Perisian* maupun tarian lainnya yang selalu dipersembahkan atau dipertontonkan ketika mengiringi acara terkait dengan aktivitas adat masyarakat suku Sasak Lombok.

Dengan adanya kesenian memberikan dorongan, motivasi, serta fibrasi pada masyarakat suku Sasak dalam melaksanakan kegiatan adat maupun ritualnya. Dengan demikian, seni dapat memberikan suatu semangat hidup maupun rangsangan terhadap manusia yang memiliki keyakinan serta kepercayaan untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diinginkan.

Eksistensi seni dapat dipertahankan. Mengingat seni merupakan warisan nenek moyang yang memiliki petuah serta nilai budaya yang perlu dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya. Pelestarian nilai, norma, perilaku yang telah mengakar serta menyatu dalam kehidupan masyarakat suku Sasak merupakan bagian dari kehidupan mereka yang patut dihargai serta dihormati sebagai wujud dari bentuk apresiasi dan kreativitas mereka sebagai makhluk yang berbudaya.

Dalam kegiatan ritual selalu terkandung nilai seni yang sudah tentu memiliki nilai estetika. Seorang filsuf Jerman Baumgarten (1762) yang pertama kali menunjukkan cabang filsafat yang berurusan dengan seni dan keindahan (Hartoko, 1986:15). Ilmu estetika adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan, mempelajari semua aspek dari apa yang disebut dengan keindahan (Djelantik, 1999:9). Bila estetika mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan, maka untuk mengungkapkan suatu karya atau benda budaya diperlukan suatu teori umum (*general theory*) untuk menjelaskan apa sesungguhnya keindahan tersebut, artinya barometer teoretis yang berlaku untuk setiap karya seni atau segala sesuatu yang disebut indah.

Semua peristiwa seni atau kesenian pada hakikatnya mengandung tiga aspek yang mendasar meliputi: 1) wujud atau rupa (*appearance*); 2) bobot atau isi (*content/substance*); dan 3)

penampilan atau penyajian (*presentation*). Wujud menyangkut bentuk (*form*) dan susunan atau struktur. Bobot mempunyai tiga aspek, yaitu suasana (*mood*), gagasan (*idea*) dan pesan (*message*), sedangkan penampilan menyangkut tiga unsur, yaitu bakat (*tallent*), keterampilan (*skill*) dan sarana atau media (Djelantik, 1999:17—18).

Dalam pengaruh pandangan kosmologi implementasi kesenian sebagai media dalam memberikan motivasi dan inspirasi kehidupan masyarakat penganut *Wetu Telu* suku Sasak diharapkan menjadi lebih luwes, toleran, dan akomodatif namun tidak bersikap oportunistis dalam berbagai praktik keagamaan. Praktik keagamaan ini sebagai suatu kearifan lokal ketika beradaptasi dengan alam, lingkungan sosial, sikap berkesenian, maupun dalam mengambil sikap politik dalam kebijakan politis ketika mereka berhadapan dengan sebuah kekuatan dan kekuasaan (Bhaedowi, 2008:44).

Pada awalnya kebutuhan manusia bercorak spiritual melalui kegiatan seni. Hal senada diungkapkan oleh Edi Sedyawati (1981:52) bahwa seni berfungsi sebagai berikut. 1) memanggil kekuatan gaib; 2) menjemput roh yang halus; 3) menjemput roh untuk hadir di tempat pemujaan; 4) memperingati nenek moyang; 5) perlengkapan upacara sehubungan dengan saat-saat tertentu dalam perputaran waktu tertentu; 6) perlengkapan upacara dengan tingkat-tingkat hidup manusia; dan 7) sebagai ungkapan untuk mendatangkan kegembiraan bagi para pelaku seni.

Pada zaman primitif kepercayaan terhadap adanya roh halus masih tetap diyakini oleh masyarakat suku Sasak. Kata *animisme* berasal dari kata *anima*, *animae*, dari bahasa Latin. Dalam konsep psikologi dan biologi, kata *animisme* adalah suatu pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa pikiran atau jiwa merupakan suatu elemen immaterial yang dapat bekerja sama dalam suatu tubuh melalui otak dan sistem syaraf. Sementara itu dalam filsafat,

animisme merupakan suatu teori yang dapat menjelaskan bahwa segala objek alam yang bernyawa atau berjiwa serta memiliki *spirit* dan kehidupan mental serta fisik bersumber dari nyawa, jiwa, atau *spirit*. Selanjutnya *animisme* dalam istilah antropologi adalah kepercayaan bahwa semua benda alam di dunia itu berjiwa (memiliki roh), sehingga akan memiliki kesadaran dan kepribadian. Roh-roh tersebut harus dapat dijaga dan tidak boleh dipermainkan.

Manusia yang lahir berasal dari arwah yang telah meninggal dunia. Kepercayaan *animisme* ini berkembang dikalangan Suku Sasak primitif di Pulau Lombok. Pemujaan terhadap roh nenek moyang berdasarkan atas keyakinan mereka karena dianggap dapat memberikan inspirasi serta motivasi hidup serta memberikan kesejahteraan bagi semua manusia yang hidup di dunia. Mereka memuja roh sebagai sesuatu yang perlu dipuja dan dianggap selalu berhubungan dengan roh-roh nenek moyang yang dipuja seumur hidup. Dengan dasar itulah maka jenazah para leluhur yang telah meninggal dunia pada umumnya dimakamkan tidak jauh dari tempat tinggal mereka atau di kampungnya sendiri dengan maksud roh-roh nenek moyangnya selalu dekat dengan kehidupan mereka.

Roh-roh yang berkeliaran di alam meskipun telah berpisah dengan jasad pemiliknya akan dipanggil dan diharapkan dapat menolong musibah atau bencana yang melanda masyarakatnya sehingga dapat menolak serta mengusir dari tempat tinggal mereka. Roh-roh tersebut dapat membantu keluar dari mara bahaya yang menimpa keluarga serta dapat memberikan anugerah pada kerabat serta keluarganya agar kehidupan mereka menjadi sejahtera, aman, tenteram, dan damai. Pada umumnya roh-roh bersemayam di gunung, perbukitan, mandir, kuil, candi, termasuk pada tubuh manusia yang masih hidup.

Pada dasarnya Suku Sasak primitif masih menganggap bahwa di sekeliling tempat hidupnya atau di alam semesta masih tetap ada roh orang meninggal dunia. Dengan demikian kepercayaan-kepercayaan tersebut selalu tetap menyatu pada kegiatan-kegiatan upacara atau adat istiadat yang berlangsung ketika menghadapi upacara kematian.

Dengan beragamnya agama yang mewarnai masyarakat Lombok, maka diperlukan suatu tempat ibadah dalam rangka memberikan kesempatan untuk menghubungkan umatnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tempat-tempat ibadah tersebut meliputi: *Masjid, Gereja, Pura, dan Wihara*. Adapun banyaknya tempat peribadatan yang ada di Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 11. Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Masjid	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Wihara	Pura
1.	Lombok Barat	1.458	0	0	32	200
2.	Lombok Tengah	1.149	1	0	0	14
3.	Lombok Timur	1.111	2	1	0	4
4.	Kota Mataram	212	9	2	10	131
	T o t a l	3.930	12	3	42	349

Sumber: Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel di atas menunjukkan bahwa kehidupan beragama di Pulau Lombok memberikan corak serta warna tersendiri pada masyarakatnya. Hal ini ditunjukkan dalam tabel di atas bahwa penganut umat Islam di Pulau Lombok terbanyak yang ditunjukkan dengan jumlah masjid sebanyak 3.930 buah yang tersebar di

kabupaten dan kota. Sebaran terbanyak di Kabupaten Lombok Barat berjumlah 1.458 buah, diikuti Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 1.149 buah, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1.111 buah, dan terendah di Kota Mataram sebanyak 212 buah.

Jumlah total pura sebagai tempat ibadah masyarakat Hindu di Pulau Lombok adalah 349 buah. Sebaran tempat ibadah umat Hindu terbanyak di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 200 buah, kemudian diikuti Kota Mataram sebanyak 131 buah, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 14 buah, dan terendah di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 4 buah.

Untuk wihara sebagai tempat ibadah umat Buddha yang ada di wilayah Pulau Lombok total berjumlah 42 buah. Jumlah terbanyak terdapat di wilayah Kabupaten Lombok Barat sebanyak 32 buah dan 10 buah di Kota Mataram. Sedangkan di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur tidak terdapat wihara.

Total Gereja Protestan di Pulau Lombok berjumlah 12 buah. Jumlah terbanyak terdapat di wilayah Kota Mataram sebanyak 9 buah, diikuti Kabupaten Lombok Timur sebanyak 2 buah, dan Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 1 buah. Sedangkan total untuk Gereja Katolik berjumlah 3 buah yang terdapat di Kota Mataram sebanyak 2 buah dan Kabupaten Lombok Timur 1 buah.

Dengan adanya tempat ibadah yang ada akan berkorelasi dengan jumlah umat beragama yang berdomisili di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tempat ibadah merupakan suatu tempat yang sangat penting untuk keperluan masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama dalam melaksanakan ibadah sebagai rasa bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengetahui jumlah tempat ibadah akan diketahui sebaran umat yang melaksanakan kewajiban ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Dengan pendidikan antikorupsi maka generasi penerus bangsa akan lebih awal memahami masalah korupsi dan tidak melakukan kejahatan seperti apa yang dilakukan generasi-generasi sebelumnya. Pendidikan antikorupsi tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga menentukan pola pikir, serta tingkah laku masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip hidup yang baik.

Masalah pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum saja. Dunia pendidikan diharapkan dapat berperan dalam pencegahan korupsi sejak dini. Pendidikan sebagai wadah untuk membentuk generasi penerus bangsa menjadi wadah yang efektif dalam rangka pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum dan memberikan ceramah atau seminar antikorupsi. Agar tidak terjadi korupsi di Indonesia, perlu dicari sampai dari akar masalahnya. Dengan membekali pendidikan antikorupsi yang cukup akan memberikan perlindungan kepada generasi penerus bangsa dari maraknya tindak korupsi.

Berkaitan dengan uraian di atas praktik korupsi maupun upaya penanggulangannya dalam bentuk memberi pemahaman tentang pendidikan antikorupsi tergambar dengan jelas dalam beberapa ungkapan-ungkapan tradisi lokal masyarakat suku Sasak itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan beberapa ungkapan tradisional masyarakat suku Sasak yang mengandung makna kearifan lokal kaitannya dengan pendidikan antikorupsi, seperti: 1) *Patut Patuh Pacu*; 2) *Aiq Meneng, Tunjung Tilah, empak Bau*; 3). *Tindih Maliq Merang*; 4) *Nenggale lek Bongkor Batur*; 5) *Dendeqte Ngelet/Ngelamit Batur*; 6) *Maraq Begang leq Lumbung* ; 7) *Maraq Meong Ambuk Pindang*; 8) *Dendeqte Gawek Maraq Cupak Gerantang*; 9) *Bagus te Gawek Bagus te Dait, Lenge te Gawek Lenge te Dait*; 10) *Bedait Kanca Pada Bedeng Gigi*, 11).

Maraq Penyu Beteloq leq Darat, Meta Kakenan leq Tenga Segara, 12). Maraq Sifat Bebalog, Ndeqna Bau Caplak Siq Todokna, Pemecut Elongna Remuk Tolang Daengta.

Arti dari masing-masing ungkapan tersebut akan dijabarkan secara ringkas di bawah ini:

1. *Patut Patuh Pacu*

Sesuai wawancara dengan Bapak H. Jalaludin Arzaki (tanggal 1 Agustus 2014) bahwa kata *patut* berarti benar, *patuh* artinya turut atau sesuai dengan aturan, dan *pacu* berarti sungguh-sungguh. Jadi, ungkapan *patut patut pacu* mengandung pengertian bahwa segala sesuatu sikap, perbuatan atau perilaku yang dilakukan selalu berdasarkan aturan yang berlaku di masyarakat. Adanya etika sopan santun yang dilandasi tata susila yang tinggi yang berorientasi pada kebenaran dengan mengedepankan rasa seperjuangan serta rasa kebersamaan akan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan rasa kebersamaan dan persaudaraan yang tinggi yang dilandasi dengan norma-norma kebenaran akan tercipta suatu kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat menuju kesejahteraan lahir dan batin.

2. *Aiq Meneng Tujung Tilah Empaq Bau*

Aiq berarti air, *meneng* berarti jernih, *tujung* berarti teratai, *tilah* berarti utuh, *empaqa* berarti ikan, dan *bau* berarti tertangkap. Jadi secara keseluruhan ungkapan tersebut berarti air tetap jernih, bunga teratai tetap utuh, ikan tertangkap. Ungkapan mengumpamakan bagai mengambil ikan di dalam air yang di atasnya terdapat bunga teratai. Jika cara mengambilnya tidak hati-hati dan tidak dengan perhitungan, tentu bunga teratai akan rusak, air akan menjadi keruh, dan kemungkinan juga tidak mendapat

ikan. Ungkapan ini mengandung ajaran agar jika kita dihadapkan oleh suatu masalah, apabila cukup pelik, harus hati-hati dan penuh perhitungan. Sehingga dapat dicapai pemecahan/penyelesaian yang saling menguntungkan. Kalau itu menyangkut beberapa orang, harus diusahakan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Soerjono Soekamto yang menjelaskan bahwa inti dari nilai dari penegakan hukum adalah dapat mengejutkan suatu sikap terhadap tindak yang patuh terhadap perilaku sikap untuk mempertahankan serta menciptakan, dan memelihara kedamaian dalam masyarakat sehingga semua dapat berjalan baik, lancar, dan sukses.

3. *Tindih Maliq Merang*

Sesuai dengan (wawancara Bapak Supardi 4 Agustus 2014) menjelaskan kata *tindih* berarti taat/patut, *maliq* berarti pantangan/sangsi dan *merang* berarti garang. Dengan demikian, makna dari *tindih maliq merang* adalah suatu perbuatan selektif yang berlandaskan etika moral dalam berbicara, berperilaku, dan berfikir sesuai dengan tata krama kemanusiaan sehingga tidak menjadi manusia yang *tulah manuh* terhadap ajaran leluhur. Hal tersebut akan berdampak pada karma bagi orang yang melakukan. Hal yang diungkapkan informan bahwa *tindih maliq merang*, merupakan suatu ajaran leluhur yang memiliki hakikat yang tinggi terhadap keberadaan manusia di muka bumi. Dengan berpedoman pada ajaran leluhur di samping penerapan ajaran agama akan memberikan semangat fibrasi yang kuat terhadap keberadaan jiwa sehingga prinsip tersebut tetap dipegang dalam menjalankan ajaran leluhur dan agama untuk menjadi manusia yang utuh, berbudi pekerti luhur, dan bijaksana.

4. *Nenggale lek Bongkor Batur*

Sesuai dengan penjelasan Mamik Jagat (wawancara 4 Agustus 2014) menjelaskan bahwa *nenggala* artinya bajak, *bongkor pundak* atau tenaga, sedangkan *batur* artinya teman. Dengan demikian *nenggala lek bongkor batur* artinya suka memanfaatkan jerih payah/tenaga orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi diri sendiri. Penjelasan informan mengindikasikan bahwa sesungguhnya perilaku tersebut telah merugikan orang lain dan bertentangan dengan hak dan kewajiban manusia. Dalam melaksanakan kewajiban setiap manusia sepatutnya berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap jerih payah orang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerasan terhadap pengorbanan orang lain akan berimplikasi terhadap penderitaan dan kesengsaraan terhadap umat manusia.

5. *Dendeqte Ngelelet/Ngelamit Batur*

Penjelasan di atas disampaikan Mamik Jagat (wawancara 4 Agustus 2014) menjelaskan kata *Dendeqte* artinya jangan, *Ngelelet/Ngelamit* artinya perlakuan curang (mengurangi secara diam-diam dari standar ukuran yang telah ditentukan) dan *batur* artinya teman (orang lain). Ini merupakan karakter individu yang memiliki sifat loba atau serakah yang menyebabkan perasaan orang lain tersakiti. *Ngelamit* adalah suatu cara seseorang melakukan kecurangan dengan memberdayakan lawan bisnisnya atau orang lain dalam hal ekonomi bisnis baik kontan maupun menimbun laba. Sedangkan *ngelet* biasanya dilakukan pada ukuran volume timbangan yang ditakar tidak sesuai dengan volume berat sebenarnya. Hal ini membuktikan adanya suatu perilaku

korupsi secara tersembunyi menggunakan teknik kecurangan pada skala timbangan yang digunakan yang sudah tentu dapat merugikan orang lain secara ekonomi.

6. *Maraq Begang leq Lumbung*

Mamik Yulendra (wawancara 11 Agustus 2014) menjelaskan bahwa kata *maraq* artinya seperti, *Begang* artinya tikus, dan *leq lumbung* artinya di Lumbung. Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya kecurangan atau pemerasan yang dilakukan seseorang/penguasa terhadap orang lain atau masyarakat dalam suatu kelompok organisasi atau kelompok masyarakat. Adanya kesalahan dalam menggunakan kekuasaan dan tanggungjawab akan memberikan dampak terhadap keutuhan organisasi dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, kata *maraq begang lek lumbung* tersebut menyiratkan bahwa adanya tikus (binatang pengerat) yang selalu memeras perekonomian masyarakat di dalam suatu organisasi atau kelompok yang dalam waktu lama menyebabkan perusahaan bangkrut atau rugi bahkan akan gulung tikar. Dalam konteks korupsi, hal ini membuktikan adanya korupsi terselubung yang dapat merugikan organisasi, perusahaan, bahkan negara.

7. *Maraq Meong Ambuk Pindang*

Bapak Sahnun (wawancara, 8 Agustus 2014) menjelaskan kata *maraq* yang artinya seperti, *meong* artinya kucing, dan *pindang* artinya ikan. Ungkapan ini menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan sering memberdayakan seperangkat usaha atau struktur serta bawahannya untuk mengais atau memeras baik itu dalam pekerjaan maupun dalam hal keuangan. Mencium atau mengetahui kondisi keuangan cepat merangsang untuk merancang strategi bahkan memanfaatkan kesempatan melalui teman dan

struktur untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari hasil pekerjaan bawahan atau strukturnya.

8. *Dendeqte Gawek Maraꦑ Cupak Gerantang*

Dendeqte artinya jangan, *Gawek* berarti perbuatan, *Maraꦑ* artinya seperti, *Cupak* yang dianggap manusia loba, rakus, pembual, dan *Gerantang* adalah orang yang kalem, jujur dan tekun. Dalam adegan cerita *cupak gerantang* bahwa si cupak selalu ingin menguasai, bahkan congkak terhadap gerantang. Sifat rakus serta loba yang ditunjukkan oleh Cupak terhadap Gerantang menyebabkan Cupak selalu merasa tidak puas dan ingin menguasai Gerantang. Dengan sifat loba dan karakter pembohong menyebabkan Gerantang merasa tersiksa dan menderita. Dengan cerita tersebut diharapkan manusia tidak memiliki sifat-sifat seperti Cupak yaitu rakus, pembual, dan pembohong.

9. *Bagus te Gawek Bagus te Dait, Lenge te Gawek Lenge te Dait*

Sahnan (wawancara Sahnan, 8 Agustus 2014) menjelaskan bahwa *bagus* artinya baik, *te gawek* artinya pekerjaan, *bagus te dait* artinya baik hasilnya, sedangkan *lange* artinya jelek, dan *te gawek lenge te dait* artinya jelek yang dikerjakan maka jelek hasilnya. Hal ini menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan memberikan dampak pada hasil pekerjaan tersebut. Misalnya jika kita melakukan pekerjaan yang baik dan positif, maka akan memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram pada diri kita sendiri. Sebaliknya bila kita melakukan perbuatan yang buruk maupun jahat maka hasilnya akan menyengsarakan atau menderitakan orang lain bahkan menyusahkan diri kita sendiri. Untuk itu, janganlah kita melakukan perbuatan yang dapat menyusahkan bahkan merugikan orang lain karena akan berdampak kepada diri

kita sendiri. Dengan demikian sepatutnya kita sebagai umat manusia melakukan suatu perbuatan dilandasi atas rasa kemanusiaan yang tinggi dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan moral sehingga dapat memperkuat jati diri sebagai umat manusia yang memiliki kepribadian dan rasa perikemanusiaan.

10. *Bedait Kanca Pada Bedeng Gigi*

Bedait berarti berjumpa, *kanca* berarti dengan, *pada* berarti sama, *bedeng* berarti hitam, dan *gigi* berarti gigi. Jadi secara keseluruhan ungkapan tersebut berarti berjumpa dengan sama-sama hitam gigi. Ungkapan ini dikatakan orang pandai/jagoan yang berjumpa dengan sesama orang pandai/jagoan. Jagoan di sini bisa dalam ilmu, bisa dalam kekuatan jahat (ilmu hitam). Seseorang menjadi terkenal karena kemampuannya, baik positif maupun negatif. Ajaran yang terkandung dalam ungkapan ini adalah agar orang jangan bersifat sombong karena kelebihan yang dimiliki. Bagaimanapun tinggi ilmu seseorang atau jagoannya pasti ada yang menyamai atau bahkan melebihi.

11. *Maraq Penyu, Beteloq Leq Darat, Meta Kakenan Leq Tenggara Segara*

Maraq berarti seperti, *penyu* berarti kura-kura, *beteloq* berarti bertelur, *leq darat* berarti di darat, *meta* berarti mencari, *kakenan* berarti makanan, *leq tengaaq* berarti di tengah, dan *segara* berarti laut. Secara keseluruhan ungkapan ini berarti seperti kura-kura bertelur di darat, mencari makan di laut. Ungkapan ini lahir pada zaman penjajahan. Rakyat sudah bisa merasakan bahwa penjajah hanya bertujuan untuk memperkaya diri. Kekayaan itu tidak disimpan di tempat mereka memperolehnya, tetapi dikirim ke tempat asalnya, untuk kepentingan keluarganya.

Adanya ungkapan ini dimaksudkan untuk mengingatkan agar kita selalu berhati-hati dan waspada, jangan sampai terjebak oleh keinginan mengumpulkan keuntungan pribadi dari jabatan yang kita pegang.

12. *Maraq Sifat Bebalog Ndeqna Bau Ceplak Siq Todokna Pemecut Elongna Repoq Tolang Daengta*

Maraq berarti seperti, *sifat* berarti sifat, *bebalog* berarti buaya, *ndeqna bau* berarti tidak bisa, *ceplak* berarti terkam, *siq todokna* berarti dengan mulutnya, *pemecut* berarti cambukan, *elongna* berarti ekornya, *repoq* berarti remuk, *tolang daengta* berarti tulang rusuk kita. Seperti sifat buaya, tidak dapat menerkam dengan mulutnya, cambukkan ekornya meremukkan tulang rusuk kita. Ungkapan ini biasanya dikenakan kepada para pemimpin yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya. Seorang pemimpin adalah orang yang memiliki wewenang. Dalam ungkapan ini digunakan buaya sebagai perumpamaan karena buaya memang sering dijadikan lambang kekuasaan dalam arti yang buruk, yaitu keserakahan. Di sini mulut buaya dimaksudkan sebagai kekuasaan yang dimiliki. Sedangkan ekor buaya diumpamakan sebagai para bawahan yang diperalat. Jadi, buaya digambarkan mempunyai dua senjata untuk membunuh lawan, yaitu mulut dan ekornya. Kalau tidak bisa dengan mulut ia akan menggunakan ekornya untuk menyerang lawan. Ungkapan ini mengandung ajaran agar jika menjadi pemimpin jangan mempunyai sifat demikian, yaitu menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang demi kepentingan pribadi. Hal tersebut akan menimbulkan antipati dari rakyat yang dipimpin. Timbulnya ungkapan tersebut rupanya disebabkan adanya contoh-contoh perbuatan

para pemimpin yang tidak terpuji. Lebih-lebih pada zaman penjajah dahulu. Banyak pemimpin yang ingin cari muka di depan penjajah, sehingga ia rela mengorbankan rakyat/bangsanya sendiri demi kepentingan pribadinya. Namun, sampai sekarangpun ungkapan ini masih bisa ditujukan terhadap pejabat yang berbuat seperti itu.

Ungkapan-ungkapan seperti di atas sangat erat dengan kearifan lokal suatu masyarakat. Kearifan lokal ini merupakan suatu larangan yang mengandung ajaran. Pemimpin tidak boleh mempunyai sifat serakah, yaitu menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang demi kepentingan diri sendiri. Hal tersebut dapat menimbulkan antipati dari rakyat yang dipimpin. Dengan mencermati ungkapan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa perilaku-perilaku tersebut merupakan tindakan korupsi walaupun dilakukan pada zaman dulu.

Dengan tergambarnya ungkapan tradisional tersebut dapat memberi makna bahwa kearifan lokal atau kebudayaan masyarakat Sasak sangat berperan penting untuk menciptakan adanya rasa persatuan, kebersamaan, dan perdamaian. Berdasarkan hasil wawancara di Desa Lingsar, Lombok Barat tentang kearifan lokal terkait dengan pendidikan antikorupsi, adat *Wetu Telu* suku Sasak membuat suatu aturan atau kesepakatan yang harus ditaati dan diindahkan bersama warganya dengan maksud siapa yang melanggar aturan tersebut harus mendapat ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Bentuk sanksi yang diberlakukan ada empat jenis, yaitu 1). *Ngayah*; 2). *Pelilaq*; 3). *Peliwah*; 4). *Selong*. Ganjaran ini diberikan tergantung besar kecilnya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Masing-masing sanksi ada ketentuannya: sanksi *ngayah* sifatnya lebih ringan dari tiga

sanksi lainnya. *Ngayah* disini artinya bekerja tanpa upah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya pada saat mengangkut pasir dibawa ke suatu tempat sampai selesai. Sanksi berikutnya, yaitu *pelilaq*. Sanksi ini lebih memberatkan. Apabila ada seorang warga atau krama adat mencuri, maka akan dipermalukan dengan rambut dicukur compang-camping dan diarak keliling desa sambil menyebut “diri saya pencuri, saya pencuri, saya pencuri”. Walaupun saat ini ada pihak berwajib yang menangani, kejahatan yang telah dilakukan secara turun-temurun akan membuat mereka lebih cepat jera karena dipermalukan di depan umum (*dipelilaq*). Sanksi berikutnya yaitu “*dipeliwah*” artinya dikeluarkan dari perkumpulan krama adat. Terakhir adalah sanksi yang terberat, disebut *selong*. Hukum *selong* masih bertahan sampai sekarang, walaupun hukum *selong* ini sudah dikenal sejak dahulu, sejak zaman kerajaan. Orang yang *diselong* biasanya orang yang melakukan zina atau selingkuh yang dianggap membawa aib di masyarakat. Mereka diasingkan/*diselong* dari kampungnya dan tidak diperkenankan untuk kembali. Dengan adanya penjelasan singkat berupa sanksi tersebut dapat dikatakan sudah ada pemahaman pendidikan antikorupsi pada masyarakat suku Sasak di Lombok. Tentunya pendidikan antikorupsi melarang keras terjadinya praktik-praktik korupsi pada masyarakat karena dapat merugikan rakyat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan hasil wawancara di Karang Bayan dan Batu Kumbang, Lombok Barat, pendidikan antikorupsi telah menjadi pemahaman masyarakat Karang Bayan sejak dulu. Misalnya, jika seorang ketua organisasi menggelapkan uang krama adat artinya menggunakan dengan cara tidak benar, maka ia diberhentikan secara tidak hormat sebagai pemimpin dan harus mengganti berapa jumlah uang yang dihabiskan. Orang tersebut selain dipecat juga dikeluarkan dari perkumpulannya.

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, di Desa Lingsar sudah terjadi pola interaksi yang baik antara masyarakat Sasak dengan orang Hindu sejak dari dulu sampai sekarang. Pola interaksi tersebut dapat terlihat saat dua kegiatan yang berbeda dapat dilaksanakan pada tempat dan waktu yang bersamaan.

Pura Lingsar dan *Kemaliq* merupakan salah satu tempat suci yang berfungsi sebagai wahana umat Hindu dan Islam (*Wetu Telu* Suku Sasak) secara vertikal berhubungan dengan Sang Pencipta. Dalam kenyataannya, Pura Lingsar dan *Kemaliq* digunakan sebagai tempat pemujaan para dewata (Tuhan Yang Maha Esa) yang ada di Lombok yang memberikan anugerah keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan kepada umatnya. Mengingat Pura Lingsar tersebut merupakan salah satu Pura Khayangan dan *Kemaliq* sebagai tempat pemujaan *Wetu Telu* suku Sasak yang ada di Lombok, maka Pura Lingsar dan *Kemaliq* merupakan bagian peninggalan sejarah nenek moyang yang perlu dipelihara serta dilestarikan keberadaannya.

Menurut catatan sejarah kata *Lingsar* berasal dari kata *ling* berarti sabda dan *sar* berarti sah, sehingga *Lingsar* berarti suatu sabda yang sah (jelas). Pura Lingsar merupakan suatu tempat persembahyangan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan negara atas kesungguhan dan kemantapan hati dalam melakukan pemujaan. Persembahyangan yang dilakukan tidak lain bertujuan untuk melakukan suatu permohonan keselamatan serta restu kepada Yang Maha Kuasa, baik secara lahiriah maupun batiniah.

Pada bagian lain di Pura Lingsar terdapat Pura *Kemaliq*. *Kemaliq* berasal dari kata *kamaduk* dalam bahasa Sansekerta yang artinya air kehidupan, sedangkan *maliq* dalam bahasa Sasak berarti keramat atau suci. Dalam keseharian Pura Lingsar

tidak hanya dikunjungi oleh Umat Hindu dalam melakukan persembahyangan, tetapi juga umat lain seperti Islam (*Wetu Telu Suku Sasak*), sehingga tempat suci ini merupakan suatu tempat bagi umat Hindu dan Umat Islam (*Wetu Telu Suku Sasak*) secara bersama-sama melakukan kegiatan ritual.

Dalam memberikan makna kepada benda-benda yang merupakan kegiatan yang secara kolektif dilakukan individu, secara bersama-sama dalam berbagai kelompok yang terlibat dalam kegiatan akan memberikan makna realitas. Hal tersebut senada dengan pernyataan Bagus (1996:50) yang menyatakan bahwa makna akan terkait dengan kebudayaan. Kebudayaan hanya menjadi suatu pembeda dan pewujud dari suatu kehidupan manusia. Kebudayaan harus memiliki makna yang lebih dalam kehidupan manusia.

Dalam menghubungkan manusia dengan yang gaib dan keramat salah satunya melalui upacara religi atau ritual. Menurut Van Gennep (dalam Koentjaraningrat, 1987:74) menyatakan bahwa ritus dan upacara religi secara universal pada dasarnya berfungsi sebagai ritus untuk menimbulkan kembali semangat hidup.

Menurut Kleden bahwa seni ritual akan memiliki makna dan selalu berkaitan dengan kebudayaan. Mengingat seni ritual yang dipersembahkan di Pura Lingsar oleh sebagian anggota suku Sasak memiliki makna-makna dan tujuan tertentu. Untuk memberikan nilai atas kebudayaan tersebut, maka seni perlu diekspresikan melalui dunia simbolik. Pada dasarnya simbol-simbol dapat diproduksi, direproduksi, dan disimpan karena hal tersebut memiliki muatan mental dan kognitif dari suatu kebudayaan baik berupa pengetahuan, kepercayaan, makna dan simbol serta nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat suku Sasak di Kabupaten Lombok Barat.

Dalam seni ritual yang terkait dengan nilai kehidupan pokok suku Sasak di Kabupaten Lombok Barat salah satunya adalah memiliki nilai religius. Nilai-nilai tersebut diungkapkan melalui seni ritual yang dipersembahkan bersamaan dengan upacara *odalan* di Pura Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Seni ini merupakan suatu cerminan identitas budaya suku Sasak yang sekaligus terkait dengan kegiatan upacara *odalan* di Pura Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Identitas ini akan dipahami sebagai himpunan dari ciri-ciri yang dapat menandai suatu himpunan manusia atau kelompok suku bangsa. Adapun dimensi dari kelompok suku bangsa dapat dibedakan dengan kelompok suku bangsa lain karena budayanya.

Dengan demikian diperlukan suatu dialog antara para tokoh agama untuk meredam konflik antara masyarakat yang menganut keyakinan yang berbeda. Dialog antartokoh agama, tokoh masyarakat diperlukan dalam rangka menetralisasi penafsiran-penafsiran konvensional atas agama maupun nilai-nilai moral. Dalam konteks agama tertuang penyebaran ajaran-ajaran perdamaian, kasih sayang, dan kesejahteraan.

B. Praktik Nilai Pendidikan Antikorupsi Pada Suku Sasak di Lombok

Nilai adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup dan diyakini bersama untuk dapat diturunkan kepada generasi penerus bangsa. Sistem nilai sebagai subsistem kebudayaan terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap bernilai dalam hidup. Dengan demikian, suatu sistem nilai berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi perilaku manusia. Sistem-sistem tersebut merupakan suatu tata kelola manusia yang lebih konkrit seperti

norma, hukum, aturan-aturan khusus sudah berpedoman pada sistem nilai budaya (Koentjaraningrat, 1974:320).

Pengertian nilai bila dikaitkan dengan pendidikan antikorupsi terdapat beberapa hal seperti kejujuran, kependidikan, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kebersihan, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip antikorupsi untuk dapat dijalankan dengan baik.

- Nilai Kejujuran

Menurut Sugono kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan individu atau masyarakat pada umumnya. Tanpa sifat jujur seseorang tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya (Sugono, 2011:75). Nilai kejujuran diibaratkan seperti mata uang yang berlaku di mana-mana, termasuk di dalam kehidupan masyarakat. Jika seorang terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, maka selamanya orang lain merasa ragu untuk mempercayainya. Sebagai akibatnya seseorang akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi dengan demikian prinsip kejujuran harus dapat dipegang teguh oleh setiap orang untuk memupuk dan membentuk keadaan yang mulia bagi semua orang atau masyarakat.

Nilai kejujuran ini bila dikaitkan dengan kearifan lokal pada masyarakat suku Sasak akan mengandung makna larangan, saran, arahan terhadap hal-hal yang bersifat positif dan tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap apa yang telah menjadi kesepakatan bersama kelompok bahkan masyarakat. Kearifan lokal suku Sasak ini akan tercermin di dalam ungkapan tradisional suku Sasak yang berbunyi *dendeqte ngelet/ngelamit batur*. Ungkapan ini mengandung arti karakter individu yang memiliki

sifat loba atau serakah dan perlakuan curang yang menyebabkan perasaan orang lain sakit hati. Sifat-sifat tersebut membuktikan telah lunturnya nilai kejujuran seseorang atau sekelompok orang di masyarakat. Hal seperti ini merupakan pantangan serta larangan dalam kearifan lokal masyarakat suku Sasak.

Lunturnya nilai kejujuran tercermin juga dalam ungkapan tradisional suku Sasak yang berbunyi *maraq begang leq lumbung*. Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya kecurangan atau ketidakjujuran serta pemerasaan yang dilakukan seseorang/pengusaha terhadap orang lain atau masyarakat yang menyebabkan seseorang mengalami kerugian besar. Hal seperti ini merupakan pantangan yang amat besar serta larangan. Dalam hal ini yang mereka harapkan adalah adanya suatu sikap jujur yang murni, sehingga akan terhindar dari praktik-praktik korupsi yang membudaya.

- Nilai Kepedulian

Definisi kata kepedulian adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan (Sugono, 2011:76). Nilai kepedulian sangat penting dipahami seseorang atau sekelompok orang bahkan masyarakat luas, terutama menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Kepedulian seseorang atau sekelompok individu harus mulai ditumbuhkan sejak dini. Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan sikap peduli di masyarakat sangat penting. Seorang individu bahkan masyarakat luas dituntut untuk peduli terhadap lingkungan dan juga terhadap sesamanya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai wujud kepedulian adalah dengan menciptakan suasana yang nyaman di mana kita berada. Hal ini dimaksudkan agar di mana kita berada menjadi tempat untuk berkarya, berbuat, dan berperilaku dengan baik tanpa adanya hambatan-hambatan yang berarti yang dapat merugikan.

Bila dikaitkan dengan kearifan lokal suku Sasak, sejak masa lampau etnik Sasak tidak mengenal tentang *wadah* yang lebih dikenal dengan istilah *krama*. Jadi, *krama* ini merupakan suatu perkumpulan yang ingin membentuk atau mewujudkan suatu kesepakatan bersama di masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk membingkai pola perilaku serta menetapkan sanksi jika terjadi pelanggaran-pelanggaran di lingkungan *krama* itu sendiri. Dalam praktiknya akan terjabarkan bahwa kearifan lokal tersebut akan tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan suku Sasak yang dapat menggambarkan kepeduliannya seperti: 1). Saling *jot/perasak* artinya saling memberi atau mengantarkan makanan; 2). *pesilaq* artinya saling undang untuk suatu hajatan keluarga; 3). Saling *pelangarin* artinya saling layat jika kerabat/sahabat yang meninggal; 4). Saling *peliwat* artinya sikap menolong orang/teman yang sedang bangkrut; 5). Saling *lilaq/gentik* artinya sikap menolong dengan memberikan bantuan material terhadap teman yang sedang kena musibah. Di samping itu, kearifan lokal ini akan tercermin pula dalam ungkapan tradisonal suku Sasak yang berbunyi *nenggale lek bongkor batur*. Ini artinya suka memanfaatkan jerih payah/tenaga orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi diri sendiri, tidak peduli dengan keadaan orang lain. Penjelasan dari informan kami di lapangan, menggambarkan bahwa sesungguhnya perilaku tersebut telah merugikan orang lain dan bertentangan dengan hak dan kewajiban manusia.

- Nilai Kedisiplinan

Definisi kata disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan. Hidup disiplin tidak bersifat harus hidup seperti pola militer. Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk menggunakan waktu dengan baik, kepatuhan pola seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di suatu tempat atau

masyarakat, mengerjakan segala sesuatunya tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan. Manfaat dari hidup disiplin adalah dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien.

Disiplin juga membuat orang lain percaya, contoh: orang tua akan lebih percaya pada anaknya yang hidup disiplin untuk belajar di kota lain dibandingkan dengan anak yang tidak disiplin. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan beberapa ungkapan tradisional di antaranya berbunyi *Patut Patuh Pacu*. Ungkapan ini mengandung makna kearifan lokal suku Sasak baik dikaitkan dengan pendidikan antikorupsi. Hal ini terlihat dan terkait erat dengan nilai kedisiplinan dalam pendidikan antikorupsi. Ungkapan *Patuh Patut Pacu* mengandung pengertian bahwa segala sikap, perbuatan atau perilaku yang dilakukan selalu berdasarkan atas aturan yang berlaku di masyarakat. Di dalam sikap dan perilaku disiplin sudah jelas akan mengedepankan adanya rasa kebersamaan dan persaudaraan yang tinggi yang dilandasi dengan norma-norma kebenaran.

- Nilai Tanggung jawab

Difinisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atas tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya. Masyarakat atau seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab akan menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati karena berpikir bahwa jika suatu tugas tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat merusak citra di depan orang lain. Bila dalam porsi yang kecil sudah dapat menyelesaikan tugas dengan baik, kepercayaan orang akan bertambah, sehingga orang bersangkutan berhak untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi sebagai hasil kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Dalam hal ini tanggung jawab dapat juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan, maksudnya pengabdian adalah perbuatan baik yang

berupa pikiran atau pendapat sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, atau suatu ikatan dan semua itu secara tulus ikhlas (Sugono, 2011:78).

Menurut Budi Utama, nilai tanggung jawab akan terlihat juga dalam beberapa kitab suci yang menyatakan bahwa orang yang tidak pernah mencuri barang milik orang lain, baginya tidak ada yang patut ditakuti, dan tidak perlu was-was kemanapun kita pergi. Sebaliknya kalau dia mencuri milik orang lain kemanapun mereka pergi pasti merasa takut. Artinya jika seseorang melakukan perbuatan mencuri atau korupsi maka hidupnya tidak akan pernah tenang, selalu merasa ketakutan dan dikejar-kejar dosa (Budi Utama, ttt:13).

Berdasarkan hasil wawancara di Karang Bayan Lombok Barat pendidikan antikorupsi telah menjadi pemahaman masyarakat Karang Bayan sejak dulu khusus pada suku Sasak. Pendidikan antikorupsi berupaya mencegah tindakan korupsi. Dapat dijadikan contoh jika terjadi kasus di masyarakat, misalnya seorang ketua organisasi menggelapkan uang organisasinya atau korupsi atau menggunakan uang secara tidak benar, maka ia diberhentikan secara tidak hormat sebagai pemimpin dan harus mengganti jumlah uang yang dihabiskan. Orang tersebut selain diberhentikan secara tidak hormat juga dikeluarkan dari perkumpulannya. Dalam hal ini nilai tanggung jawab sangat berperan. Nilai tanggung jawab ini bila dikaitkan dengan kearifan lokal suku Sasak terkait dengan pendidikan antikorupsi akan tercermin dalam ungkapan tradisional suku Sasak yang berbunyi *patut patuh pacu* yang berarti segala sikap, perbuatan atau perilaku yang dilakukan selalu berdasarkan aturan yang berlaku di masyarakat serta dilandasi dengan kebersamaan dan persaudaraan serta tanggung jawab yang tinggi. Dengan adanya rasa kebersamaan serta tanggung

jawab tersebut akan tercipta suatu kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat menuju kebahagiaan lahir dan batin.

- Nilai kemandirian

Kemandirian dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan karakter kemandirian tersebut dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain. Ajaran yang mengedepankan nilai kemandirian mengandung makna setiap usaha hendaknya dikerjakan atas tanggung jawab atas usaha sendiri bukan mengandalkan orang lain. Artinya pekerjaan hendaknya dikerjakan secara profesional.

Guna memupuk kemandirian dalam bertindak maka diajarkan agar setiap orang mampu mengendalikan kecenderungan negatif yang terdapat dalam diri manusia. Artinya agar seseorang bergantung kepada orang lain dan dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya secara mandiri, mereka harus mampu menghindarkan diri dari hawa nafsu yang buruk, kerakusan, ketamakan, marah, kebingungan dan iri hati (Budi Utama,ttt:18).

- Nilai kerja keras

Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan yang jelas, pendirian, pengendalian diri, keberanian, dan pantang mundur. Setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan kepercayaan diri, maka akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi, bekerja keras akan menjadi tidak berguna tanpa adanya pengetahuan. Orang yang bekerja keras, tidak mengenal lelah dan berbuat

berdasarkan kebenaran. Setiap pekerjaan dilaksanakan dengan tekun. Betapa pentingnya kerja keras yang dilandasi kebenaran. Jika seseorang terbiasa bekerja keras dan tekun dalam pekerjaan yang diemban, maka mereka akan terhindar dari perbuatan curang karena ketabahan dan kedisiplinannya dalam menjalankan tugas. Nilai kerja keras dalam kearifan lokal suku Sasak bila dikaitkan dengan pendidikan antikorupsi akan tergambar dalam ungkapan tradisonal suku Sasak yang berbunyi *tindih maliq merang*.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supardi tanggal 4 Agustus 2014 menjelaskan kata *tindih* berarti taat/patut, *maliq* berarti pantang/sanksi dan *merang* berarti garang. Dengan demikian filosofis dari *tindik maliq merang* merupakan suatu perbuatan yang dilandasi dengan kerja keras atau perbuatan selektif yang berlandaskan etika moral dengan berbicara yang sopan, berperilaku baik dan berpikir positif, sesuai dengan tata krama kemanusiaan sehingga tidak menjadi manusia yang *tulah manuh* terhadap ajaran leluhur. Dalam hal ini dikatakan nilai kerja keras mempunyai peranan yang sangat penting.

- Nilai keberanian

Keberanian sangat penting untuk mencapai kesuksesan tentu saja keberanian akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya. Untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan harus mempertimbangkan masalah dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan percaya kepada diri sendiri. Di manapun dan dalam kondisi apapun seringkali harus diambil keputusan yang cepat dan harus dilaksanakan dengan cepat pula. Salah satu kesempatan terbaik untuk membentuk suatu pendapat atau penilaian yang sebaik-baiknya adalah dalam kesunyian di mana dia bisa berpikir tanpa diganggu.

Kata *kawiriyen* sarat dengan nilai keberanian. *Kawiriyen* artinya berani mengatakn benar kalau itu memang benar dan berani pula mengatakan salah kalau itu memang salah. *Kawiriyen* dapat dimiliki oleh seseorang setelah mengisinya dengan sifat yang dimiliki seperti: kuat iman, berani dan tangguh dalam menegakkan kebenaran, serta tabah dan tegar dalam menghadapi segala risiko. Manusia yang memiliki sifat seperti itu sudah memahami tujuan hidup pada hakikatnya kembali menyatu pada Tuhan. Nilai keberanian dapat dikembangkan oleh seseorang atau masyarakat dalam kehidupan di masyarakat.

Nilai keberanian yang ada dalam kearifan lokal suku Sasak di Lombok akan tercermin dalam ungkapan tradisional yang berbunyi *bedait kanca pada bedeng gigi*. Ungkapan ini dapat menggambarkan adanya keterkaitan dengan pendidikan antikorupsi dan ungkapan ini mengandung makna: *bedait* berarti berjumpa, *kanca* berarti dengan, *pada* berarti sama, *bedeng* berarti hitam, *dan gigi* berarti gigi. Jadi secara keseluruhan ungkapan ini berarti orang pandai/jagoan yang berjumpa dengan sesama pandai/jagoan. Jagoan disini bisa berarti ilmu, bisa pula berarti kekuatan jahat (ilmu hitam). Ajaran dalam ungkapan ini menyarankan agar orang jangan bersifat sombong karena sesuatu kelebihan yang dimiliki karena bagaimanapun tinggi ilmu seseorang pasti ada yang dapat menyamai bahkan melebihi.

- Nilai Keadilan

Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Karakter adil ini perlu sekali dibina sejak awal agar mereka dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Dalam menegakkan hukum harus dilandasi oleh nilai keadilan. Para hakim tidak boleh memihak dan tidak boleh berat sebelah, penegakan hukum

haruslah berdasarkan pertimbangan yang benar. Keadilan harus ditegakkan. Jika keadilan dilanggar, maka kehancuran akan terjadi. Jika keadilan dirusak oleh ketidakadilan atau kebenaran dirusak oleh kebohongan, sedangkan hakim melihatnya maka ia akan dihancurkan pula. Melanggar keadilan akan menghancurkan diri sendiri. Nilai keadilan adalah keberanian untuk mengatakan dan membela kebenaran. Keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan sepatutnya harus dimiliki oleh para penegak hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia. Para penegak hukum harus dibekali dengan nilai, yaitu memiliki integritas yang tinggi, moral yang luhur serta senantiasa berpikir objektif dalam menimbang persoalan hukum yang dihadapi. Seorang penegak hukum harus memahami sikap yang tidak boleh memihak dan pilih kasih terhadap salah satu pihak atau golongan. Mereka harus mampu bersikap objektif dan adil.

Nilai keadilan dalam kearifan lokal suku Sasak akan tercermin dalam ungkapan tradisional yang berbunyi *bagus tegawe bagus tedait, lenge tagawe lenge tedait*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Sahnun tanggal 8 Agustus 2014 menjelaskan bahwa *bagus berarti* baik, *tegawe* berarti pekerjaan, *bagus tedait* artinya baik hasilnya, sedangkan *lenge* artinya jelek, dan *tegawe lenge tedait* artinya jelek yang dikerjakan maka jelek hasilnya. Arti pada ungkapan di atas mengandung makna, bahwa perbuatan yang dilakukan memberikan dampak pada hasil pekerjaan tersebut. Di sinilah nilai keadilan dapat berperan untuk membedakan perbuatan baik buruk perbuatan seseorang dan hasil perbuatan yang harus dinikmati.

BAB V

PENUTUP

Mengingat kearifan lokal sarat dengan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dapat menjauhkan masyarakatnya dari keinginan curang ataupun korupsi sangat penting disosialisasikan. Tindakan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, korbannya adalah masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan pendidikan antikorupsi generasi penerus bangsa akan lebih awal memahami masalah korupsi sehingga tidak melakukan kejahatan ini.

Pendidikan antikorupsi tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga menentukan pola pikir, serta tingkah laku masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip hidup yang baik. Sesungguhnya kearifan lokal yang terkait dengan nilai-nilai pendidikan antikorupsi merupakan suatu nilai yang berharga dan berguna bagi manusia. Nilai bersifat abstrak, seperti sebuah ide, dalam arti ditangkap melalui indra. Nilai mengandung suatu harapan terhadap segala sesuatu yang diinginkan, misalnya nilai keadilan, kesederhanaan, kejujuran, kepedulian, dan lain-lainnya. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang erat hubungannya dengan kearifan lokal suatu masyarakat, khususnya masyarakat suku Sasak.

Kearifan lokal budaya Sasak sebagai sebuah *local knowledge* atau *local genius* di masyarakat biasa disebut dengan istilah lokalnya

pengadeq-adeq tau lokaq (warisan para leluhur suku Sasak). Sedangkan korupsi istilah lokalnya sering disebut *ngelingkungan/nyembih*. Kearifan lokal suku Sasak dalam pendidikan informal di keluarga sudah dimulai sejak dini, melalui cerita-cerita rakyat yang masih hidup dan diyakini kebenarannya. Keyakinan mereka terhadap kebenaran cerita rakyat yang hidup di masyarakat dijadikan pedoman untuk menata perilaku, sehingga dapat berfungsi sebagai pengendali diri. Tujuan pengendalian diri ini adalah sebagai larangan agar tidak berbuat menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan atau melakukan tindakan korupsi. Pendidikan antikorupsi atau anti-*ngelingkungan* pada masyarakat suku Sasak telah mulai ditanamkan pada anak-anak sejak dini. Artinya anak-anak sudah mulai diberikan pemahaman tentang pendidikan antikorupsi, yaitu ketika anak-anak sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Media yang pakai orang tua untuk memberikan pemahaman tentang pendidikan antikorupsi melalui cerita rakyat atau dongeng, legenda, kisah leluhur, seperti contoh cerita *Cupak Gerantang*. Cerita ini melambangkan dua manusia yang memiliki karakter berbeda yang dapat mencerminkan sifat baik dan buruk. Tak kalah penting juga adanya sebutan *Sesenggak Sasak* yang berbunyi *ndaq berakal maraq cupak*, artinya jangan berakal busuk seperti kelakuan si *cupak* yang suka *ngelikungan*. Sebaliknya si *gerantang* mempunyai sifat-sifat jujur, penurut, dan kalem. Di samping itu, ada *sesenggak* lain ada yang mengandung larangan yang berbunyi *ndaq gerang berakal songkok*, artinya jangan makan sendiri atau menghabiskan sendiri hak orang lain.

Selain adanya *sesenggak* dalam kearifan lokal suku Sasak tergambar juga dalam bentuk pantun dan gurindam yang mengandung ajaran moral yang berbunyi: *anak jari papuq baloq, inget-inget* (anka-anak, cucu-buyut, inget-inget); *leq dunia pacu*

ngaji, sanget-sanget (di dunia belajar ilmu sungguh-sungguh); *ite sini maraq misal belabu jukung* (ibaratnya kita ini sampan yang berlabuh); *ite sini maraq misal leq segara* (kita ini seperti berada di tengah laut). Semua barisan pantun dan gurindam di atas berupaya mengajarkan agar hati-hati menjalankan hidup dan kehidupan, tidak boleh berbuat curang yang dapat berakibat celaka dan sengsara.

Dalam pendidikan moral di usia dini pada suku Sasak, anak-anak sudah mulai diajarkan dan dibiasakan hidup hemat melalui pengajaran moral yang disebut *tekuq* artinya tidak boros, *kikip* artinya tidak berlebihan, *pelit* artinya tidak suka menggunakan uang seenaknya. Untuk menjalankan pendidikan moral tersebut, sejak usia dini anak-anak dibiasakan suka *nyeleng* atau *mecelengan* (menabung) dengan menggukun tiang bambu yang menunjang rusuk serambi rumah atau dapur.

Kearifan lokal suku Sasak yang masih eksis sampai sekarang dan masih terlihat dalam kelembagaan ada yang disebut *krama adat* (*pekraman*) yang berbentuk *krama banjar*, *krama subak*, *krama gubug*, *krama desa*. Kelembagaan adat tersebut dapat dijadikan sebagai kendaraan adat dalam melaksanakan atau menjalankan *awig-awig* (aturan, hukum adat) dan *dedosan adat* (sanksi adat). Ini berarti masyarakat suku Sasak yang ada di Desa Lingsar dan Batu Kumbung telah menetapkan beberapa sanksi untuk menindak orang-orang yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi berupa hukum *ngayah*, *pelilaq*, *peluah*, dan *selong*. Pada hukum *ngayah* dapat berwujud bayar denda dan kerja rodi; pada hukum *pelilaq* dipermalukan di depan orang banyak; hukum *peluah* adalah bersifat pengucilan, sedangkan hukum *selong* adalah sifat pengasingan atau dibuang ke suatu daerah kadang-kadang tidak diperkenankan kembali ke kampung halaman.

Pada masyarakat Sasak keempat sanksi tersebut sudah merupakan kesepakatan *kramanya* yang dijadikan pendoman untuk menindak atau menghukum warga yang berani melakukan tindak pidana korupsi. Selain keempat sanksi itu, sebagai upaya pemberantasan korupsi, suku Sasak juga menerapkan tradisi mengucapkan sumpah yang diikuti dengan meminum air suci tertentu yang sudah dimantrai atau diambil dari mata air yang ada di *kemaliq*. Dengan memberi sanksi seperti itu kepada pelaku diharapkan lebih cepat jera dibandingkan dengan hukuman secara nasional yang diserahkan kepada pihak berwajib. Sebagaimana diketahui keampuhan hukuman yang diberlakukan terhadap pelaku korupsi atau pencuri dan sebagainya adalah dalam bentuk pemberian sanksi disertai sumpah spiritual.

Hasil wawancara dengan Bapak Haji Jalal Arzaki mengenai kasus yang pernah terjadi pada suku Sasak, jika pelaku/pelanggar tidak mau mengakui kesalahan, sementara tidak ditemukan bukti nyata dan tidak ada yang berani menjadi saksi, maka hukum yang diberlakukan adalah mengikrarkan sumpah, mulai dengan bersumpah mendapat bahaya/kecelakaan, sakit, sampai sumpah *pati* (sumpah berani mati) diikuti pesan-pesan spiritual sampai memakan tanah yang dianggap bertuah seperti tanah kuburan. Sampai sekarang tanah kuburan yang terkenal dianggap masih bertuah adalah tanah kuburan *wali nyatoq* di Desa Rembitan, Lombok Tengah. Dalam pelaksanaan hukum tersebut disaksikan oleh warga atau anggota masyarakat sebagai bentuk peradilan umum/terbuka.

Sesungguhnya masyarakat Sasak di Lombok, khususnya di Desa Lingsar dan Desa Batu Kumbung sudah memiliki aturan yang kuat sebagai pedoman untuk memberi ganjaran kepada para pelaku yang melakukan pelanggaran. Bentuk ketradisionalan inilah yang

mencerminkan suatu kearifan lokal atau suatu kebijaksanaan yang bersifat mendidik dalam kaitannya dengan pendidikan antikorupsi. Selain sanksi dan sumpah yang mengandung makna spiritual juga ada beberapa ungkapan tradisional dalam kearifan lokal yang terkait dengan pendidikan antikorupsi. Adapaun ungkapan itu berbunyi: 1) *Patut Patuh Pacu*; 2) *Aiq Meneng, Tunjung Tilah, empak Bau*; 3). *Tindih Maliq Merang*; 4) *Nenggale lek Bongkor Batur*; 5) *Dendeqte Ngelet/Ngelamit Batur*; 6) *Maraq Begang leq Lumbung*; 7) *Maraq Meong Ambuk Pindang*; 8) *Denteqte Gawek Maraq Cupak Gerantang*; 9) *Bagus te Gawek Bagus te Dait, Lenge te Gawek Lenge te Dait* ; 10) *Bedait Kanca Pada Bedeng Gigi*, 11). *Maraq Penyu Beteloq leq Darat, Meta Kakenan leq Tenga Segara*, 12). *Maraq Sifat Bebalog, Ndeqna Bau Caplak Siq Todokna, Pemecut Elongna Remuk Tolang Daengta*.

Ungkapan tersebut ditemukan berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dan semua ungkapan ini mengandung nilai pendidikan antikorupsi: nilai kejujuran, nilai kepuhulian, nilai kemandirian, nilai kerja keras, nilai tanggung jawab, nilai keadilan, nilai keberanian, dan nilai kedisiplinan. Jadi, dengan demikian kearifan yang terkait dengan nilai-nilai pendidikan antikorupsi sudah menjadi pemahaman suku Sasak sejak dahulu, sehingga mereka mempunyai pedoman dalam mengendalikan diri agar tidak terjerumus melakukan hal-hal negatif, khususnya tindak pidana korupsi maupun perbuatan kriminal lainnya yang dapat merugikan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2008. Agama dan kearifan Lokal dalam Tantangan Global.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ali, M. Muhammad. 1999. "Praktek Keberagaman Islam Waktu Telu di Lombok Nusa Tenggara Barat". "Tesis". Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Baedhowi. 2008. *Kearifan Lokal Kosmologi Kejawen: Agama dan Kearifan Lokal Dalam Tantangan Global*. (ed) Irwan Abdullah dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bagus. I Gusti Ngurah (ed). 1998. "*Masalah Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pembangunan*". Denpasar: Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya Universitas Udayana. *Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Sasak: Kearifan Sikap Dan Berprilaku Berdemokrasi Siswa SMP/MTs, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Jilid 42*,
- Biro Pusat Statistik. 2008. *Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2008*.
- Biro Pusat Statistik. 2007. *Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2007*.
- Budi Utama, I Wayan(ed), ttt. *Pendidikan Antikorupsi Perspektif Agama-Agama*.
- Budiwanti, Erni. 2000. *Islam Sasak*. Yogyakarta: LkiS (Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation). Denpasar : Program Pasca Sarajana Universitas Hindu Indonesia. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Pemukiman Sebagai Kesatuan Ekosistem Kasus Desa Swasembada Daerah Nusa Tenggara Barat, 1982.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Tata Kelakuan Di Lingkungan Pergaulan Keluarga Dan Masyarakat Nusa Tenggara Barat, 1989.
- Fauzan, 2011. *Peran Budaya sebagai Perekat Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat*. Makalah, disampaikan pada seminar Budaya Sasak di Tanjung Lombok Utara, 26 -2-2011
- Haba, John. 2007. *Revitalisasai Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso*. Jakarta: ICIP dan Eropean Commision.
- Hadikusuma, Hilman, Prof, SH. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*.
CV Mandar Maju, 1992. Bandung.
- Haryono, Tata Dan Sumber Hukum, Usaha Nasional, Surabaya – Indonesia, 1994. Koesnoe, Moh, Prof, DR, SH, Hukum Adat (Dalam Alam Kemerdekaan Nasional Dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi), Ubhara Press, 1996, Surabaya. Koesnoe, Moh, Catetan – Catetan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga Universitas Press, 1979, Surabaya.
- Ismail, M, Sukardi, dan Su'ud Surachman, 2009. *Pengembangan Model Pembelajaran IPS* Jakarta : Universitas Indonesia.
- Kaplan, David dan Albert A. Manners. 1999. *Teori Budaya*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Kappi, Abdul. 1986. *Pola Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Depdikbud.
- Kayun, I Nengah. 1986. *Sistem Ekonomi Tradisional Sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Masyarakat Terhadap Lingkungan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Depdikbud.

- Keller, Suzanne. 1984. *Penguasa dan Kelompok Elit, Peranan Elite-Penentu Dalam Masyarakat Modern* (terjemahan). Jakarta: CV. Rajawali.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011. *Pendidikan Antikorupsi Untuk Korupsi Di Perguruan Tinggi Islam*. Jakarta: Pusat Kajian Agama Dan Budaya
- Koentjaraningrat. 1980. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Koentjaraningrat. 2004. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lopa Baharudin, 1997. *Majalah Korupsi dan Pemecahannya*. Jakarta : Kipas Putih Aksara
- Mahadi, Prof, SH. *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, Alumni, 1991, Bandung.
- Malinowski, B, 2010. *Dalam Koentjaraningrat Sejarah Teori Antropologi I*.
- May, Abdurrachman. 1989. *Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat Nusa Tenggara Barat*. Mataram : PDIK.
- Muslimin JM. 2006. *Korupsi: Pengertian, Sebab, Dan Dampaknya, Dalam Pendidikan Anti nomor 2*. Singaraja: Undiksha.
- Pengungkapan Nilai Budaya Naskah Kuno KOTARAGAMA, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1995/1996. *Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI,
- Poloma, Margaret, M. 2004. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: CV Rajawali
- Razak, HA, dan Rais Latif, Terjemahan Hadist Saheh Muslim, Pustaka Al-Husna, 1983, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek*

Internasional. Manda Maju. Bandung

Sudiyat, Iman, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, 1981, Yogyakarta. Al-Quran Dan Tafsirnya (Jilid II), Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Departemen Agama RI.

Syakur, A.A. 2006. *Islam dan Kebudayaan "Akulturasi Nilai-nilai Islam Dalam Budaya Sasak"*. Yogyakarta: Adab Press.

Syapruddin, Makna Simbolik Dalam Konsepsi "Agama Beteken Dan Betakaq Adat" (Suatu Landasan Filosofis Dalam Pengamalan Adat Sasak), Pidato Ilmiah, Universitas 45 Mataram, Kamis 30 September 2004.

Triguna, Ida Bagus Gede Yudha, 2000. *Teori Tetang Simbol*. Denpasar : Widya

Dharma. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.

Ungkapan Tradisional Yang Berkaitan Dengan Sila—Sila Dalam Panca Sila Daerah Nusa Tenggara Barat, Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Barat, 1995/1996, Mataram.

Waluyo, Harry. 1986. *Pola Pemilikan Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Wattimena, Reza A.A. 2012. *Filsafat Antikorupsi*. Yogyakarta: Kanisius.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Bapak Arine
Umur : 74 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Mantan Kepala Desa
Pendidikan : SMP Nasional
Alamat : Karang Bayan Lombok Barat
2. Nama : Bapak Irawan,S.Sos
Umur : 69 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Rembuk Dusun
Pendidikan : S1
Alamat : Dusun Batu Kumbung Lombok Barat
3. Nama : Bapak Suparman
Umur : 75 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Pemnagku Adat
Pendidikan : SMEP
Alamat : Desa Lingsar Taman
4. Nama : Haji Mohamad Abdul Hali
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Kades Lingsar
Pendidikan : S1 Ekonomi
Alamat : Dusun Taman Lingsar

5. Nama : Drs. Atiman
Umur : 71 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan PNS
Pendidikan : S1 Pendidikan
Alamat : Dusun Lingsar Tengah
6. Nama : Suladmi
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Kadus Lingsar
Pendidikan : SMP
Alamat : Lingsar Keling
7. Nama : Martawati
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
Alamat : Gandor Selong Lombok Timur
8. Nama : Ibu Masta
Umur : 80 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : -
Alamat : Gandor Selong Lombok Timur
9. Nama : Idrus Arfah
Umur : 72 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan PNS
Pendidikan : S2 Management
Alamat : Jl. Angsa No. 8 Pajang timur

LAMPIRAN FOTO-FOTO



Wawancara dengan narasumber Bapak Haji Jalal Arzaki.



Wawancara dengan para narasumber di Desa Lingsar.



Wawancara dengan narasumber di Desa Batu Kumbung.



Kunjungan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Nusa Tenggara Barat.



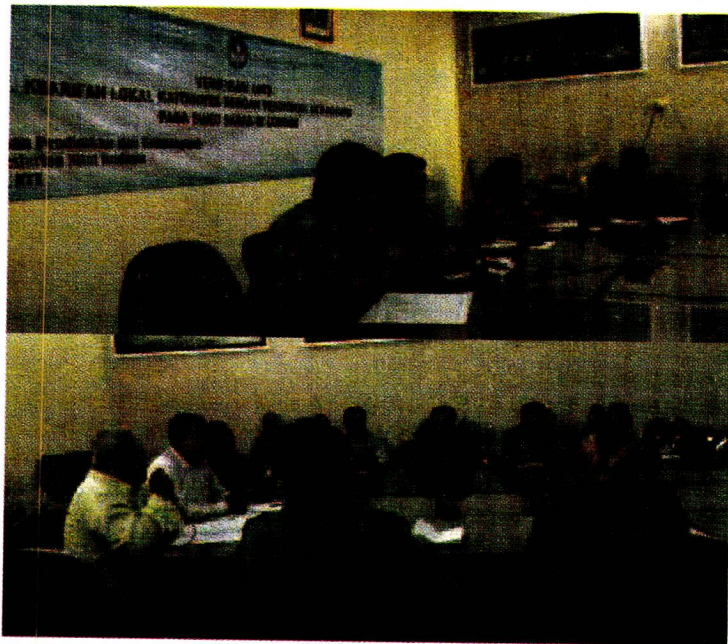
Tim Peneliti saat melaksanakan studi kepustakaan.



Pelaksanaan Focus Discusion Group dengan masyarakat
Desa Lingsar dan Batu Kumbung.



Wawancara dengan narasumber Bapak Wayan Wirata.



Verifikasi data hasil penelitian.





Kearifan lokal dalam bentuk yang umum mempunyai pengertian kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut versi masyarakat Lombok, kearifan lokal mempunyai pengertian perilaku positif manusia berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Sumbernya bisa berasal dari nilai, agama, adat-istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dan beradaptasi dengan lingkungan.

Buku ini dimaksudkan untuk memahami dan mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi serta bentuk kearifan lokal pada suku Sasak di Lombok. Pendidikan antikorupsi atau *anti-ngelingkungan* pada masyarakat suku Sasak telah mulai ditanamkan pada anak-anak sejak dini. Artinya anak-anak sudah mulai diberikan pemahaman tentang pendidikan antikorupsi, yaitu ketika anak-anak sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Media yang pakai orang tua untuk memberikan pemahaman tentang pendidikan antikorupsi melalui cerita rakyat atau dongeng, legenda, kisah leluhur seperti contoh cerita Cupak Gerantang.



PENERBIT OMBAK

[Anggota IKAPI]

Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292

Tlp. (0274) 7019945; Fax. (0274) 620606

e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id

www.penerbitombak.com  Penerbit Ombak Dua

ISBN 602-8



9 786022 582427

Perpustakaan
Jenderal Keb

392

COK

k

KORUPSI